



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024



H. HERMAN DERU
GUBERNUR

H. CIK UJANG
WAKIL GUBERNUR



Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan merupakan laporan tahun pertama dari implementasi RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026. Metode dan teknik penyusunan ini telah berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hendaknya hasil ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja ke depan.

Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di masa mendatang.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi semangat, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik, bagi nusa dan bangsa.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 26 Maret 2025
Gubernur Sumatera Selatan,



H. HERMAN DERU

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Demografi.....	2
B. Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	3
II. PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) 2024 – 2026	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	17
B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	18
C. Akuntabilitas Keuangan	115
D. Analisis Efisiensi	116
IV. PENUTUP	118
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan 2024	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 3. Penghargaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Keterkaitan antara Isu Penting dan Masalah Mendesak dengan Arah Kebijakan Pembangunan 2024.....	2
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2026....	17
Tabel 3.3	Sebaran NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura.....	32
Tabel 3.4	NTP Bulanan Provinsi Sumatera Selatan.....	33
Tabel 3.5	Nilai NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Hortikultura Bulan Januari sampai Desember Tahun 2021-2024(%)......	35
Tabel 3.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2023 Provinsi dan Nasional.....	66
Tabel 3.7	Pencapaian Komponen IPG dan IPM Kabupaten/Kota Sumsel Tahun 2023.....	68
Tabel 3.8	Perbandingan Komponen IPG Sumsel Tahun 2019-2023.....	70
Tabel 3.9	TPAK Sumsel Tahun 2021-2023.....	72
Tabel 3.10	Hasil Rekap Perangkat Daerah.....	113
Tabel 3.11	Akuntabilitas Keuangan.....	114
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	116

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.1	Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	14
Grafik 1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB.....	22
Grafik 1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	25
Grafik 1.4	Indeks Entropi Theil.....	27
Grafik 1.5	Nilai Tukar Petani Tahun 2024.....	30
Grafik 1.6	Capaian NTP Tahun 2024 (Jan-Des) dari berbagai Sub Sektor di Provinsi Sumatera Selatan.....	32
Grafik 1.7	Capaian NTP Bulanan Tahun 2024 dari Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sumatera Selatan.....	33
Grafik 1.8	Capaian NTP Tahun 2021-2024.....	35
Grafik 1.9	NTP Realisasi Tahun 2024 Terhadap Standar Nasional.....	36
Grafik 1.10	Indeks Ekosistem Inovasi Tahun 2023 s.d 2026.....	38
Grafik 1.11	Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2019-2024....	40
Grafik 1.12	Angka Kemiskinan Tahun 2024.....	43
Grafik 1.13	Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s.d 2024.....	45
Grafik 1.14	Perbandingan Target 2024 dan Realisasi Tahun 2024.....	49
Grafik 1.15	Ratio Gini Tahun 2024.....	51
Grafik 1.16	Perbandingan Realisasi Ratio Gini Tahun 2022 s.d 2024.....	53
Grafik 1.17	Realisasi Gini Ratio Tahun 2024.....	54
Grafik 1.18	Persentase Tingkat Pengangguran.....	56
Grafik 1.19	Proyeksi dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka.....	57
Grafik 1.20	Capain TPT per Tahun.....	58
Grafik 1.21	TPT dengan Target Nasional.....	59
Grafik 1.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	61
Grafik 1.23	IPG Sumsel Tahun 2024.....	65
Grafik 1.24	Perbandingan IPG Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	65
Grafik 1.25	IPG Tingkat Provinsi Tahun 2024.....	66
Grafik 1.26	IPG Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.....	69
Grafik 1.27	IPG Sumsel Realisasi 2020-2024.....	70
Grafik 1.28	Target dan capaian IPP Sumsel Tahun 2024.....	78
Grafik 1.29	Gambar Nilai IPP Sumatera Selatan dan Nasional 2020-2024.....	80
Grafik 1.30	Prevalensi Stunting Tahun 2024.....	81
Grafik 1.31	Tren Prevalensi Stunting Sumsel dan Nasional 2019-2023.....	82
Grafik 1.32	PrevalensiStunting pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	83
Grafik 1.33	Perbandingan Nilai IKLH per Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	89
Grafik 1.34	Perbandingan Nilai IKLH per Tahun 2019 s.d 2024.....	92
Grafik 1.35	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahun 2024.....	96
Grafik 1.36	Nilai IRBI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2023.....	101
Grafik 1.37	Perbandingan Nilai INdeks Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 & 2023.....	102
Grafik 1.38	Nilai SAKIP Tahun 2024.....	107

Grafik 1.39	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.....	112
Grafik 1.40	Jumlah Prangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan SKM.....	113
Grafik 1.41	Analisa Nilai IKM Tahun 2022,2023 dan 2024.....	115
Grafik 1.42	Efisiensi Sumber Daya pada Provinsi Sumatera Selatan dengan 16 (enam belas) Sasaran Strategis.....	118

Ikhtisar Eksekutif

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024– 2026 melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Gubernur Sumatera Selatan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Perangkat Daerah (PD) semua indikator kegiatan disesuaikan dengan *Cascading* Perangkat Daerah (PD) masing – masing;
3. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama dalam perumusan capaian;

4. Kinerja Perangkat Daerah (PD) disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPJMD dengan demikian pimpinan Perangkat Daerah (PD) harus berkomitmen dengan penyusunan RENJA capaian dengan *Cascading*.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **434.284.774.200,-** atau 97,55% dari pagu Rp. **445.161.517.983,-** hal ini disebabkan terserapnya anggaran keprogram – program Pemerintah yang telah dicanangkan Provinsi Sumatera Selatan sehingga kinerja dari semua instansi berjalan dengan baik dan efisien.

Palembang, 26 Maret 2025
Gubernur Sumatera Selatan,



H. HERMAN DERU



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax. 350977
P A L E M B A N G

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Palembang, 21 Maret 2025

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN ,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan termasuk provinsi kaya dengan sumber daya alam yang sangat potensial. Kekayaan sumber daya alam di Provinsi Sumatera Selatan antara lain : potensi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan hasil-hasilnya, hasil perikanan, pertambangan (minyak bumi, gas, batubara, dll) dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor untuk mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga diharapkan Provinsi Sumatera Selatan lebih dikenal secara luas, baik menjadi wilayah potensi investasi ataupun menjadi tempat tujuan wisata.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi geografis terletak antara 1⁰ 25' 13" sampai 4⁰ 55' 17" Lintang Selatan dan 102⁰ 3' 52" sampai 106⁰ 19' 45" Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Peta Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah :



Secara umum Sumatera Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 23,5⁰C hingga 34,1⁰C dimana dapat ditemui daerah berhawa panas, sedang dan dingin.

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.592,43 Km² dengan rincian pada tabel berikut :

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Ogan Komering Ulu	4.797,06	13	157	99,77
2	Ogan Komering Ilir	18.359,04	18	327	45,59
3	Muara Enim	7.383,90	22	256	91,73
4	Lahat	5.311,74	24	377	104,09
5	Musi Rawas	6.350,10	14	199	65,75
6	Musi Banyuasin	14.266,26	15	243	44,29
7	Banyuasin	11.832,99	21	305	68,31
8	OKU Selatan	5.493,94	19	259	124,39
9	OKU Timur	3.370,00	20	332	150,01
10	Ogan Ilir	2.666,09	16	241	186,29
11	Empat Lawang	2.256,44	10	156	154,08
12	PALI	1.840,00	5	71	108,74
13	Musi Rawas Utara	6.008,55	7	89	32,38
14	Palembang	369,22	18	107	4.680,72
15	Prabumulih	251,94	6	37	313,78
16	Pagar Alam	633,66	5	35	399,94
17	Lubuk Linggau	401,50	8	72	503,55
Sumatera Selatan		91.592,43	241	3.263	99,77

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

A. Gambaran Umum Demografi

Jumlah Penduduk Tahun 2025 adalah 8.837.301 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Topografi wilayah Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah Barat-Timur dengan ketinggian daerah antara 400 meter sampai 1.700 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah yang mempunyai ketinggian antara 400 meter sampai 500 meter dpl mencakup wilayah daerah sekitar 37%, daerah yang mempunyai ketinggian antara 500 meter sampai 1.000 meter dpl mencakup wilayah sekitar 34%, dan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1.000 meter sampai 1.700 meter dpl mencakup sekitar 29% dari keseluruhan wilayah. Wilayah barat merupakan wilayah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata 900 sampai 1200 meter dpl yang mempunyai potensi daerah wisata. Makin ke arah timur kondisi topografinya berbukit, bergelombang, dan mendatar yang mempunyai potensi lahan agro industri, sedangkan pantai timur Sumatera Selatan merupakan lahan landai dan lahan rawa pantai yang berpotensi dijadikan lahan persawahan dan tambak.

Provinsi Sumatera Selatan, yang secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan semula terdiri dari 4 Kota dan 11 Kabupaten. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi beberapa perubahan status administrasi pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang



Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang yang semula menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi tersendiri. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah terjadi pemekaran wilayah dan peningkatan status, sehingga saat ini wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi 13 Kabupaten dan 4 Kota, sebagai berikut :

1. Kota Palembang;
2. Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Kabupaten Muara Enim;
6. Kabupaten Lahat;
7. Kabupaten Musi Rawas;
8. Kota Lubuk Linggau;
9. Kota Pagar Alam;
10. Kota Prabumulih;
11. Kabupaten Banyuasin;
12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
13. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
14. Kabupaten Ogan Ilir;
15. Kabupaten Empat Lawang;
16. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
17. Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

1. Administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas ini berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan jawaban lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, disusunlah perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana



telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah (Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 3 Staf Ahli Gubernur dan 9 Biro.
2. Sekretariat DPRD.
3. Inspektorat Daerah.
4. Dinas Daerah berjumlah 28 Dinas.
5. Badan Daerah berjumlah 8 Badan.
6. 95 Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari 63 UPT Dinas dan 32 UPT Badan.
7. Cabang Dinas berjumlah 7 (pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral).

Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilandasi pada semangat dan komitmen yang disusun dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dinyatakan visi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah : “Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mengelola potensi sumber daya alam dengan organisasi yang memadai, serta sumber daya manusia yang cukup, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus meningkatkan kualitas SDM yang tersedia. Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 berjumlah 12.729 orang yang terdiri dari: 5.217 orang PNS laki-laki dan 7.512 orang PNS perempuan. PNS tersebar pada unit kerja, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan dan UPTD. Berdasarkan klasifikasi Golongan, Pendidikan dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Ruang	CPNS	PNS	Jumlah
1	IV	0	4208	4208
2	III	9	7868	7877
3	II	2	619	621
4	I	0	23	23
Jumlah		11	12718	12729

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

2) Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	CPNS	PNS	Jumlah
1	S-3 / Doktor	0	59	59
2	S-2 / Pasca Sarjana	0	3640	3640
3	S-1 / Sarjana	1	7657	7658
4	Diploma IV	8	135	143
5	Diploma III / Sarmud	1	554	555
6	Diploma II	0	6	6
7	Diploma I	0	3	3
8	SLTA	1	607	608
9	SLTP	0	40	40
10	SD	0	17	17
Jumlah		11	12718	12729

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

3) Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah Formasi (Orang)	Terisi (Orang)	Jumlah Eselon yang Lowong
1	Eselon I	1	1	-
2	Eselon II	55	49	6
3	Eselon III	346	318	28
4	Eselon IV	982	911	71
Jumlah		1384	1279	105

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 1.1 Keterkaitan antara Isu Penting dan Masalah Mendesak dengan Arah Kebijakan Pembangunan 2024
Identifikasi Masalah Berdasarkan Misi dan Sasaran RPD

Tujuan RPD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
Tujuan I : Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	- Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan) Masih Minim. - Nilai Tukar Petani (NTP) masih belum maksimal.	Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Daerah	Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Peningkatan UMKM Berbasis Digital
	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Ekosistem Inovasi Masih Rendah.		
	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Wisata	Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku.		
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM	Belum maksimalnya pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor serta penyediaan makan dan minum.		
	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah.	- Masih rendahnya laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumber untuk harga berlaku. - Belum Optimalnya Neraca Perdagangan SUMSEL.		
	Terkendali Laju Inflasi Daerah.	Masih tingginya tingkat inflasi daerah.		
	Meningkatnya Investasi Daerah.	Investasi Daerah masih sangat rendah dan minim.		
	Meningkatnya Perekonomian Desa.	Masih sedikitnya desa maju dan mandiri yang ada di Sumatera selatan.		
	Meningkatnya kemandirian transmigrasi.	Masih rendahnya permukiman transmigrasi yang mandiri.		
Tujuan II : Menjadikan Pemerataan	Menurunnya Tingkat Pengangguran.	TPT di Sumatera Selatan masih tinggi.	Belum optimalnya pemerataan dan kualitas kesejahteraan	Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan			masyarakat.	
	Meningkatnya Pendapatan Rumah Tangga	- Masih rendahnya pengeluaran per kapita. - Indeks Pemberdayaan Gender Sumatera Selatan masih dibawah capaian Nasional dan belum optimal.		
	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin	- Masih rendahnya angka rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial. - Masih tingginya pesentase kasus gizi buruk pada rumah tangga miskin sumatera selatan.		
Tujuan III : Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	Usia Harapan Hidup yang masih rendah.	Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia.	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan.	- Harapan Lama Sekolah Sumatera Selatan masih rendah. - Rata-rata Lama Sekolah Sumatera Selatan masih rendah		
Tujuan IV : Meningkatkan Pelestraian Lingkungan dan Menurunkan Resiko Bencana.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir (IKAL) masih rendah dan beberapa belum mencapai kategori baik.	Meningkatnya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan daerah.	Percepatan Realisasi Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana.
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan Daerah	- Masih Tingginya Tingkat Kerentanan Bencana di Sumatera Selatan - Masih Rendahnya Kapasitas Penanggulangan Bencana		
Tujuan V Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Sumatera Selatan masih belum maksimal.	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.	Perepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Pemerintahan.	Pemerintah Daaerah.	Indeks Integritas Daerah masih rendah.		Pelaksanaan pemilu/Pilkada Serentak
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik di Sumatera Selatan masih belum maksimal.		
	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi	Indeks SPBE Sumatera Selatan		

Resume Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	a.	Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan.
		-	Pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan masih selatan masih rendah yaitu sebesar 8,37 dan masih di bawah capaian nasional sebesar 8,69.
		b.	Angka Harapan Lama Sekolah belum tercapai.
		-	Pada tahun 2022, angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,55 dan masih di bawah capaian nasional sebesar 13,10.
		c.	Masih rendah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK
		-	Pada tahun 2022 APM, SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 61,00 dan masih dibawah capaian nasional sebesar 61,97.
		-	Masih terbatasnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dari tingkat SMA/SMK sampai Perguruan Tinggi terutama didaerah terpencil.
2.	Kesehatan		
		a.	Masih rendahnya angka harapan hidup sumsel. Pada tahun 2022 sebesar 70,32 tahun, sedangkan nasional sebesar 71,85 tahun. Rata-rata Harapan hidup kabupaten/kota dibawah usia harapan hidup provinsi.
		b.	Angka stunting pada balita masih tinggi sebesar 18,6%. (2022).
		c.	Tingginya Kematian Bayi; 497 kasus (2022).
		d.	Masih tingginya persentase <i>case detection Rate</i> Penyakit TBC sebesar 40% (2021).
		e.	Meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS pada tahun 2020yang berjumlah masing-masing 420 kasus HIV dan 151 kasus AIDS.
		f.	Penduduk yang telah memiliki Jaminan Kesehatan tahun 2022, baru sebesar 89,4% belum mencapai UHC 100%.
		g.	Masih perlu peningkatan akses sanitasi (83,64) dan air bersih (80,78%).
		h.	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk) masih tinggi, yaitu sebesar 0,12%.
		i.	Masih kurangnya dan belum meratanya penempatan dokter (baru mencapai 20 orang per 100.000 penduduk).
		j.	Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		a.	Sampai dengan tahun 2021 kondisi jalan mantab Provinsi Sumatera Selatan sebesar 93,94% jalan tidak mantap masih 6,06% dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang 91,73km.
		b.	Kerusakan jaringan irigasi permukaan sampai dengan tahun 2021masih tinggi yang terdiri dari kondisi rusak ringan sebesar 13,65%, rusak berat sebesar 6,93% da rusak besar sebesar 1,69%.

		c.	Kerusakan jaringan irigasi rawa sampai dengan tahun 2021 masih tinggi yang terdiri dari kondisi rusak berat 76,85%.
		d.	Persentase penanganan kawasan bebas banjir dan longsor masih perlu ditingkatkan, untuk sampai dengan tahun 2021 penanganan kawasan bebas lahan banjir dan longsor sebesar 56,15% atau dengan luas kawasan yang sudah ditanggulangi seluas 36.844 Ha.
		e.	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang baru 80,00%.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		a.	Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 2.096,05 Ha dari total luas kawasan kumuh seluas 3.331,83 Ha.
		b.	Akses rumah tangga yang terlayani sanitasi layak karena capaian penyediaan infrastruktur sanitasi termasuk sarana prasarana masih dibawah angka nasional yaitu sebesar 84,62% pada tahun 2021.
		c.	Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani air minum layak karena capaiannya masih jauh dibawah realisasi nasional yaitu 84,70% pada tahun 2021.
		d.	Masih adanya rumah yang tidak layak huni sebesar 179.791 rumah tangga.
		e.	Masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah tangga pada tahun 2021 sebanyak 402.475 KK.
5.	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat		
		a.	Masih tingginya kejadian bencana di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi banjir, kebakaran, tanah longsor dan puting beliung.
		b.	Masih kurangnya sistem peringatan dini.
		c.	Masih terdapatnya lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan terutama pada kawasan gambut (hotspot).
		d.	Masih terdapatnya lokasi rawan bencana terkait banjir, kebakaran, tanah longsor, dan angin puting beliung.
6.	Sosial		
		a.	Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Sosial.
		b.	Banyaknya bantuan sosial belum tepat sasaran antara lain disebabkan karena Basis Data Terpadu (BDT) belum terupdate secara berkelanjutan.
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1.	Tenaga Kerja		
		a.	Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi sebesar 5,83% dan tingginya persentase pekerja tidak penuh (penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu) sebesar 40,01%.
		b.	Tingginya Pengangguran Terdidik (lulusan SMA/SMK dan S1) dimana pencari kerja terdidik cenderung memilih milih pekerjaan khususnya sektor formal saja, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi sebesar 13,44%.
		c.	Belum terlindungnya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminya hak dan kewajiban pekerja.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		a.	Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat dari pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,27% (urutan ke-11 dari 34 provinsi) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 73,88% (masih di bawah nasional).
3.	Pangan		
		a.	Kecamatan rawan pangan masih cukup tinggi.
		b.	Arus supply demand hasil ternak (daging, susu dan telur) masih berfluktuasi.
4.	Pertanahan		
		a.	Masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak 31.641.751 bidang tanah yang jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar sebesar 658.943 bidang tanah.
		b.	Masih adanya konflik lahan yang belum diselesaikan, dimana jumlah konflik pertanahan masih sebanyak 68 kasus yang terjadi di 15 kabupaten/kota sebanyak 66 kasus dan 2 kasus di Provinsi Sumatera Selatan.

5.	Lingkungan Hidup		
		a.	Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 masih masuk di dalam kategori kurang yaitu berkisar antara 61,62 sampai dengan 69,70. IKLH pada Tahun 2021 sebesar 69,70.
		b.	Masih meningkatnya emisi gas rumah kaca di 4 sektor meliputi Lahan dan Gambut, Pertanian dan Peternakan, Energi dan Transportasi dan Limbah.
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		a.	Persentase penerbitan e-KTP di kabupaten/kota belum 100%.
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		a.	Masih terdapat desa di Sumatera Selatan yang masuk ke kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		a.	Capaian Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan kontrasepsi KB mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 78,83%.
		b.	Masih banyaknya PUS yang be-KB-nya tidak penuhi (unmet need).
9.	Perhubungan		
		a.	Terjadinya pendangkalan alur sungai sebagai dampak sedimentasi.
		b.	Belum menurunnya angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan.
		c.	Belum optimalnya fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Regional Tanjung Api-Api.
		d.	Belum optimalnya Fungsi Layanan Kereta Api mahasiswa Unsri di Indralaya.
		e.	Belum optimalnya penumpang menggunakan layanan angkutan umum Light Rail Transit (LRT) Palembang.
10.	Komunikasi dan Informasi		
		a.	Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi dan informatika yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai ke pelosok desa yang ada di wilayah Sumatera Selatan.
		b.	Kurangnya dukungan SDM IT.
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		a.	Rendahnya pertumbuhan modal koperasi.
		b.	Persentase pertumbuhan UMKM masih rendah.
12.	Penanaman Modal		
		a.	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum tersusun.
		b.	Pelayanan PTSP (5 hari) masih dibawah target nasional (3 hari).
13.	Kepemudaan dan Olahraga		
		a.	Peringkat Sumsel pada PON 2016 berada di posisi 21.
		b.	Jumlah pelatih yang bersertifikat masih rendah.
		c.	Jumlah dan kualitas pembinaan cabang masih rendah.
		d.	Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah.
14.	Statistik		
		a.	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sebagai sumber dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.
		b.	Kurangnya SDM urusan statistik yang handal.
15.	Persandian		
		a.	Kurangnya SDM urusan persandian yang handal.
		b.	Belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai.
16.	Kebudayaan		
		a.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersertifikasi secara nasional masih rendah.
17.	Perpustakaan		
		a.	Budaya baca masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2021 berada di kategori sedang yaitu 52,38%, masih dibawah nasional yang sebesar 55,74%.
		b.	Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak belum memenuhi standart nasional perpustakaan.

18.	Kearsipan	a.	Gedung tempat penyimpanan arsip yang belum standar nasional.
		b.	Minimnya tenaga SDM kearsipan yang terlatih dalam pengelolaan arsip.
		c.	Kurangnya sarana dan prasarana obat-obatan untuk pengamanan arsip.
III	Urusan Pemerintah Pilihan		
1.	Kelautan dan Perikanan		
		a.	Masih rendahnya konsumsi ikan/perkapita/tahun Sumsel.
		b.	Kebutuhan bejur udang dan nener bandeng untuk budidaya perikanan payau semuanya didatangkan dari luar luar Provinsi Sumatera Selatan.
		c.	Rendahnya volume ekspor produk kelautan dan perikanan.
		d.	Terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan zona ruang laut.
		e.	Tingginya Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan.
2.	Pariwisata		
		a.	Menuurnnya kunjungan wisman maupun wisma secara signifikan.
3.	Pertanian		
		a.	Share PDRB ADHB sektor pertanian yang merupakan sektor utama (menyerap tenaga kerja terbesar) trennya cenderung turun dari tahun ke tahun.
		b.	Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditi tanaman pangan ke non pertanian.
		c.	Produktivitas padi dan kedelai masih dibawah rata-rata angka nasional.
		d.	Produktivitas Hortikultura untuk komoditi-komoditi utama nasional dan unggulan daerah rata-rata masih dibawah angka nasional.
		e.	Belum optimalnya Produktivitas Perkebunan Rakyat.
		f.	Tanaman perkebunan yang banyak memasuki fase tua sehingga perlu diremajakan.
		g.	Kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasangan Bokar belum terbentuknya di setiap desa.
		h.	Rendahnya harga komoditas di tingkat petani.
4.	Kehutanan		
		a.	Luas penanaman per tahun tidak sebanding dengan jumlah lahan kritis yang ada, persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis baru 0,16%.
		b.	Belum optimalnya fungsi kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan sehingga rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati masih kurang.
		c.	Adanya konflik/permasalahan lahan dan permukiman masyarakat dalam kawasan hutan, luasan penyelesaian konflik lahan dan permukiman dalam kawasan hutan yang masih rendah.
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral		
		a.	Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
		b.	Belum maksimalnya pengelolaan pertambangan minerba. Nilai PNBP pertambangan yang masih rendah.
		c.	Belum maksimalnya penerimaan daerah sektor ESDM, baik dari Nilai PNBP minyak bumi maupun PNBP gas bumi.
6.	Perdagangan		
		a.	Masih rendahnya persentase pertumbuhan ekspor.
7.	Perindustrian		
		a.	Masih rendahnya laju pertumbuhan hilirisasi berbasis komoditi unggulan.
8.	Transmigrasi		
		a.	Masih adanya sengketa pertanahan dan legalitas di kawasan transmigrasi.
		b.	Kurangnya infrastruktur jalan, fasilitas umum dan permukiman di kawasan transmigrasi.
IV	Urusan Penunjang Pemerintah		
1.	Perencanaan Pembangunan		
		a.	Belum optimalnya penggunaan aplikasi sistem perencanaan dengan sistem penganggaran.
		b.	Belum optimalnya sinerhi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota) dan non pemerintah

			(KPBU, CSR, dll).
2.	Keuangan		
		a.	Nilai kemandirian keuangan daerah terus mengalami penurunan walaupun masih diatas 50%.
		b.	Belum optimalnya penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		
		a.	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan masih sebesar 60%.
4.	Pengawasan		
		a.	Masih rendahnya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu masih berpredikat BB.
5.	Penelitian dan Pengembangan		
		a.	Hasil Penelitian masih belum dimanfaatkan dengan optimal.

Sistematika Pelaporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Kewenangan tugas pokok dan struktur organisasi, Keterkaitan antara Isu Penting dan Masalah Mendesak Arah Kebijakan Pembangunan 2024 serta Sistematika Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang RPD 2024-2026, visi dan misi, tujuan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemrintah Provinsi Sumatera Selatan, Akuntabilitas Keuangan dan Analisis efisiensi.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 tahun. Rencana Pembangunan Daerah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan kendala (*Threat*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi strategis instansi pemerintah.

Rencana Pembangunan Daerah yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan. Rencana Pembangunan Daerah bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta Pelaporan Kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023.

2.1 Visi

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang menyusun RPD 2024-2026. Dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan memuat **tujuan dan sasaran**, di mana **tujuan** harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Provinsi Sumatera Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai tahun 2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 adalah :

“SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025”

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi.

Sumatera Selatan. Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unggul. Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah.

Terdepan. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain.

2.2 Misi

Misi merupakan tonggak dari perencanaan daerah dalam mewujudkan cita-cita dalam visi yang diinginkan. Adapun misi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Menjadikan Sumatera Selatan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Regional.

Misi 2 : Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan.

Misi 3 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan,

2.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJPD 2005 – 2025, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan;
3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan;

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 menjadi *starting point* bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tahap I RPD, pembangunan tahun 2024 ini memiliki fokus pembangunan pada pembangunan ekonomi masyarakat yang didukung dengan Reformasi Birokrasi. RPD Sumatera Selatan 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023, menjadi pedoman bagi seluruh Pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan. RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024 - 2026 menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”**. Pemilihan tema tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 sesuai RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu **“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”**. Arah Kebijakan Pembangunan tersebut perlu dijabarkan menjadi tema dan prioritas pembangunan pada Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2024 yaitu (1). Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3). Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4). Penguatan daya saing usaha, (5). Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7). Percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8). Pelaksanaan pemilu. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah memuat rencana kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2024 dilengkapi dengan indikator keberhasilan berserta dengan targetnya yang kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2024**. Jumlah Program Utama yang mendukung sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sebanyak 172 program. Total APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2024 Rp.10.501.712.113.782,00 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.186.965.120.000,00. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membuat perjanjian kinerja periode Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 93/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74
		1.2	Pendapatan per Kapita /PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	71,67
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,00
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,097
2.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,11
3.	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	10,95
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0,324
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14
7.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,63
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,94
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70
		7.4	Prevalensi Stunting	%	14,3
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04
		8.3	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,53
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,55
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A

BAB III

AKUNTABILITAS

A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024 s.d 2026. Perkembangan capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun kelima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2026

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian 2024	Target Terhadap 2026	% Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi							
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,07	87,41	6,25	81,12
2.	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp/Kapita	71,67	75,13	104,83	75,00	100,17
3.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,00	6,31	105,17	6,03	104,64
4.	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,097	2,331	111,16	2,083	111,91
Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan							
1.	Nilai Tukar Petani	%	109,11	120,83	110,74	110,00	109,85
Meningkatnya Ekosistem Inovasi							
1.	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72	3,38	124,26	2,74	123,36
Terkendali Laju Inflasi Daerah							
1.	Tingkat Infansi Daerah	%	2,5±1	1,20	100	3±1	100
Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan							
1.	Tingkat Kemiskinan	%	10,95	10,51	104,02	10,58	100,66
2.	Gini Ratio	Indeks	0,324	0,331	102,16	0,308	107,47
Menurunnya Tingkat Pengangguran							
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,86	106,76	3,75	97,07
Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan							
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,63	73,84	103,09	72,29	102,14
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,94	93,25	99,27	95,53	97,61
3.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70	54	77,14	75	72,00
4.	Prevalensi Stunting	%	14,3	1,20	191,61	12,2	190,16
Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan menurunkan Risiko Bencana							
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93	72,69	101,06	72,01	100,94
2.	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04	20,20	251,24	9,29	217,44
3.	Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	136,53	131,24	103,87	135,50	103,14
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan							
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5(B)	69,14	102,43	71 (BB)	97,38
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah							
1.	Nilai SAKIP	Nilai	80,55	77,53	96,25	81,21	110,74
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	89,99	110,74	A	110,74

Keterangan :

Warna Ungu	: persentase Capaian > 100%
Warna Kuning	: persentase Capaian > 75% - 100%
Warna Biru	: persentase Capaian > 50% - 75%
Warna Coklat	: persentase Capaian ≤ 50%
Warna Hijau	: Capaian tidak terealisasi (0%)

B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 11 Sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 4 (Empat) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

1

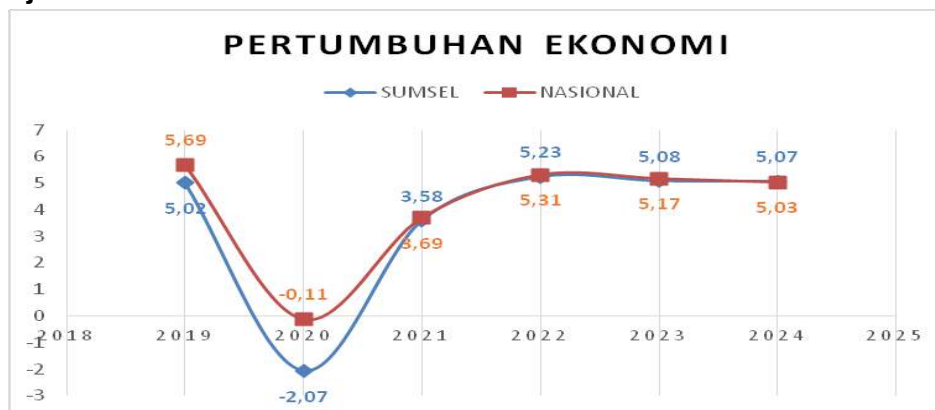
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,07	87,41
1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp/Kapita	71,67	75,13	104,83
1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,00	6,31	105,17
1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,097	2,331	111,16

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi adalah sebagai berikut :

1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan dengan tahun 2023 serta mengalami sedikit berkontraksi jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 dimana saat itu Sumatera Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pasca pandemi covid-19. Sumatera Selatan telah melakukan upaya dalam rangka meingkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sedikit mengalami kontraksi di tahun 2024, namun Sumatera Selatan tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi daerah tetap stabil. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2024 didominasi oleh **Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan** yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 60,02%. Kontribusi Sumatera Selatan terhadap PDRB Pulau Sumatera Selatan 13,63%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 5,03%, **tertinggi** di Pulau Sumatera bersama dengan Sumatera Utara. Ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 dibanding tahun 2023 tumbuh sebesar 5,07% sudah melampaui standar nasional 5,03% dengan pertumbuhan ekonomi yang solid.



Realisasi laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun 2019 s.d 2024 mengalami peningkatan dan penurunan pertumbuhan laju ekonomi bisa dilihat pada grafik disamping pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -2,07%

hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia terutama sumatera selatan pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Melihat kontraksi pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun harus didukung penuh oleh Pemerintah Daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat Pandemi



terjadi. Pemerintah Daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD. Pada tahun 2021 s.d 2024 pasca mengalami pandemi Provinsi Sumatera Selatan kembali bangkit dan mengalami pertumbuhan yang stabil dan meningkat baik dari sisi kesejahteraan masyarakat dengan penurunan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, sektor manufaktur dengan industri hilirisasi seperti pengolahan logam dasar dan galian non logam juga tumbuh tinggi, sektor perdagangan, konsumsi masyarakat yang kuat, serta pengeluaran rumah tangga yang terjaga dan investasi meningkat.

Laju pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 terealisasi sebesar 5,07% masih jauh dengan target tahun 2026 sebesar 6,25 diharap bisa memenuhi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, dari sisi pengeluaran dapat mencapai target RPD yang telah ditentukan pada tahun tersebut dengan menurunkan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri rumah tangga.

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 1,85% sepanjang tahun 2024. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Sementara dari sisi Pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami tertinggi sebesar 4,20%, dari sisi produksi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,39%, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 2,76% serta dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi sumatera selatan terutama bersumber dari ekspor luar negeri sebesar 3,92%. Angka pertumbuhan ekonomi sumatera selatan tahun 2024 tumbuh stabil atau dalam rentan per triwulan. Selain menjadi capaian yang tertinggi di Pulau Sumatera, angka tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,94% pada kuartal yang sama. Sepanjang tahun 2024, kinerja ekonomi Sumatera Selatan didukung oleh permintaan domestik dan impor yang cenderung meningkat sehingga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi.

Efisiensi penggunaan sumber daya sangat krusial untuk laju pertumbuhan ekonomi. Alokasi sumber daya yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan dan menghambat pertumbuhan, sementara efisiensi yang baik memicu inovasi, produktivitas, dan peningkatan daya saing.

□ **Pentingnya Efisiensi:**

- **Alokasi Sumber Daya:** Efisiensi berarti menggunakan sumber daya (tenaga kerja, modal, teknologi, dll) dengan cara yang paling optimal untuk menghasilkan output maksimum.

- **Pemborosan:** Alokasi sumber daya yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan, yang berarti sumber daya digunakan tanpa menghasilkan output yang memadai.
- **Pertumbuhan Ekonomi:** Efisiensi yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk menghasilkan lebih banyak.

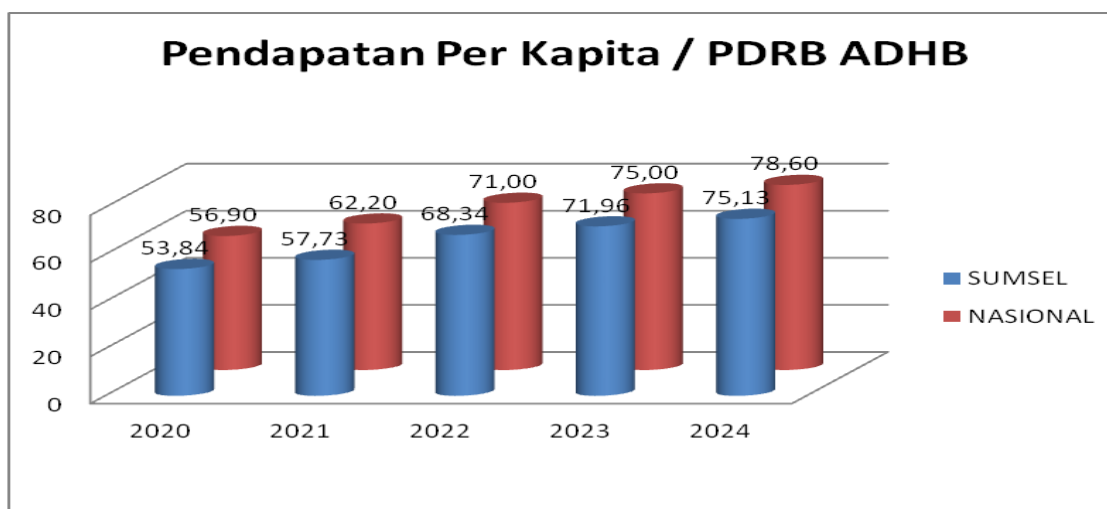
□ **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi:**

- **Infrastruktur:** Infrastruktur yang baik (transportasi, energi, telekomunikasi) sangat penting untuk efisiensi karena memfasilitasi mobilitas sumber daya dan aktivitas ekonomi.
- **Kualitas Sumber Daya Manusia:** Tenaga kerja yang terampil dan produktif adalah kunci untuk efisiensi, karena mereka dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik.
- **Inovasi dan Teknologi:** Inovasi dan adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya.
- **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang mendukung efisiensi (misalnya, deregulasi, pengurangan pajak, investasi infrastruktur) dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

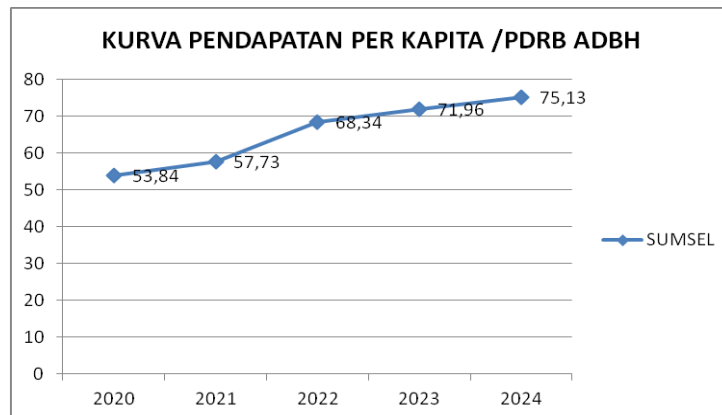
Salah satu upaya yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu mendorong sejumlah lapangan usaha seperti pertambangan dan penggalian dalam sektor produksi dan ekspor batubara. Tidak hanya itu, Sumatera Selatan juga berupaya mendorong pengembangan dan peningkatan sektor hilirisasi sehingga Sumatera Selatan dapat lebih meningkatkan *value* dari produk yang dihasilkan oleh lapangan usaha di Sumatera Selatan. Tidak hanya pada sektor pertambangan, Sumatera Selatan juga terus mendorong dan mengembangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ada di Sumatera Selatan. Dimana Sumatera Selatan sedang berupaya untuk mensukseskan Gerakan SUMSEL Mandiri Pangan (GSMP) demi kesejahteraan seluruh rakyat Sumatera Selatan. Program yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi yaitu program dari BPS Sumatera Selatan untuk menunjang keberhasilan dari laju pertumbuhan ekonomi sehingga menunjang capaian indikator tersebut.

1.2 Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB



Grafik 1.2 Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB

Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar Rp. 75,13 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp. 71,96 Juta. Jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 78,60 Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai target nasional. PDRB per kapita Sumatera Selatan pada tahun 2020-2024 ini masih lebih rendah dari capaian nasional.



Dari grafik disamping capaian Pendapatan per Kapita/ PDRB ADHB dari tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 75,13 juta. Bila dilihat dari grafik disamping menunjukkan tren peningkatan meskipun ada fluktuasi karena berbagai faktor,

termasuk pandemi COVID-19, peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi yang stabil dan potensi sumber daya alam seperti batubara, gas alam dan minyak bumi. Dari grafik diatas juga dapat dilihat realisasi Pendapatan Per Kapita /PDRB ADHB per Kapita tahun 2024 sebesar Rp. 75,13 juta dan telah berhasil melebihi target yang ditentukan untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 71,67 juta. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB Pulau Sumatera pada tahun 2024 memberikan kontribusi terhadap perekonomian pulau Sumatera Selatan 13,63% dengan pertumbuhan 5,03%, sama hal tahun sebelumnya memberikan kontribusi yang positif sehingga selalu mengalami tren peningkatan. Sumatera Selatan kedepannya tetap berupaya meningkatkan dan mendorong sektor ekonomi



kerakyatan dengan membuka lapangan pekerjaan melalui UMKM Mandiri, Lapangan Usaha dan lebih menggali potensi dari masing-masing wilayah sehingga PDRB per kapita dapat terus meningkat dan berdampak positif pada daerah di masa mendatang.

Peningkatan Pendapatan per Kapita/ PDRB ADHB di Sumatera Selatan dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pertambangan (khususnya batu bara), pertanian, dan industri, serta peningkatan investasi dan pertumbuhan penduduk.

Berikut adalah beberapa faktor yang lebih detail:

- **Pertambangan:**

Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sektor pertambangan ini berkontribusi signifikan terhadap PDRB dan pendapatan perkapita.

- **Pertanian:**

Sumatera Selatan juga merupakan daerah penghasil komoditas pertanian penting, seperti kelapa sawit dan karet. Pertanian yang produktif juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan perkapita.

- **Industri:**

Peningkatan aktivitas industri, baik industri pengolahan maupun industri lainnya, juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

- **Investasi:**

Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan perkapita.

- **Pertumbuhan Penduduk:**

Pertumbuhan penduduk yang terkendali dan berkualitas juga dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan produktivitas, yang juga berdampak pada peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita.

- **Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH):**

DAU dan DBH yang dialokasikan ke pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

- **Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN):**

PMA dan PMDN juga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan PDRB dan pendapatan perkapita.

- **Pengeluaran Pemerintah Daerah:**

Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita.

□ **Pentingnya Efisiensi:**

- **Alokasi Sumber Daya:** Efisiensi berarti menggunakan sumber daya (tenaga kerja, modal, teknologi, dll) dengan cara yang paling optimal untuk menghasilkan output maksimum.
- **Pemborosan:** Alokasi sumber daya yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan, yang berarti sumber daya digunakan tanpa menghasilkan output yang memadai.
- **Pertumbuhan Ekonomi:** Efisiensi yang baik mendorong pendapatan per kapita yang berkelanjutan, karena memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk menghasilkan lebih banyak.

□ **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi:**

- **Infrastruktur:** Infrastruktur yang baik (transportasi, energi, telekomunikasi) sangat penting untuk efisiensi karena memfasilitasi mobilitas sumber daya dan aktivitas ekonomi.
- **Kualitas Sumber Daya Manusia:** Tenaga kerja yang terampil dan produktif adalah kunci untuk efisiensi, karena mereka dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik.
- **Inovasi dan Teknologi:** Inovasi dan adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya.
- **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang mendukung efisiensi (misalnya, deregulasi, pengurangan pajak, investasi infrastruktur) dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendapatan per kapita /PDRB ADHB.

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah fondasi penting untuk pendapatan per kapita /PDRB ADHB yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi dan pendapatan per kapita /PDRB ADHB yang inklusif.

Program yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi yaitu program dari BPS Sumatera Selatan untuk menunjang keberhasilan dari pendapatan per kapita /PDRB ADHB sehingga menunjang capaian indikator tersebut.

1.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif



Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,31 sudah melampaui target yang telah ditentukan 6,00. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Selatan ini masih lebih rendah dari capaian nasional.

Pada tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Selatan menargetkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebesar 6,54%. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang melibatkan seluruh warga negara dan komponen bangsa. Dampak dari pembangunan ekonomi inklusif adalah: Mengurangi kemiskinan, Mengurangi ketimpangan, Perubahan struktural, Pertumbuhan ekonomi dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,67 angka indeks pada tahun 2020 menjadi 6,13 angka indeks pada tahun 2021. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai IPEI di Sumatera Selatan:

- **Peningkatan IPEI:**

Angka IPEI di Sumatera Selatan mengalami peningkatan, menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

- **Rata-rata Peningkatan:**

Rata-rata peningkatan IPEI di Sumatera Selatan adalah sebesar 5,67 angka indeks pada tahun 2020 menjadi 6,13 angka indeks pada tahun 2021.

- **Target RPJMN 2020-2024:**

Hampir seluruh indikator IPEI telah dimuat dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, dengan target pertumbuhan IPEI sebesar 6,54% pada tahun 2024.

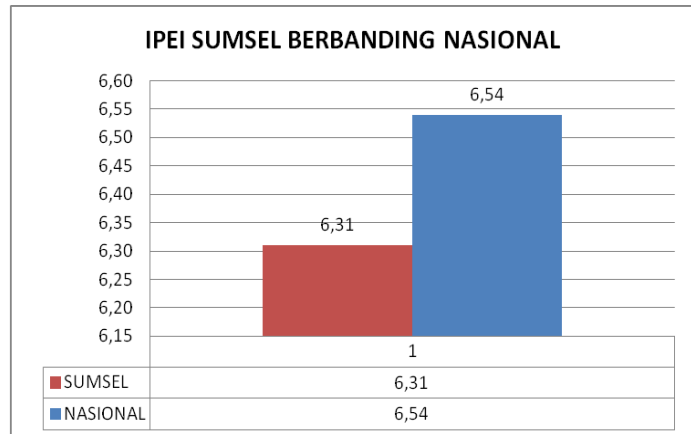
- **Perekonomian Sumsel 2023:**

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai 5,08%, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,23%.

- **Tingkat Kemiskinan:**

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami tren perbaikan dari tahun ke tahun, dengan angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 11,78%, turun dari September 2023 yang sebesar 11,95%.

Dari grafik disamping perbandingan IPEI Sumatera Selatan berbanding Nasional belum melebihi dari standar nasional masih melaju lambat sebesar 0,23. Hal ini terjadi karena masyarakat Sumatera Selatan sudah mengalami peningkatan pada sisi pendapatan, perekonomian baik dari sisi pertambangan, perdagangan di tahun tersebut. Sumatera Selatan



kedepannya tetap berupaya meningkatkan dan mendorong sektor ekonomi kerakyatan dengan membuka lapangan pekerjaan melalui UMKM Mandiri, Lapangan Usaha dan lebih menggali potensi dari masing-masing wilayah sehingga Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dapat terus meningkat dan berdampak positif pada daerah di masa mendatang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Sumatera Selatan fokus pada penciptaan lapangan kerja, jaring pengaman sosial, peningkatan pelayanan publik, dan dukungan terhadap UMKM, dengan tujuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih rinci, upaya tersebut mencakup:

- **Penciptaan Lapangan Kerja Produktif:**

Pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja yang produktif dan menguntungkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

- **Jaring Pengaman Sosial:**

Penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan.

- **Peningkatan Pelayanan Publik Dasar:**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, untuk memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

- **Dukungan UMKM:**

Memberikan dukungan yang kuat terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan pasar.

- **Pemerataan Ekonomi:**

Melakukan kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi, seperti menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan ketimpangan kekayaan.

- **Penguatan Industri Berbasis Rakyat:**

Memperkuat industri yang berbasis rakyat untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja.

- **Meningkatkan Akses Keuangan:**

Memastikan akses keuangan yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kaum miskin, pekerja informal, perempuan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

- **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

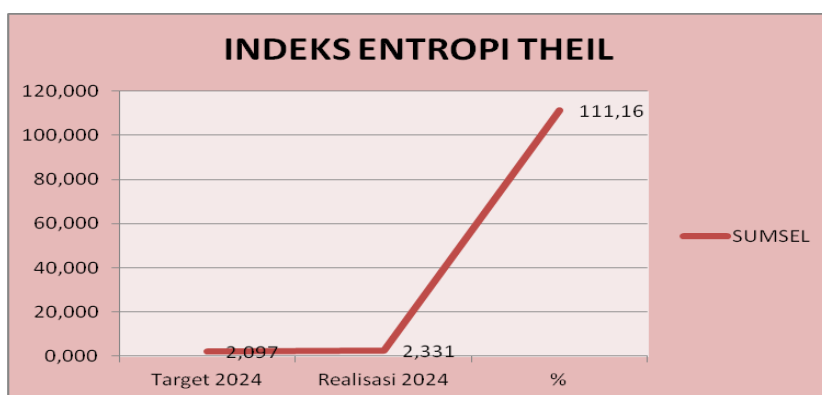
- **Infrastruktur yang Mendukung:**

Membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah fondasi penting untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang inklusif.

Program yang menunjang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yaitu program dari BPS Sumatera Selatan untuk menunjang keberhasilan dari Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sehingga menunjang capaian indikator tersebut.

1.4 Indeks Entropi Theil



Grafik 1.4 Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditentukan sebesar 2,331 (111,16%) dari target Provinsi Sumatera Selatan 2,097. Indeks

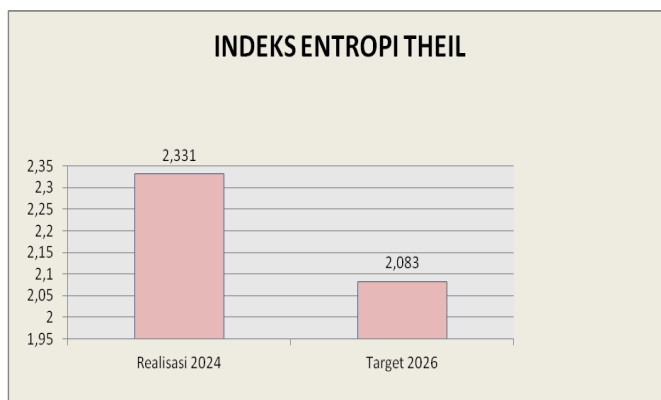
Entropi Theil salah satu metode mengukur ketimpangan ekonomi

antar wilayah, termasuk di Sumatera Selatan, Indeks Entropi Theil digunakan untuk



menganalisis tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah, mengidentifikasi wilayah dengan kesenjangan ekonomi tertinggi dan terendah, serta mengukur ketimpangan antar wilayah di Sumatera Selatan. Dari hasil perhitungan indeks ini, dapat kita lihat bahwa ketimpangan Provinsi Sumatera Selatan, jika dilihat pada tahun 2022 hingga 2024 cukup mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2022 Indeks Entropi Theil Intra Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,003, kemudian sedikit menurun menjadi 0,992 di tahun 2023 dan mengalami peningkatan tahun 2024 sebesar 2,331 Artinya dalam rentang tahun 2022-2024 terjadi peningkatan Indeks Theil Intra Wilayah sebesar 1,339 poin.

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, terlihat bahwa pada tahun 2024 Indeks Entropi Theil Intra Wilayah di Kabupaten Muara Enim memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,984. Angka Indeks Entropi Theil Intra Wilayah Kabupaten Muara Enim ini menurun dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 4,126. Ini artinya telah terjadi penurunan pada ketimpangan pemerataan di Kabupaten Muara Enim selama periode waktu satu tahun tersebut. Selanjutnya di posisi kedua dan ketiga pada tahun 2024 ditempati oleh Kabupaten Musi Banyuasin (2,553) dan Kota Palembang (1,418). Sebaliknya pemerataan yang cukup baik terjadi di Kecamatan Empat Lawang, dimana nilai Indeks Entropi Theilnya di tahun 2024 hanya sebesar 0,205. Apabila kita melihat Indeks Entropi Theil Inter Wilayah, maka hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil yang kita peroleh pada Indeks Entropi Theil Intra Wilayah, yaitu ketimpangan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,054 poin, dari 1,392 di tahun 2022 menjadi 1,339 di tahun 2023. Sementara jika dilihat per kabupaten/kota, tidak berbeda jauh dengan hasil penghitungan Indeks Entropi Theil Antar Wilayah, Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 merupakan kabupaten yang memiliki ketimpangan paling besar dibandingkan dengan wilayah lainnya, dimana nilai Indeks Entropi Theil Inter Wilayahnya di tahun 2024 sebesar 10,244. Posisi kedua dan ketiga berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Musi Banyuasin (4,671) dan Kota Palembang (2,224). Sebaliknya, tingkat ketimpangan terendah berada di Kabupaten Empat Lawang dengan nilai Indeks Entropi Theil Inter Wilayahnya sebesar 0,052. Indeks Entropi Theil dapat disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2022, 2023 serta peningkatan tahun 2024, dan ketimpangan di wilayah masih berada pada level tinggi. Adapun beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap besarnya nilai Indeks Entropi Theil antara lain karena sumber daya alam, kondisi kependudukan, serta pengaruh mobilitas barang dan jasa.



Dari grafik disamping Indeks Entropi Theil tahun 2024 sebesar 2,331 sudah melampaui target tahun 2026 sebesar 2,083. Hal ini karena tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara Kabupaten/Kota dengan melihat dari

berbagai sektor yang diunggulkan, harapan kedepan realisasi pada tahun 2026 akan lebih meningkat dan melebihi dari standar indikator yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus tetap mengambil kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya peningkatan infrastruktur agar lebih muda terjadi sinergi antar wilayah dalam segala hal terutama dalam hal perekonomian, melakukan upaya pemasaran potensi ekonomi unggulan atau sosialisasi melalui berbagai media sosial sesuai dengan tren perilaku masyarakat terkini (masyarakat millennial) untuk menarik investor yang dituangkan dalam visi/slogan daerah, Perlu dipetakan potensi/unggulan setiap wilayah dan lebih fokus memilih satu atau dua komoditas yang perlu dibina dan ditingkatkan produksi serta pemasarannya mulai dari hulu ke hilir agar mendapat nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah fondasi penting untuk Indeks Entropi Theil yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi Indeks Entropi Theil yang inklusif.

Program yang menunjang Indeks Entropi Theil yaitu program dari BPS Sumatera Selatan untuk menunjang keberhasilan dari Indeks Entropi Theil sehingga menunjang capaian indikator tersebut.

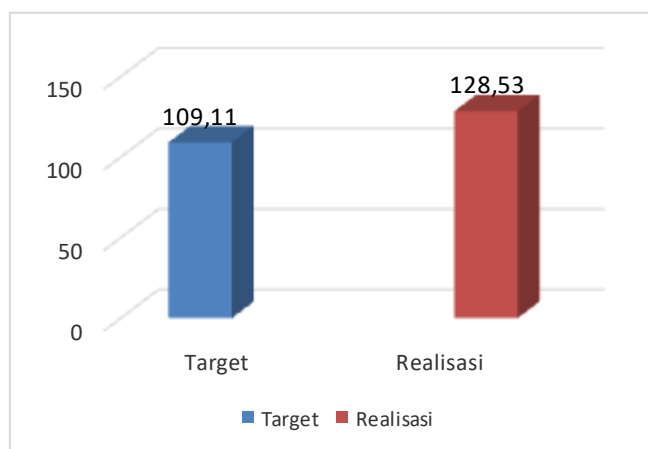
2 Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,11	120,83	110,74

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan adalah sebagai berikut :

2.1 Nilai Tukar Petani



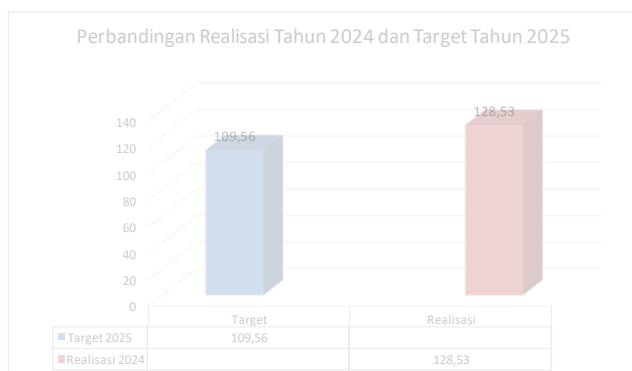
Grafik 1.5 Nilai Tukar Petani Tahun 2024

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/ jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di daerah perdesaan. NTP juga menunjukkan daya

tukar (*termtrade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian NTP Tahun 2024 sudah melebihi target RPD tahun 2024. **Kondisi ini sangat menguntungkan bagi petani. Hal ini berkat kerja keras dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan beserta instansi dan stakeholder terkait dalam meningkatkan kesejahteraan petani.**

Sama halnya dengan capaian PDRB, program/kegiatan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak secara langsung mengarah kepada indikator pencapaian kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) karena lebih kepada indikator kinerja utama (IKU) dinas berupa peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai kinerja NTP tidak hanya dilihat dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura karena terdapat sub sektor lain berupa sub sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan yang juga berpengaruh kepada capaian kinerja tersebut.



Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian NTP Tahun 2024 sudah melebihi target RPD tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani mengalami surplus karena pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi petani. Hal

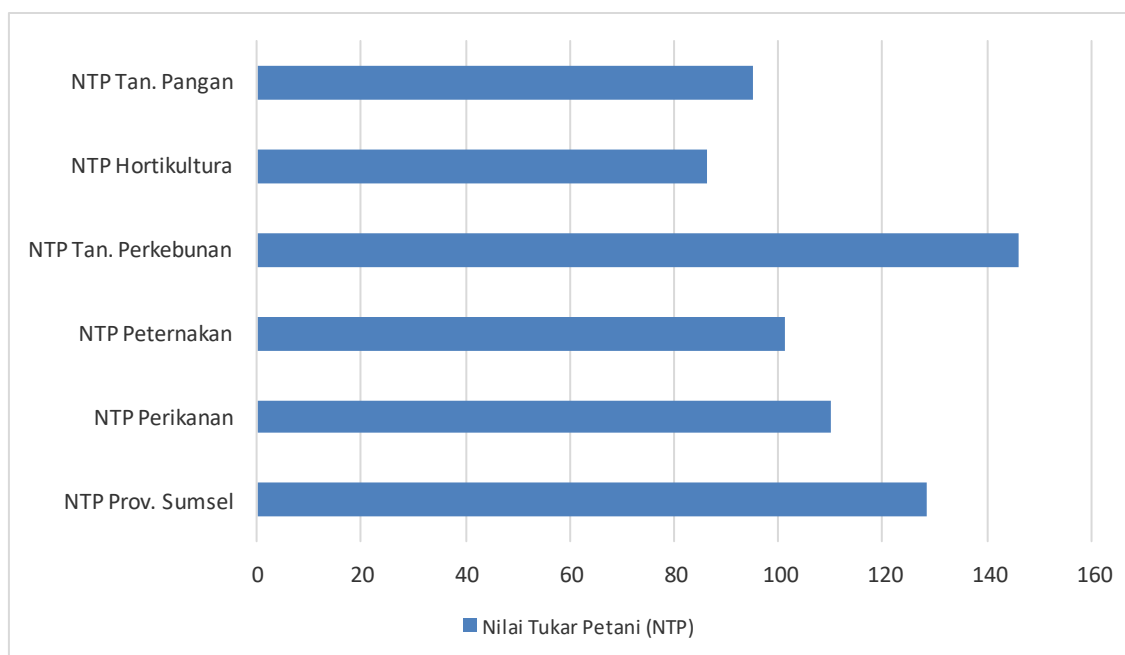


ini berkat kerja keras dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan beserta instansi dan stakeholder terkait dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu sebagian besar capaian produksi dan produktivitas petani tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan, terutama padi sehingga mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPD. Salah satu inovasi yang diprakarsai oleh Gubernur Sumatera Selatan Periode 2018-2023 yaitu rekrutmen Petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) sebanyak 1.000 orang pada tahun 2020, serta 400 orang petugas PPEP sebanyak 400 orang pada tahun 2021 menjadi salah satu pendorong dalam mengawal dan mendampingi petani/ kelompok tani untuk tetap mandiri dan berusaha tani dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah. Capaian pada urusan pertanian Provinsi Sumatera Selatan antara lain pada produksi padi, jagung, dan kedelai.

Indeks harga yang dibayar petani berupa indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

1. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

NTP yang diperoleh tersebut dipengaruhi oleh naik turunnya NTP dari berbagai sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya). Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1.6 Capaian NTP tahun 2024 (Jan-Des) dari berbagai Sub Sektor di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan capaian NTP yang digambarkan pada grafik, NTP Perkebunan Rakyat penyumbang angka NTP terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Sub sektor Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan mempunyai angka yang sudah melebihi target NTP berdasarkan RPJMD dan angka 100. Namun, untuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura masih memiliki angka NTP yang masih berada di bawah angka 100. Oleh karena Provinsi Sumatera Selatan hanya memiliki kewenangan untuk sub sektor tanaman pangan dan sub sektor hortikultura, maka yang dibahas kali ini terbatas hanya NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan NTP Sub Sektor Hortikultura.

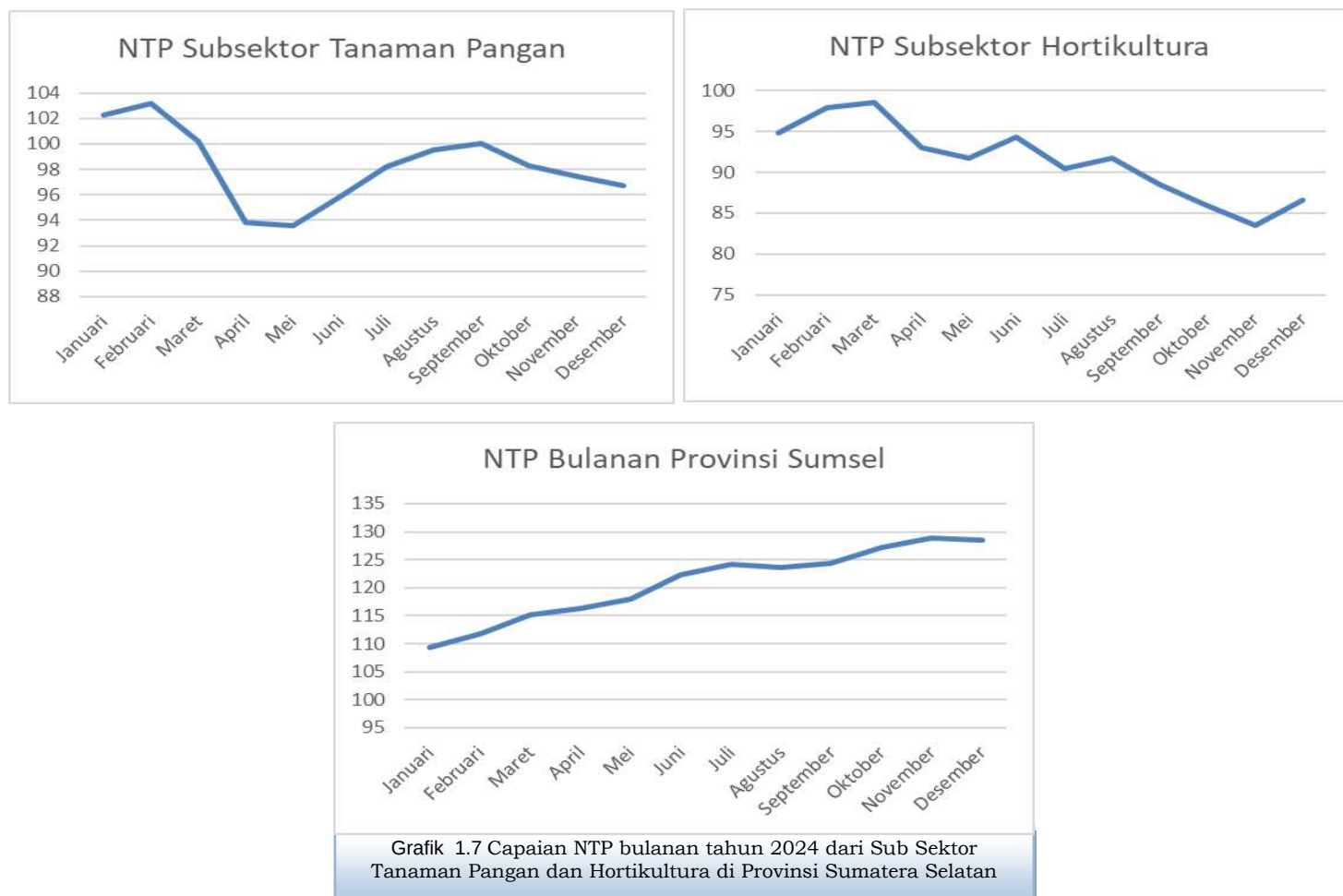
Berdasarkan capaian NTP pada GRAFIK di atas, Berdasarkan capaian NTP pada Gambar di atas, dimana capaian NTP Sub Sektor Tanaman Pangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar 98,26% dan Sub Sektor Hortikultura sebesar 91,42%. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani tanaman pangan dan hortikultura dimana petani belum mendapatkan keuntungan dari usahatani, dengan kata lain output yang dihasilkan dari usahatani lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi usahatani. Adapun sebaran NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura per bulannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Sebaran NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub Sektor	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata
Tanaman Pangan	102,31	103,21	100,21	93,84	93,59	95,78	98,19	99,50	100	98,29	97,45	96,74	98,26
Hortikultura	94,86	97,92	98,56	93,04	91,72	94,28	90,40	91,72	88,49	85,99	83,46	86,58	91,42

Tabel 3.4 Sebaran NTP Bulanan Provinsi Sumatera Selatan

Sub Sektor	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata
NTP	109,33	111,88	115,20	116,28	117,98	122,40	124,18	123,70	124,44	127,20	128,84	128,53	120,83



Tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa capaian NTP baik tanaman pangan maupun hortikultura berfluktuatif setiap bulannya. NTP untuk sub sektor tanaman pangan lebih besar dibandingkan dengan NTP sub sektor hortikultura. Hal ini menunjukkan bahwa petani usaha tani pangan lebih menguntungkan dibandingkan dengan usahatani hortikultura. Hal ini sejalan dengan Program Pemerintah untuk Swasebada Pangan.

NTP tanaman pangan mengalami penurunan terendah di bulan Mei, sedangkan nilai tertinggi di bulan Januari. Sedangkan sebaliknya, NTP hortikultura mengalami penurunan terendah di bulan Oktober dan nilai tertinggi di bulan Maret. Jika dibandingkan dengan NTP Total Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami penurunan terendah di bulan Januari dan nilai tertinggi di bulan November. Nilai yang dihasilkan ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani yang mengalami kenaikan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks yang dibayarkan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi

maupun biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Trend capaian NTP total berbanding terbalik dengan trend capaian NTP Tanaman Pangan di bulan Januari dan berbanding lurus di bulan Februari. Penurunan yang terjadi pada angka capaian NTP Tanaman Pangan disebabkan terjadinya penurunan rata-rata indeks harga pada kelompok padi dan palawija. Begitu juga dengan tanaman hortikultura. Penurunan NTP bisa juga terjadi pada saat panen raya karena adanya *over supply* produk pertanian.

Adapun upaya untuk meningkatkan NTP sehingga meningkat ditahun 2023 dan untuk kedepannya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura guna menunjang usaha tani tersebut melalui Program dan Kegiatan yang didanai oleh Dana APBD, meskipun tidak berpengaruh secara langsung kepada capaian PDRB dan NTP tahun 2024 yang belum mencapai target sehingga petani harus swadaya dalam berusaha tani dan tetap dalam pembinaan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan. Program/ kegiatan tersebut, antara lain :

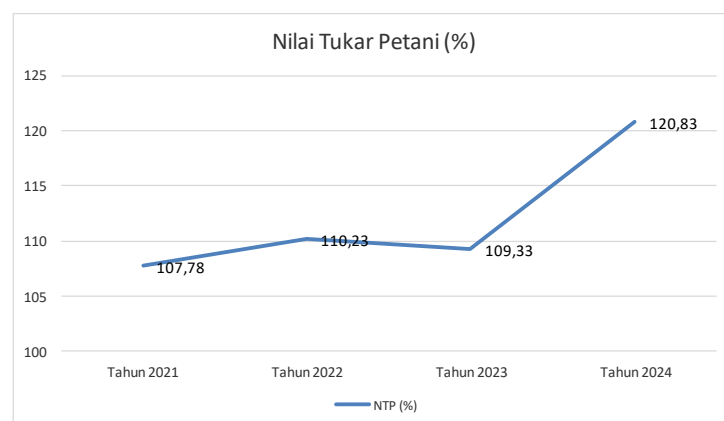
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Melalui Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian terkait penyediaan sarana produksi pengembangan tanaman padi untuk luasan 2.500 Ha terdiri dari 1.300 Ha Kabupaten OKI, 1.200 Ha Kabupaten OKUT berupa sarana produksi Benih Padi Label Biru sebanyak 72.070 Kg, Pupuk NPK sebanyak 250.000 Kg, Pupuk Hayati sebanyak 7.500 liter serta Pestisida 5.000 Kg di Kabupaten OKI dan OKUT dan penyediaan sarana produksi pengembangan tanaman sayuran berupa pengembangan tanaman Bawang Merah seluas 12 ha dan Cabai Merah seluas 17 ha di Kabupaten OKI dan Muara Enim serta Kota Palembang dan Lubuk Linggau.



2. Program Penyuluhan Pertanian

Melalui Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dengan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani melalui pemberdayaan dan fasilitasi tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) sebanyak 1.400 orang yang tersebar di 17 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik 1.8 Capaian NTP Tahun 2021-2024

Berdasarkan Grafik di samping, capaian NTP Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa persentase indeks harga yang diterima oleh petani dengan

indeks harga yang dibayar oleh petani mengalami peningkatan dari

Tahun 2021 sampai Tahun 2024. Petani di tahun 2024 mengalami keuntungan dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023. Capaian NTP dipengaruhi oleh fluktuasi capaian NTP pada berbagai sub sektor pendukung. Adapun NTP Tahun 2021 sampai Tahun 2024 per Sub Sektor dan persentase perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Nilai NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Hortikultura Bulan Januari sampai Desember Tahun 2021-2024(%)

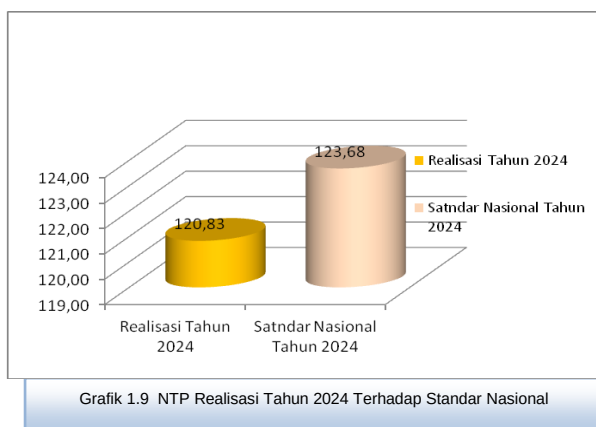
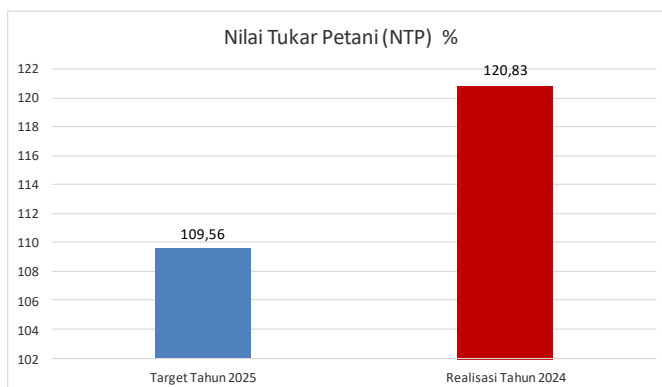
No	Sub Sektor	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	NTP Total (%)	107,78	110,23	109,33	128,53
2.	NTP Tanaman Pangan (%)	90,30	87,19	100,53	95,15
3.	NTP Hortikultura (%)	89,13	95,08	101,86	86,48
4.	NTP Perkebunan (%)	114,48	118,62	115,29	146,05
5.	NTP Peternakan (%)	102,93	104,92	99,45	101,36
6.	NTP Perikanan (%)	100,25	104,15	112,06	110,10

Tabel menunjukkan bahwa dari beberapa subsektor pembentuk capaian NTP tahun 2024, hanya NTP dari subsektor tanaman hortikultura yang mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan rata-rata indeks harga yang diterima petani tanaman hortikultura (buah dan sayuran) dibandingkan dengan indeks biaya konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi capaian NTP untuk sub sektor tanaman hortikultura ini berbanding terbalik dengan capaian laju pertumbuhan PDRB yang mengalami peningkatan. **Faktor penyebab pertumbuhan NTP atau kesejahteraan petani tidak sebanding dengan pertumbuhan PDRB**

disebabkan oleh meningkatkan semua biaya produksi pertanian, sementara harga komoditas dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan.

Capaian NTP di tahun 2024 sudah melampaui target yang akan dicapai di tahun 2025. Indikator kinerja NTP Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dari beberapa sub sektor sebagaimana dijelaskan di awal. Dari beberapa sub sektor, tanaman pangan dan hortikultura

merupakan 2 (dua) sub sektor yang berada di bawah standar yaitu 100. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik disamping menunjukkan perbandingan realisasi Nilai Tukar Petani tahun 2024 sebesar 120,83% sudah hampir mencapai standar nasional sebesar 123,68%. Hampir tercapainya capaian NTP di Provinsi Sumatera Selatan karena adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan *Stakeholder*

yang membantu.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator kinerja NTP Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dibandingkan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Hal ini dibentuk dari beberapa sub sektor sebagaimana dijelaskan di awal. Dari beberapa sub sektor, tanaman pangan dan hortikultura merupakan 2 (dua) sub sektor yang berada di bawah standar yaitu 100. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Capaian ini merupakan akumulasi efisiensi dan efektivitas sumber daya di Sumatera Selatan. Beberapa hal yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan antara lain: Peningkatan optimalisasi lahan berupa cetak sawah dari lahan marginal serta penggunaan irigasi pada lahan-lahan pertanian yang tepat guna sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan dan hortikultura. Disamping itu juga dengan pemberian bibit tanaman yang baik serta saprodi dan

mekanisasi yang baik dan modern. Selain itu juga peningkatan NTP ini didukung oleh program dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan 1 desa 1 penyuluh pertanian melalui Program Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) yang mampu mendukung petani didalam meningkatkan produksi pangan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus tetap mengambil kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan petani tanaman pangan dan hortikultura. Indeks harga yang diterima petani tersebut harus lebih besar daripada indeks harga yang harus dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani bisa dilihat dari adanya kepastian jaminan kestabilan atau peningkatan harga atas produksi yang dihasilkan oleh petani sehingga harga petani tidak anjlok. Indeks harga yang dibayarkan oleh petani bisa dilihat dari adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan produksi. Selain itu, adanya kestabilan harga atau subsidi harga dari faktor produksi yang digunakan oleh petani tersebut.

3 **Meningkatnya Ekosistem Inovasi**

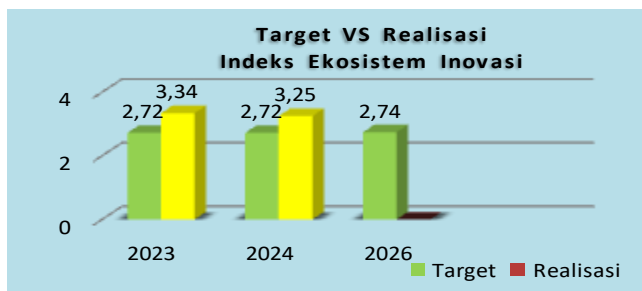
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72	3,38	124,26

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Ekosistem Inovasi adalah sebagai berikut :

3.1 Indeks Ekosistem Inovasi

Untuk mendukung tercapainya sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi** digunakan indikator Indeks Ekosistem Inovasi. Ekosistem Inovasi merupakan salah satu komponen dari pengukuran Indeks Data Saing Daerah yang terdiri dari 2 Pilar yaitu Pilar Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi. Jika dilihat dari Tufoksi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, maka nilai ekosistem Inovasi dapat diukur melalui Nilai Kapabilitas Inovasi, yang memuat indikator publikasi ilmiah, belanja riset, pengembangan klaster inovasi yang datanya bersumber dari BPS, KemenkumHAM. Dengan range pengukuran nilai ekosistem inovasi (kapabilitas Inovasi) yaitu 1-5 (Rendah - Tinggi).



Grafik 1.10 Indeks Ekosistem Inovasi Tahun 2023 s.d 2026

Tahun 2024 target capaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi dilihat dari pilar Kapabilitas Inovasi yaitu 2,72, sementara capaian realisasi yaitu 3,25, skors ini berdasarkan hasil pengukuran Indeks Daya Saing

Daerah oleh BRIN Tahun 2024. Jika dilihat dari angka realisasi capaian

indikator tersebut telah melebihi target sebesar 0,53 atau 19% dari target yang ditetapkan. Upaya pencapaian kinerja dari indikator Meningkatnya Ekosistem Inovasi didukung oleh 4 yaitu kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kabupaten/kota Tahun 2024, Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dan Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Faktor pendukung pencapaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi yaitu :

1. Tersedianya meta data yang menjadi dasar dalam pengukuran Indeks Ekosistem Inovasi.
2. Adanya pendampingan kepada OPD Kabupaten/Kota terkait instrument pengukuran Indeks Ekosistem Inovasi.

Jika dilihat dari grafik di atas bila dibandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja indikator Indeks Ekosistem Inovasi pilar Kapabilitas Inovasi di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,09 atau 2,7% dimana pada tahun 2023 capaian indikator indeks Inovasi sebesar 3,34 sementara di tahun 2024 sebesar 3,25. Penurunan capaian indikator tersebut terjadi di 2 indikator yaitu indikator *indeks keunggulan lembaga riset dan Aplikasi Merk Dagang*. Pada tahun 2023 skors indikator *indeks keunggulan lembaga riset* sebesar 3,72 sementara di Tahun 2024 turun menjadi 1,06, sementara skors indikator *Aplikasi Merk Dagang di tahun 2023* sebesar 4,02 sementara di tahun 2024 turun menjadi 3,91. Selain itu juga terdapat 5 kabupaten/kota yang mengalami penurunan skor ekosistem inovasi pilar Kapabilitas Inovasi, yaitu Kabupaten Muara Enim, Banyuasin, OKU Selatan dan Musi Rawas Utara, dan Palembang.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab

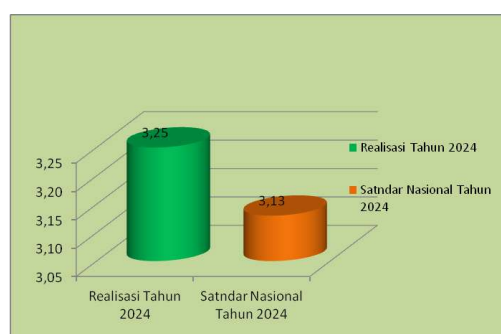
kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang



tercapai.

Sumber : Data diolah, Buku IDSD Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, (Kemenristekdikti dan Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Sementara berdasarkan data tabel di atas, jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, 2021, capaian indikator indeks Ekosistem pilar kapabilitas inovasi relatif sama dengan tahun 2024, hanya saja di tahun 2022 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pilar yaitu pilar Infrastruktur, pilar Keuangan dan pasar produk yang nilainya rendah, selain itu juga sejak tahun 2022 Penilaian Indeks Daya Saing Daerah yang semula dilakukan oleh Kemenristek Dikti, di Tahun 2022 dilakukan oleh BRIN, yang secara mekanisme pengambilan data untuk penilaian Ekosistem Inovasi untuk masing-masing pilar diambil dari data Kementrian/lembaga tidak lagi menggunakan data yang disampaikan oleh OPD-OPD Provinsi.



Capaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi Dan pada Tahun 2026, di akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) target Indeks Ekosistem Inovasi yang ditetapkan yaitu 2,74, sementara capaian di tahun 2024 telah melebihi target.

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi skor indeks ekosistem inovasi dalam pilar kapabilitas inovasi terhadap capaian nasional berada di atas angka Nasional, angka kapabilitas inovasi nasional mencapai 3,13 sementara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berada pada skor 3,25.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus tetap meningkatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat, mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap inovasi pemerintah daerah.

4

Terkendali Laju Inflasi Daerah

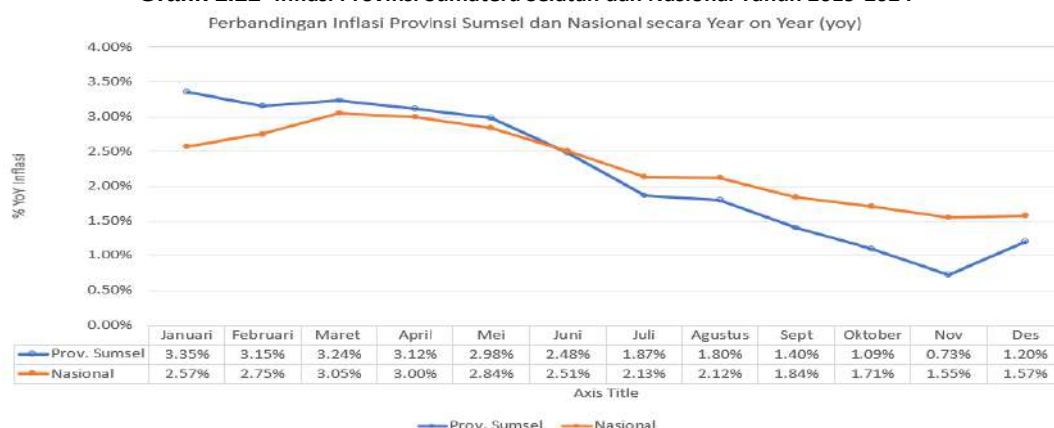
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1	1,20	100

Capaian indikator kinerja dari sasaran Terkendalinya Laju Inflasi Daerah adalah sebagai berikut :

4.1 Tingkat Inflasi Daerah

Grafik 1.11 Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2019-2024



Perkembangan angka inflasi Sumatera Selatan secara Year on Year (yoy) dari Bulan Januari s.d Desember 2024 mengalami penurunan. Tren yang sama juga terjadi di tingkat Nasional yaitu menurun, namun jika dilihat angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024 jauh lebih rendah dibandingkan angka inflasi Nasional, dimana angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember naik sebesar 1,20% secara yoy terhadap angka inflasi bulan November sebesar 0,73%. Meskipun demikian angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan tetap dibawah angka inflasi Nasional sebesar 1,57% secara yoy. Selain itu kalau dilihat dari laju penurunannya angka inflasi Sumatera Selatan lebih cepat dibandingkan nasional dari angka 3,35% yoy pada Bulan

Januari 2024 menjadi 1,20% yoy pada Bulan Desember 2024 sedangkan angka inflasi Nasional 2,57% yoy pada Bulan Januari 2024 menjadi 1,57% pada Bulan Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Selatan relatif terjaga dan stabil.



Tingkat Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan bisa dilihat dari grafik disamping masih mengalami tren penurunan setiap tahunnya hanya pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Inflasi terjadi akibat terjadinya kenaikan harga barang dan jasa

kebutuhan masyarakat di pasaran. Semakin tinggi tingkat kenaikan harga, maka semakin dalam juga terjadi inflasi. Dalam tiga tahun terakhir, kondisi inflasi. Dalam tiga tahun terakhir, kondisi inflasi di Indonesia sedikit banyak masih dipengaruhi oleh kondisi pandemik wabah COVID-19, yang membawa dampak negatif yang masih berlanjut di tahun 2021, bahkan muncul varian baru menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berkenaan dengan diberlakukan program vaksinasi dan adanya pelanggaran mobilitas penduduk membuat perekonomian masyarakat mulai menggeliat kembali, inflasi nasional dan sumatera selatan di tahun 2021 tercatat mengalami peningkatan, meskipun nilai masih rendah. Secara kumulatif inflasi sumatera selatan mengalami kenaikan dari 1,50% di tahun 2020 menjadi 1,84%. Inflasi yang cukup rendah ini dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat serta pasokan makanan yang memadai. Inflasi sumatera selatan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 3,17%, sementara besaran inflasi nasional lebih rendah yaitu 2,19%. Capaian inflasi *year-on-year* di Sumatera Selatan tahun 2023 cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi di tahun 2022, rentang inflasi juga semakin menuju rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3 persen $\pm$ 1 persen (*y-o-y*). Secara umum, inflasi *year-on-year* di tahun 2023 terutama masih didorong oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau. Komoditas yang menyebabkan inflasi pada kelompok ini adalah komoditas beras, cabai merah, dan rokok kretek filter. Selain itu, kenaikan harga pada kelompok pengeluaran untuk Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dan kelompok pengeluaran untuk Pendidikan juga turut meningkatkan inflasi di Sumatera Selatan tahun 2023. Sedangkan capain inflasi tahun 2024 cenderung mengalami tren penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

Perkembangan angka inflasi Sumatera Selatan secara Year on Year (yoy) dari



Bulan Januari s.d Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2026 tingkat inflasi daerah Sumatera Selatan ditargetkan sebesar 3 ± 1 diharapkan inflasi di Sumatera Selatan tetap terkendali pada 1,2% *year on year*, menunjukkan bahwa harga barang masih relatif stabil. Dengan inflasi yang terjaga hingga akhir 2024, diharapkan perekonomian Sumatera Selatan diprediksi akan tahun 2025 dengan optimisme yang lebih tinggi. Kondisi ini membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi, baik di sektor industri maupun konsumsi masyarakat.

Penyebab Inflasi Sumatera mengalami tren penurunan tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah yang tetap menjaga Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024 terjaga rendah dan stabil, namun masih dibawah target nasional yaitu $2,5\pm 1\%$ (1,5 – 3,5%). Kondisi Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Desember 2024 terjaga rendah dan stabil, yaitu 0,50% (mtm), dan tingkat inflasi tahunan (yoy) sebesar 1,20% lebih tinggi dari bulan sebelumnya (November) yaitu 0,73%, dan berada di bawah Nasional yang mempunyai Tingkat Inflasi sebesar (1,57%) dan tingkat inflasi bulanan (mtm) sebesar 0,44%. Pencapaian ini merupakan upaya dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan melalui TPID Kabupaten/Kota, semoga di tahun 2025 tingkat inflasi tetap terjaga rendah dan stabil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. Provinsi Sumatera Selatan berharap apa yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Pusat baik Upaya Pengendalian Inflasi Daerah melalui TPID, maupun program Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat didukung implementasinya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tingkat inflasi daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai nilai stabil pada tahun 2024 dengan tetap menjaga harga barang relatif stabil, peningkatan aktivitas ekonomi baik Sektor industri maupun konsumsi masyarakat dengan solusi yang dilakukan yaitu :

- **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi:** Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
- **Peningkatan Kualitas SDM:** Investasi pada pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja.
- **Diversifikasi Industri:** Pengembangan sektor industri yang beragam dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja.
- **Kebijakan yang Mendukung Pasar Kerja:** Kebijakan yang mendukung fleksibilitas pasar kerja, seperti deregulasi dan insentif bagi pengusaha, dapat meningkatkan

Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (Dua) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

5

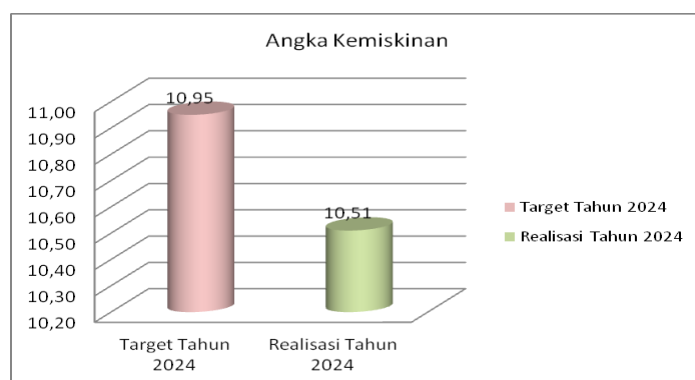
Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
5.1	Tingkat Kemiskinan	%	10,95	10,51	104,02
5.2	Gini Ratio	Indeks	0,324	0,331	102,16

Capaian indikator kinerja dari sasaran Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan adalah sebagai berikut :

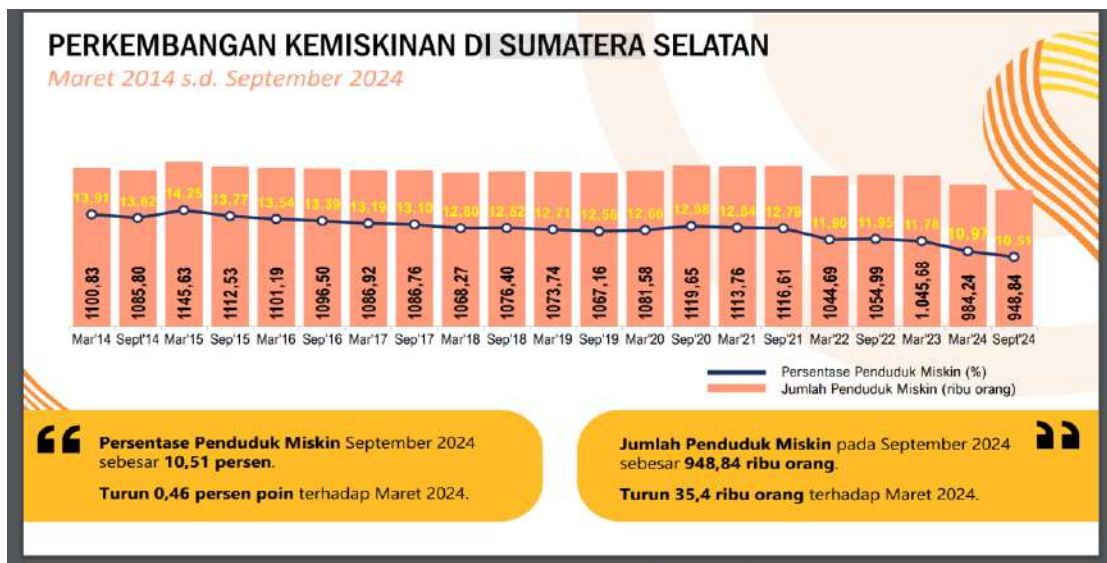
5.1 Tingkat Kemiskinan



Grafik 1.12 Angka Kemiskinan Tahun 2024

Angka kemiskinan penduduk di Sumatera Selatan tahun 2024 ditargetkan sebesar 10,95% dengan realisasi 10,51%, turun sebesar 0,44% poin. Secara umum kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan, dalam periode Maret 2014

- September 2024, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan menurun dari 1.100,83 ribu orang di Maret 2014 menjadi 948,84 ribu orang pada September 2024. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 13,91% menjadi 10,51%. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2014 sampai dengan September 2024 disajikan pada gambar dibawah



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk miskin September 2024 turun jika dibandingkan dengan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan September 2024 mencapai 948,84 ribu orang atau turun 35,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2024 yang berjumlah 984,24 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,51%, mengalami penurunan 0,46% poin terhadap persentase Maret 2024.



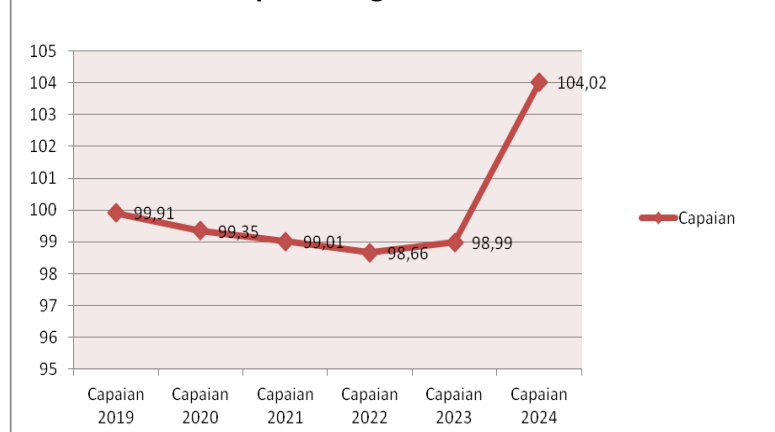
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2024 -September 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 32,3 ribu orang dari 342,34 ribu orang Maret 2024 menjadi 310,04 ribu orang September 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 menurun sebesar 1,02% dari semula 10,04% pada Maret 2024 menjadi 9,02% pada September 2024. Penduduk miskin di perdesaan September 2024 menurun sebanyak 3,1 ribu orang dibandingkan Maret 2024 dari 641,90 ribu orang menjadi 638,81 ribu orang. Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 menurun sebesar 0,10% poin dari semula 11,53% menjadi 11,43% pada September 2024. Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, cabe merah, roti, bawang merah, dan kopi bubuk & kopi instan (sachet). Sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perawatan kulit, muka, kuku, rambut, dan perlengkapan mandi.



Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 sebagaimana yang tergambar pada grafik diatas, maka dapat dilihat angka kemiskinan terus mengalami penurunan, di tahun 2022 sebesar 11,91% sedangkan di tahun 2023 sebesar 11,78% mengalami penurunan capaian sebesar 0,13%. Sama halnya pada tahun 2024 persentase kemiskinan sebesar 10,51% kembali mengalami penurunan sebesar 12,74% bila dibandingkan persentase kemiskinan pada tahun 2023. Jika dilihat dari grafik capaian persentase angka kemiskinan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan.

Capaian Angka Kemiskinan



Jika dilihat dari grafik disamping capaian angka kemiskinan dari tahun 2019 s.d 2024 mengalami penurunan dan peningkatan signifikan tahun 2024. Pandemi Covid-19 merupakan penyebab terjadinya penurunan capaian indikator kinerja ini. turunnya angka kemiskinan Sumatera Selatan

yang sebelumnya di angka 12,84% menjadi 11,90% pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,98%. Tetapi angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,95% pada September 2022 dan pada tahun 2023 11,78% atau turun sebesar 1,2% dan meningkat ditahun 2024 5,03%.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terjadi kontraksi hingga -0,11% akibat pandemi covid-19, di tahun 2022 ini kembali meningkat menjadi 5,18% sama dengan tahun 2023 5,8% dan tahun 2024 5,03%. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui program kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 ini. Semua usaha yang dilakukan untuk meringankan beban hidup masyarakat melalui Program Jaring Pengaman Sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagai bentuk perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup, meningkatkan jangkauan pelayanan dan perluasan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024 - September 2024 antara lain adalah:

- Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Triwulan III 2024. Ekonomi Sumatera Selatan triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04% (y-on-y).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,86%, menurun dibanding TPT Februari 2024 (3,97%).
- Inflasi September 2024 relatif terkendali sebesar 1,40% (y on y).
- Nilai Tukar Petani (NTP) September 2024 sebesar 124,44, naik 8,02% poin dibandingkan NTP Maret 2024.
- Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) September 2024 sebesar 125,40. Meningkat 6,23% poin dibanding Maret 2024.

- 
- f. Berbagai program bansos dikururkan antara lain PKH, BPNT/SEEMBAKO dan PBI di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu dikururkan bantuan CSR beras dan mie di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.
 - g. Pada periode Maret 2024-September 2024 terjadi perubahan harga beberapa kebutuhan pokok seperti kenaikan harga beras, minyak goreng dan gula pasir. Selain itu terjadi penurunan beberapa harga kebutuhan pokok seperti penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

Keberhasilan penurunan persentase angka kemiskinan merupakan kerja sama bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Sosial tapi dari seluruh aspek *stakeholder* yang ada. Oleh karena itu banyak hal yang harus diperbaiki agar di kemudian hari tujuan penurunan persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan bisa tercapai secara maksimal, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Belum optimalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Kurangnya Kolaborasi dan Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait. Mengingat kemiskinan merupakan kerja Bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens lagi agar semua komponen dapat fokus untuk mengerjakan tujuan yang sama dan hasil yang dihasilkan pun lebih maksimal.

Penurunan persentase angka kemiskinan ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut berperan dalam penurunan angka kemiskinan disamping instansi terkait lainnya. Adapun program kegiatan yang mendukung terjadinya penurunan persentase angka kemiskinan ini antara lain:

1. Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 293.940 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Tujuan dari program ini untuk :
 - Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;

- Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);
- Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

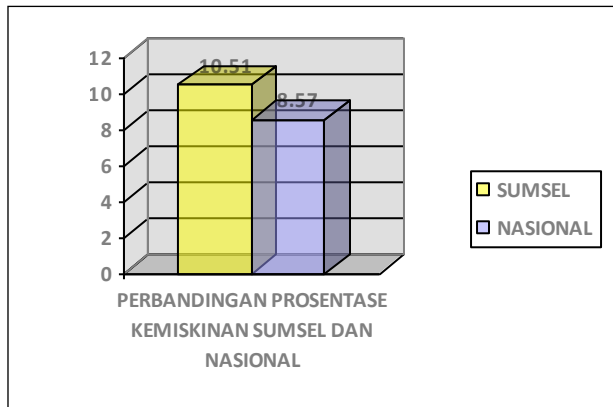
Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 70 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Muba, OKI, OI, Lahat, Musi Rawas, Empat Lawang, Muara Enim, OKU, OKUS, OKUT, PALI dan Muratara.

2. Bantuan Program Sembako kepada warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan di 17 Kabupaten/Kota. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebesar Rp. 200.000/bulan sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan kebutuhan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya berupa beras dan telur.
3. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Miskin di wilayah 9 Kabupaten/Kota sebanyak 1.360 KK. Bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan/bahan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki embrio usaha namun terhambat perkembangannya sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Melalui pelayanan sosial didalam panti, diluar panti dan bantuan sosial (Asistensi Lanjut Usia/Bantuan Langsung Tunai) bagi lansia non potensial serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia potensial.
5. Program Perlindungan Sosial Anak Pelayanan di dalam panti, diluar panti dan bantuan sosial bagi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
6. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), pemberian bantuan cash transfer bagi penyandang disabilitas berat dan bantuan alat bantu, penjangkauan kedaruratan/bebas pasung bagi penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa)

7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial

Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.

Jika dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih lebih tinggi sebagaimana yang ditampilkan dalam grafik berikut:



Pada september 2024 tercatat angka kemiskinan nasional sebesar 8,57% atau sebanyak 24,06 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan di angka kemiskinan diprovinsi sumatera selatan sebesar 10,51% menurun 0,46% poin terhadap persentase maret 2024. Meskipun angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka

nasional tetapi perkembangannya saat ini cukup baik.



Jika dilihat Capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Angka Kemiskinan ditahun 2024 sebesar 10,51% dari yang ditargetkan sebesar 10,95% hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 0,44% atau target penurunan angka kemiskinan tercapai.

Untuk dapat menurunkan persentase angka kemiskinan masih diperlukan adanya :

1. Optimalisasi sinergitas program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas data melalui perbaikan secara bertahap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya bagi keluarga miskin dan rentan dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.
3. Peningkatan partisipasi dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Sosial



Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Berikut ini beberapa program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama terkait Penurunan Persentase Angka Kemiskinan :

- I. Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Provinsi.
- II. Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia terlantar di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.
- III. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- IV. Program Penanganan Bencana dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Perumahan dan Sandang.
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.
 - Pelayanan Dukungan Psikososial.
- V. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

5.2 Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan dimana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Rasio Gini = 0 mengindikasikan ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sementara Rasio Gini = 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan sejak Maret 2011 tampak fluktuatif dan cenderung menurun selama periode 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Maret 2011 Gini Ratio sebesar 0,342 pada September 2024 angka Gini Ratio hanya sebesar 0,331. Ini menunjukkan selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sumatera Selatan.



Dalam enam bulan terakhir atau pada periode Maret 2024 - September 2024 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,333 keadaan Maret 2024 menjadi 0,331 pada September 2024. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat

tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan

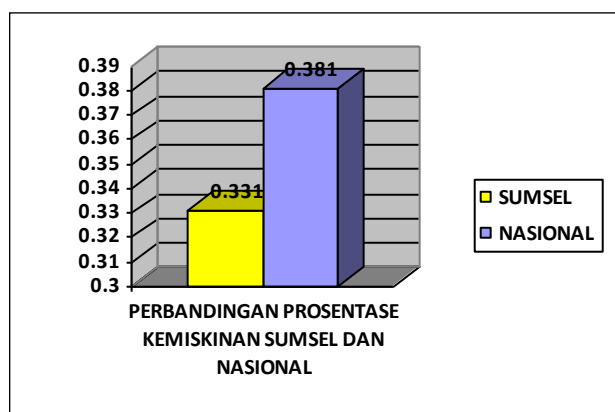


pada September 2024 sebesar 0,357, naik 0,005 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,352. Sebaliknya untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,300 turun 0,005 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 sebesar 0,305.

Penurunan Gini Ratio di Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada grafik diatas. Tercapainya target penurunan Ratio Gini di Provinsi Sumatera Selatan, menandakan terjadinya perbaikan pemerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penyebab dari menurunnya Gini Ratio antara lain :

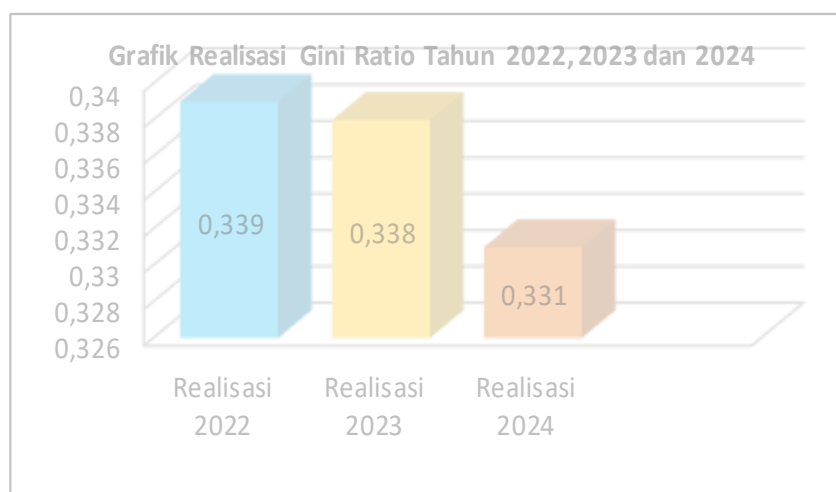
1. Perluasan jangkauan dan penambahan jumlah penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan. Pada tahun 2024 jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial sebanyak 2.444.966 jiwa yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (di pedesaan maupun perkotaan), mengalami kenaikan sebesar 77,99% atau 537.942 jiwa jika dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebanyak 1.907.024 jiwa. Dengan adanya perluasan jangkauan dan penambahan jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin/rentan tersebut. dan menguatkan perekonomian mereka.
2. Penambahan indeks bantuan sosial bagi penerima PKH dan Program Sembako
Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) khusus bagi Ibu Hamil dan Anak Balita mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 2.400.000/tahun, pada tahun 2020 mengalami penambahan indeks sebagai berikut:
 - a. Ibu Hamil Rp. 3.000.000.-
 - b. Anak Balita Rp. 3.000.000.-
 - c. SD Rp. 900.000.-
 - d. SMP Rp. 1.500.000.-
 - e. SMA Rp. 2.000.000.-
 - f. Penyandang Disabilitas Rp. 2.400.000.-
 - g. Lanjut Usia Rp. 2.400.000.-
3. Penambahan indeks bantuan untuk program sembako yang semula sebesar Rp.110.000/KPM/bulan, maka pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Bantuan sosial program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan bahan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Bantuan sosial pangan ini diberikan dalam bentuk non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia/ yang ditunjuk.

Penurunan Gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil dari berbagai intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima manfaat PKH dan bantuan sembako, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga sudah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. (Perbandingan target nasional).



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa angka gini rasio provinsi sumatera selatan masih lebih rendah dari angka gini rasio nasional, itu artinya ketimpangan atau pemerataan pendapatan yang ada di provinsi sumatera selatan masih lebih baik jika dibandingkan dengan ketimpangan nasional.

Berdasarkan grafik disamping Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu dari tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi, dalam satu tahun terakhir atau pada periode Maret 2022 - Maret 2023 Gini

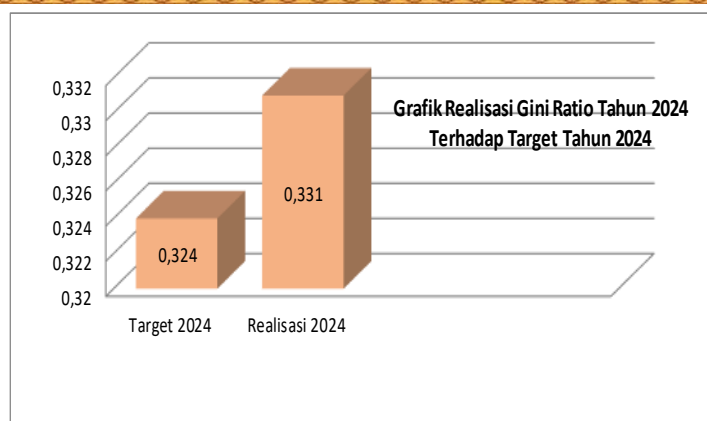


Grafik 1.16 Perbandingan Realisasi Ratio Gini Tahun 2022 s.d 2024

Ratio Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan dari 0,339 keadaan Maret 2022 menjadi 0,338 keadaan Maret 2023 atau turun 0,001 poin, sedangkan kenaikan terjadi untuk periode September 2024 yaitu sebesar 0,008 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat sebaiknya lebih ditingkatkan kembali.

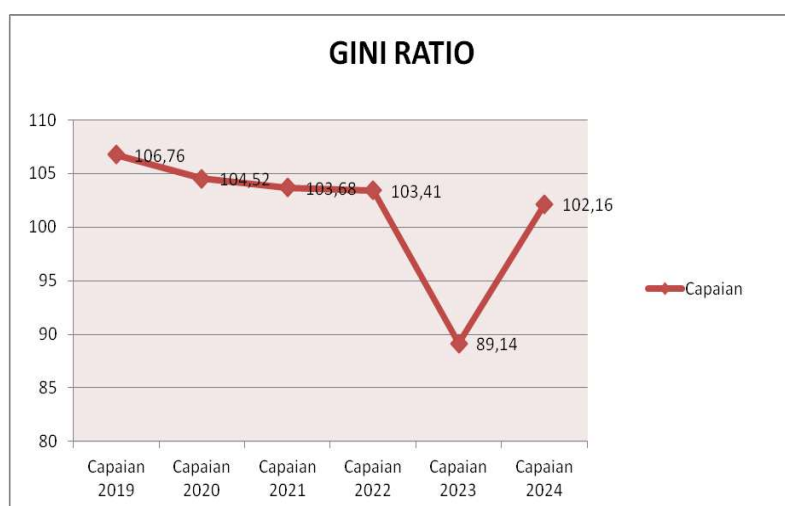
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 20,37%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 19,32% dan untuk daerah perdesaan 21,60%, yang juga berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan grafik diatas realisasi tahun 2024 Gini Ratio sebesar 0,331 melampaui capaian target tahun 2024 sebesar 0,324. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio Nasional (Pusat) pada bulan Maret 2024 sebesar 0,379.



Grafik 1.17 Realisasi Gini Ratio Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,331 maka angka ini masih berada dibawah rata-rata nasional. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.



Dari grafik disamping dapat dilihat capaian ratio gini dari tahun 2019 s.d 2024 mengalami penurunan. Penurunan ini merupakan intervensi pemerintah diberbagai sektor yang menyentuh langsung kemasyarakat walaupun ditengah hadirnya Covid-19

yang berdampak pada kemiskinan diberbagai sektor. Penurunan yang signifikan terjadi tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan capaian 89,14 hal ini disebabkan adanya naiknya angka ketimpangan pendapatan yang tidak terlalu signifikan serta tahun 2024 sebesar 102,16. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ratio Gini yaitu :

Keberhasilan Pengurangan Ratio Gini merupakan kerja Bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat di laksanakan sendiri oleh Dinas Sosial saja. Terlebih banyak sekali aspek yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kemiskinan di suatu daerah. Oleh sebab itu banyak hal yang harus diperbaiki agar kedepanya tujuan dari pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi 1 (satu) digit bisa tercapai dengan maksimal. Hal – hal yang perlu diperhatikan tersebut antara lain sebagai berikut:

2. Masih belum akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui verifikasi dan validasi data , agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
3. Masih belum optimalnya Kolaborasi dan Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait. Mengingat Gini Ratio merupakan kerja Bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens dan efektif lagi agar semua komponen dapat fokus untuk mengerjakan tujuan yang sama agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Pasca terjadinya pandemi Covid-19 memberikan pukulan yang cukup berat bagi pemulihan kondisi perekonomian masyarakat karena menyebabkan gangguan di segala sendi kehidupan khususnya dalam hal berusaha, tentunya hal tersebut semakin memperberat tugas pemerintah dalam mencapai tujuan pengurangan Gini Ratio.



Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

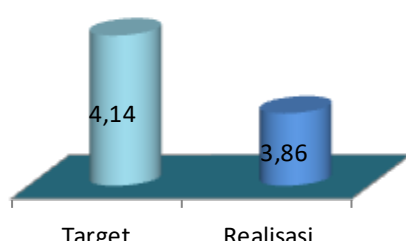
Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,86	106,76

Capaian indikator kinerja dari sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran adalah sebagai berikut :

6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase Jumlah Pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mempunyai kegunaan untuk mengidentifikasi besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diinterpretasikan bahwa TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha dipasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 adalah sebesar 3,86%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemic Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,25% poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pengangguran dari 188.510 orang pada tahun 2023 menjadi 179.710 orang pada tahun 2024 atau terjadi penurunan Tingkat pengangguran terbuka sebesar 8.800 orang.



Grafik 1.18 Persentase Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,14% dengan capaian sebesar 3,86%, artinya capaian melebihi persentase yang telah ditargetkan sebesar 0,28%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian untuk TPT menunjukkan hasil yang baik, karena idealnya TPT sama atau lebih kecil dari

target yang telah ditetapkan. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri atas 4,48 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,18 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 71,64 ribu orang. Penduduk bekerja bertambah sebanyak 80,44 ribu orang sedangkan pengangguran berkurang sebanyak 8,80 ribu orang.

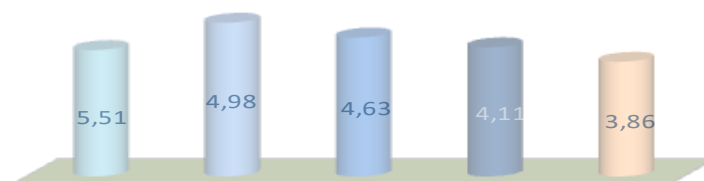
Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Februari 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 103,310 ribu orang. Penduduk bekerja meningkat sebesar 104,70 ribu dan pengangguran berkurang sebesar 1.290 orang. TPT pada bulan Agustus 2024 TPT dari

Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,53%. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah yaitu sebesar 1,17%. Dibandingkan Agustus 2023, Penurunan TPT terjadi hanya pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Atas. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu 2,72% poin.

Tabel Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019 s.d 2024

Tahun	Pengangguran (Orang)	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Tingkatan Pengangguran (%)
2019	190.200	4.202.800	4,53
2020	238.400	4.329.700	5,51
2021	219.200	4.398.900	4,98
2022	208.260	4.497.960	4,63
2023	188.510	4.588.170	4,11
2024	179.710	4.659.810	3,86

Sumber : BPS Sumsel dalam Angka 2024 dan Disnaker Prov.sumsel

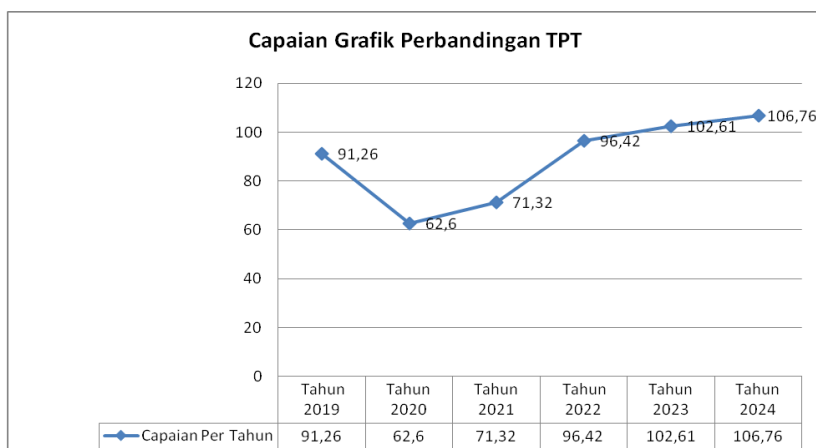


Grafik 1.19 Proyeksi dan realisasi indikator kinerja Tingkat pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 sebesar 5,51% terjadi penurunan ditahun 2021 menjadi sebesar 4,98% yang disebabkan oleh penurunan jumlah pengangguran dari 238.400 orang menjadi sebanyak 219.200 orang, jadi terdapat penurunan TPT yang sebesar 0,53% atau 19.200 orang. Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,63% dengan jumlah pengangguran turun menjadi 208.260 orang dan terus menurun pada tahun 2023 TPT 4,11% dengan jumlah pengangguran turun menjadi 188.510 orang atau turun sebanyak 9.750 orang. Pada tahun 2024, TPT Sumatera Selatan sebesar 3,86% atau 179.710 orang, angka ini turun sebanyak 8.800 orang jika dibandingkan dengan tahun 2023..

Adapun program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Indikator TPT ini yaitu Program Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dengan kegiatan membuka lapangan pekerjaan.

Perbandingan capaian tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini sebagai berikut :



Grafik 1.20 Capaian TPT per tahun

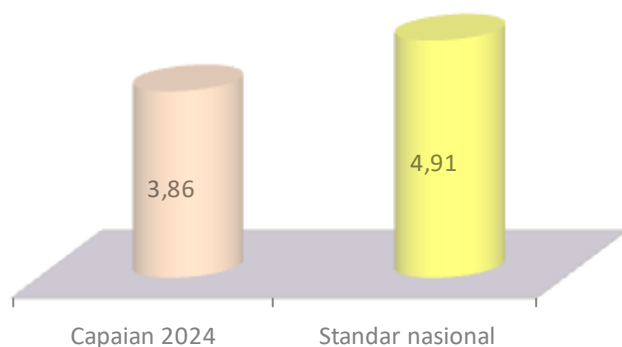
Capaian Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dari tahun 2019 s.d 2024 mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan setiap tahun bisa dilihat dari grafik disamping, penurunan

dialami di tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2021 s.d

2024, oleh karena itu angka pengangguran harus ditekan semaksimal mungkin, target pengurangan pengangguran tentunya membawa konsekuensi terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada tahun kedepannya. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan. Adapun upaya yang menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan pengangguran untuk menurunkan jumlah angka TPT yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk pengembangan skill.
2. Pelatihan Wirausaha Baru, Peningkatan Produktivitas, dan Bimbingan Konsultasi kepada UMKM untuk mewujudkan UMKM yang berkembang sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.
3. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang bertujuan untuk menjadikan para peserta magang menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tenaga kerja magang yang bekerja dengan sangat baik maka pihak perusahaan disarankan untuk merekrutnya sebagai karyawan tetap.
4. Penempatan Tenaga Kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
5. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
6. Pengelolaan informasi pasar kerja melalui kegiatan Job Fair dan aplikasi cari kerja.

Perbandingan capaian indikator tahun 2024 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:



Capaian Kinerja untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan terus membaik, apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih berada diatas capaian nasional, capaian Sumsel pada tahun 2024 sebesar 3,86%, lebih baik dari Nasional yang sebesar 4,91%.

Grafik 1.21 TPT dengan Target Nasional

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Capaian angka TPT Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 3,86%, lebih baik dari angka Nasional yang sebesar 4, 91%. Hal ini berarti di Sumatera Selatan dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang penganggur. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid 19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Capaian ini merupakan akumulasi efisiensi dan efektivitas sumber daya di Sumatera Selatan. Beberapa hal yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2024.
- Bersama Balai Pelayanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) melaksanakan Sosialisasi kepada pencari kerja di kabupaten / kota untuk bekerja ke luar negeri secara prosedural.
- Mendorong Kabupaten / Kota dan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk melaksanakan Kegiatan *Job Fair*.
- Membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 273/KPTD/BAPPEDA/2024 tanggal 16 April 2024.
- Berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Sriwijaya untuk membangun kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan Vokasi dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
- Melaksanakan *Job Fair Sumsel 2024 "Terbesar di Bumi Sriwijaya"*.
- Mengoptimalkan layanan pada aplikasi <https://carikerja.sumselprov.go.id>. (SARIPATI).

- Melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan untuk mempersiapkan pencari kerja memasuki dunia kerja.
- Melaksanakan Pemagangan Dalam Negeri.

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang salah satu tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah adalah mengurangi pengangguran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendorong program-program kegiatan yang mengarah kepada penurunan angka pengangguran.

Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

7

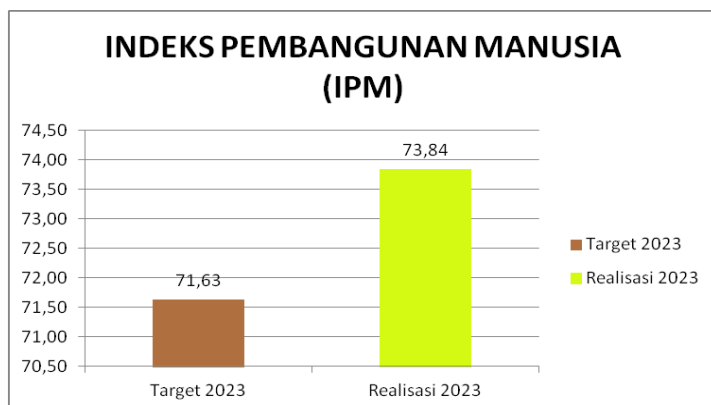
Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,63	73,84	103,09
7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,94	93,25	99,27
7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70	54	77,14
7.4	Prevalansi Stunting	%	14,3	1,20	191,61

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan adalah sebagai berikut :

7.1 Indeks Pembangunan Manusia



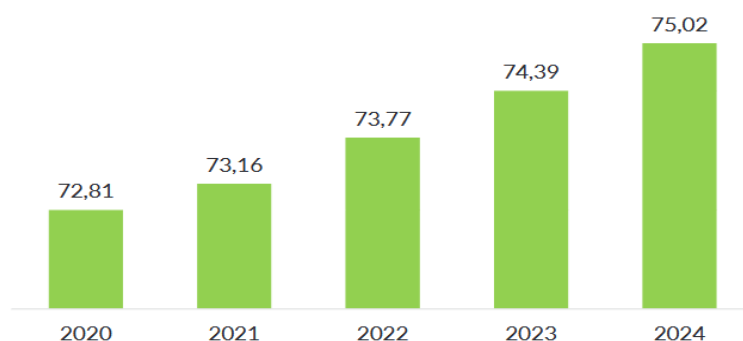
Grafik 1.22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 73,84 meningkat 0,66 poin 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 73,18. Selama 2020-2024, IPM Sumatera Selatan rata-

rata meningkat sebesar 0,77% per tahun.

Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2024, IPM Sumatera Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,77% per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024.



Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2020-2024

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 14, berstatus “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 2. Sementara itu, Kota Palembang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).



IPM Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2024



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 73,84 meningkat 0,66 poin 0,90% belum melampaui standar nasional IPM Indonesia sebesar 75,02. Upaya yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan IPM yaitu dengan didorong oleh perbaikan pada semua indikator pembentuknya, yang terpenting adalah standar hidup layak. Untuk mencapai peningkatan IPM, diperlukan jangka panjang. Setiap provinsi bergerak secara aktif dalam meningkatkan IPM, dengan tingkat percepatan yang berbeda-beda. Peringkat bukanlah



satu-satunya hal yang menjadi fokus, karena semua provinsi berusaha melakukan percepatan. Yang terpenting adalah bagaimana percepatan ini dapat terus dilakukan melalui program-program yang telah dijalankan. Terdapat tiga dimensi utama yang dapat mendorong percepatan peningkatan IPM, yaitu usia harapan hidup (dalam sektor kesehatan), usia harapan lama sekolah, dan Standar Hidup Layak. IPM Provinsi Sumsel merupakan hasil akumulasi dari kinerja kabupaten dan kota di bawahnya. Oleh karena itu, semua pihak harus bergerak bersama untuk meningkatkan capaian IPM ini. Beberapa daerah di Sumsel, seperti Kabupaten Muratara dan Kabupaten Pali, masih memiliki IPM yang rendah. Salah satu upaya yang signifikan adalah melalui dana Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus), yang digunakan untuk mendorong pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Efisiensi penggunaan sumber daya memiliki peran krusial dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang efisien, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan, berdampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

□ **Pentingnya Efisiensi Sumber Daya:**

- **Sektor Pendidikan:** Efisiensi dalam penggunaan anggaran pendidikan (seperti guru, infrastruktur, kurikulum) dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan akses ke pendidikan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat, yang merupakan komponen penting dalam IPM.
- **Sektor Kesehatan:** Efisiensi dalam pengelolaan anggaran kesehatan (seperti tenaga medis, fasilitas, obat-obatan) dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan memperpanjang harapan hidup, yang juga merupakan komponen penting dalam IPM.
- **Sektor Ekonomi:** Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (seperti infrastruktur, tenaga kerja, teknologi) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan lapangan kerja, yang berdampak positif pada standar hidup dan kesempatan yang setara, komponen penting dalam IPM.

□ **Dampak Efisiensi pada IPM:**

- **Peningkatan Kualitas Hidup:** Efisiensi sumber daya yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
- **Peningkatan Kesempatan yang Setara:** Efisiensi dapat membantu menciptakan kesempatan yang setara bagi semua orang, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

- **Peningkatan Produktivitas:** Efisiensi sumber daya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.

□ **Contoh Kongret :**

- **Penggunaan Anggaran yang Efisien:** Jika anggaran pendidikan digunakan secara efisien untuk meningkatkan kualitas guru, infrastruktur, dan kurikulum, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan akses ke pendidikan yang lebih baik.
- **Penggunaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Jika sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang merupakan komponen penting dalam IPM.
- **Peningkatan Akses Teknologi:** Jika teknologi digunakan secara efisien untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

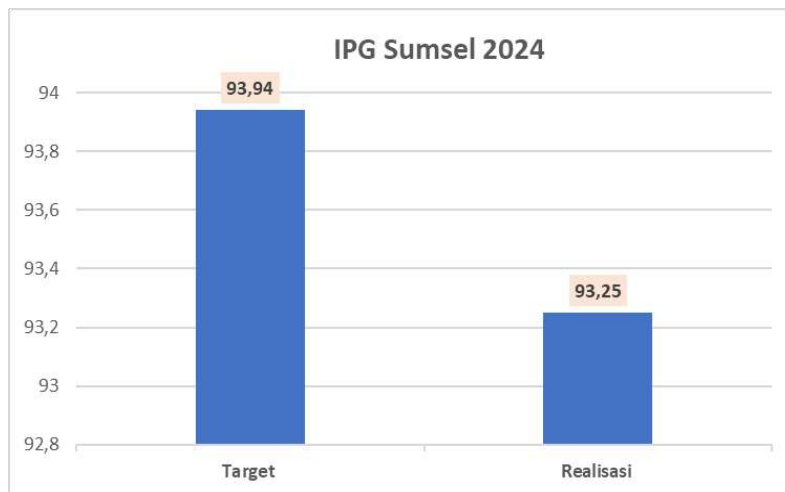
7.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di daerah. IPG membandingkan pencapaian antara pria dan wanita dalam beberapa bidang penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pekerjaan atau politik.

IPG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama:

1. **Kesehatan:** Diukur dengan menggunakan rasio harapan hidup antara pria dan wanita (*a long a and healthy life*).
2. **Pendidikan:** Diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan dan pencapaian antara pria dan wanita, seperti angka melek huruf dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (*knowledge*).
3. **Keterlibatan dalam Dunia Kerja:** Mengukur partisipasi dan kesetaraan dalam dunia kerja, baik dalam hal jumlah pekerja pria dan wanita, maupun dalam aspek upah dan peluang karier (*decent standard of living*).

Indeks ini memiliki nilai antara 0 dan 100, di mana nilai 100 menunjukkan kesetaraan gender yang sempurna, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan ketidaksetaraan yang sangat tinggi antara pria dan wanita.



Pusat

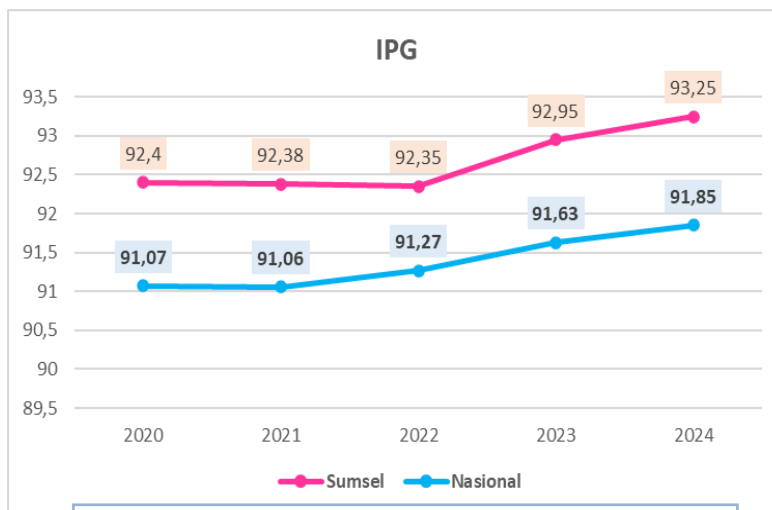
Grafik 1.23 IPG Sumsel 2024

Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 93,25 atau 99,27% dari target 93,94. Angka ini merupakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023, yang diperoleh dari Badan

Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Untuk data capaian Indeks

Pembangunan Gender (IPG) berlaku n-1, karena nilai yang didapat merupakan komposit dari beberapa komponen yang memerlukan waktu proses penghitungan.

Tujuan utama dari IPG adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam pembangunan di suatu negara atau wilayah, serta memberikan dasar untuk kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi gender yang lebih adil.



Grafik 1.24 Perbandingan IPG Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

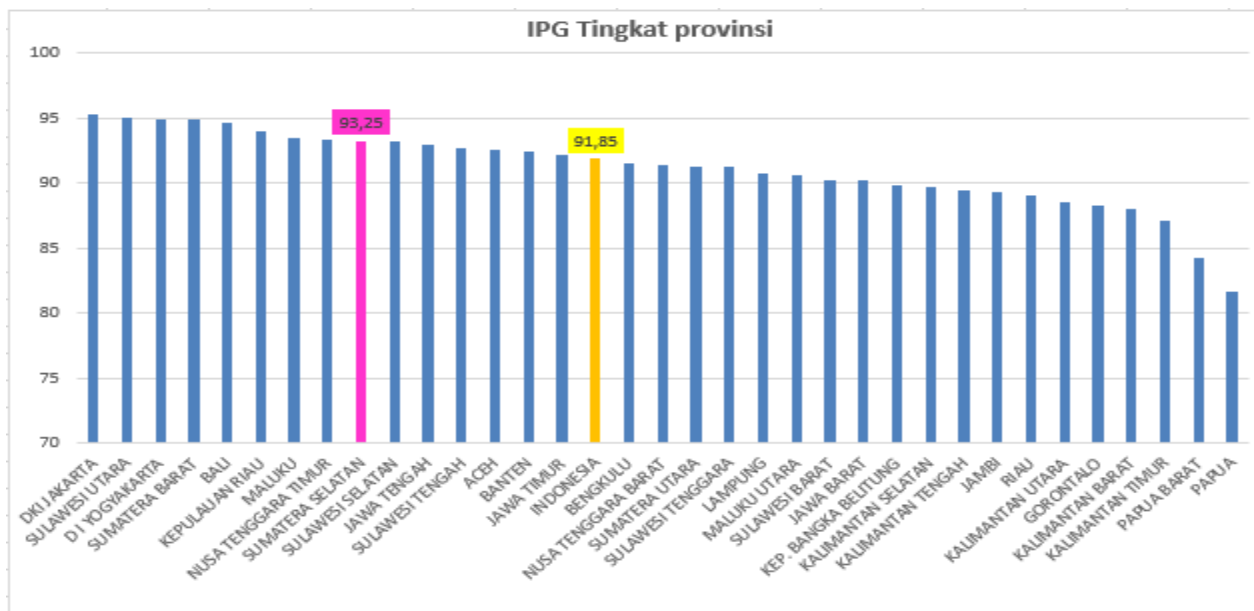
Untuk Nilai IPG Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung sedikit menurun, pada tahun 2020 sebesar 92,40 menurun pada tahun 2021 sebesar 92,38 dan pada tahun 2022 menurun lagi sebesar

92,35 tetapi pada tahun 2023 meningkat sebesar 92,95 dan tahun 2024 meningkat lagi sebesar 93,25 dimana angka tersebut berada diatas nilai capaian nasional sebesar 91,85.

IPG Sumatera Selatan tercatat di atas rata-rata nasional, menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Provinsi Sumatera Selatan lebih baik dibandingkan dengan

rata-rata nasional Indonesia, ini menandakan bahwa perempuan di Sumatera Selatan lebih berpeluang untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan dibandingkan dengan rata-rata perempuan di seluruh Indonesia.

Indeks Pembangunan Gender Sumatera Selatan termasuk ke kelompok provinsi dengan kategori IPG 90-100 dan Pada Tahun 2024 berada di urutan ke 9 dari 38 Provinsi.



Grafik 1.25 IPG Tingkat Provinsi Tahun 2024

Secara nasional, ada 19 (sembilan belas) provinsi yang capaian IPG nya berada dibawah nasional yang nilainya 91,85. Disparitas pembangunan gender terjadi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat dari mayoritas provinsi dengan IPG lebih tinggi diatas nasional berada di KBI, sedang provinsi dengan capaian IPG dibawah nasional mayoritas di KTI.

Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2023 Provinsi dan Nasional

Provinsi	IPG				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
ACEH	91,84	92,07	92,23	92,24	92,55
SUMATERA UTARA	90,71	90,67	90,73	91,06	91,31
SUMATERA BARAT	94,09	94,17	94,34	94,72	94,93
RIAU	88,43	88,14	88,38	88,71	88,98
JAMBI	88,44	88,41	88,62	88,95	89,29
SUMATERA SELATAN	92,4	92,38	92,35	92,95	93,25
BENGKULU	91,19	91	91,16	91,36	91,57
LAMPUNG	90,39	90,33	90,37	90,58	90,75
KEP. BANGKA BELITUNG	89	88,92	89,11	89,55	89,84

KEPULAUAN RIAU	93,1	93,31	93,49	93,5	93,96
DKI JAKARTA	94,71	94,63	94,84	94,93	95,24
JAWA BARAT	89,26	89,2	89,36	89,8	90,23
JAWA TENGAH	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87
D I YOGYAKARTA	94,77	94,8	94,88	94,99	94,93
JAWA TIMUR	90,91	91,07	91,67	92,08	92,15
BANTEN	91,67	91,74	91,83	92,18	92,48
BALI	93,72	93,79	94,01	94,36	94,59
NUSA TENGGARA BARAT	90,4	90,45	90,53	91,08	91,39
NUSA TENGGARA TIMUR	92,72	92,73	92,63	92,96	93,38
KALIMANTAN BARAT	86,81	86,87	86,95	87,61	88,06
KALIMANTAN TENGAH	89,09	89,03	88,79	89,2	89,49
KALIMANTAN SELATAN	88,61	88,86	88,86	89,44	89,65
KALIMANTAN TIMUR	85,98	85,7	85,95	86,61	87,13
KALIMANTAN UTARA	87	86,67	87,3	87,85	88,46
SULAWESI UTARA	94,53	94,42	94,61	94,89	95,06
SULAWESI TENGAH	92,01	91,87	91,91	92,24	92,63
SULAWESI SELATAN	93,09	92,86	92,85	93,14	93,19
SULAWESI TENGGARA	90,56	90,5	90,68	91,04	91,20
GORONTALO	86,83	86,73	87,5	88,12	88,25
SULAWESI BARAT	89,76	89,43	89,57	89,79	90,25
MALUKU	93,04	92,97	93,19	93,2	93,51
MALUKU UTARA	89,61	89,55	89,75	90,3	90,59
PAPUA BARAT	82,74	82,91	83	83,61	84,18
PAPUA	80,05	79,59	80,16	81,04	81,64
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-
INDONESIA	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber : BPS Indonesia

Lebih dari separuh kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai IPG di atas 90. Namun, hal ini tidak serta merta dapat diartikan bahwa pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di daerah tersebut sudah tinggi. IPG diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang “sama-sama tinggi” atau “sama-sama rendah”.

Hal tersebut juga terjadi pada pencapaian IPG pada level kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. IPG tertinggi di raih oleh Kabupaten Ogan Ilir sebesar 98,93 dan terendah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 83,48. Kabupaten Ogan Ilir

memiliki IPG tertinggi, jika dilihat dari pencapaian IPM laki-laki 72,56 dan IPM perempuan 72,01 atau pencapaian komponen “hampir sama besar” dan mendekati IPM Sumatera Selatan. Sedang Kabupaten Musi Banyuasin memiliki IPG terendah, namun dilihat dari pencapaian IPM laki-laki 75,79 dan IPM perempuan 63,70 atau terjadi disparitas kesenjangan sebesar 12,09. Pencapaian IPM laki-laki Musi Banyuasin sudah mendekati IPM laki-laki provinsi sebesar 76,49, namun IPM perempuan Musi Banyuasin mempunyai kesenjangan dari IPM perempuan Provinsi di angka 71,75.

Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang memiliki IPG kurang dari 90 yaitu Musi Banyuasin 83,48, Musi Rawas 86,55, Banyuasin 89,54 dan Muara Enim 89,82.

Pencapaian IPG dan IPM kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan perkomponen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

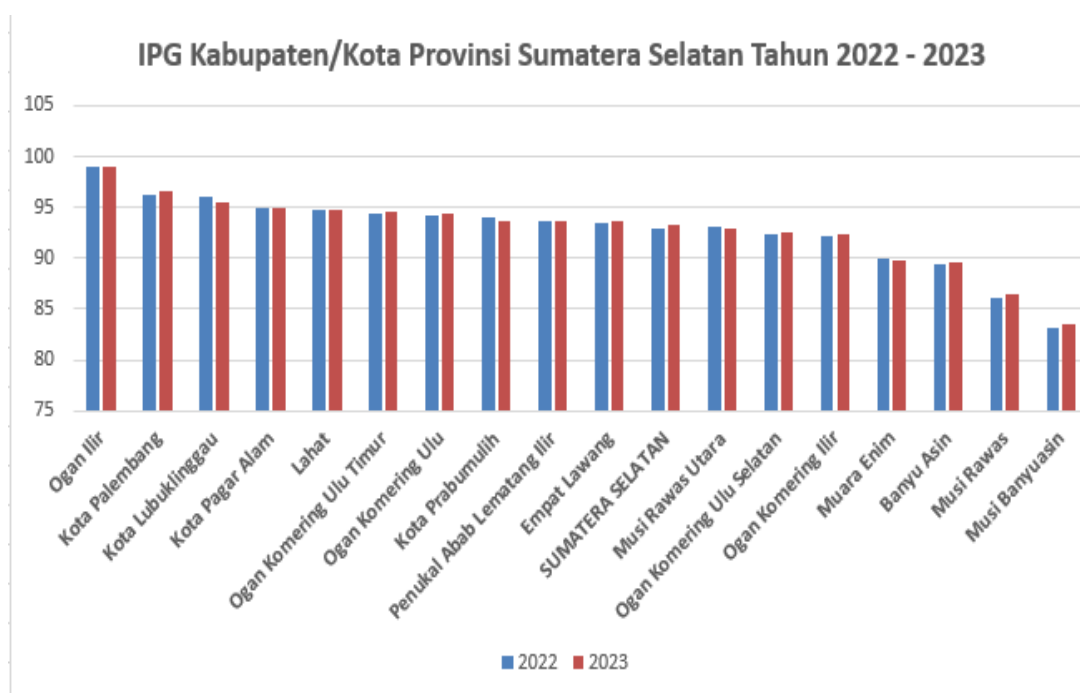
Tabel 3.7 Pencapaian Komponen IPG dan IPM Kabupaten/Kota Sumsel Tahun 2023

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IPG	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)		Harapan Lama Sefiolah (EYS/HLS)		Rata-rata Lama Sefiolah (MYS/RLS)		Pengeluaran per fiapita (ribu rupiah/ orang/tahun)		IPM	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogan Komering Ulu	94,34	66,91	70,88	12,56	13,18	8,96	8,73	15.879	10.361	76,72	72,62
Ogan Komering Ilir	92,35	67,38	71,34	11,53	12,41	7,5	6,79	17.256	9.865	74,46	69,19
Muara Enim	89,82	67,79	71,74	11,8	12,18	8,65	7,57	16.926	8.896	76,29	69,02
Lahat	94,76	64,96	68,89	12,44	13,02	8,93	8,31	14.467	10.416	75,65	71,94
Musi Rawas	86,55	67,01	70,98	12,07	12,39	7,87	7,41	16.089	6.433	74,97	65,25
Musi Banyuasin	83,48	67,58	71,54	12,31	12,36	7,93	7,43	16.791	5.595	75,79	63,70
Banyu Asin	89,54	67,83	71,78	11,84	12,51	7,91	7,11	15.751	7.777	74,66	67,33
Ogan Komering Ulu Selatan	92,46	65,94	69,92	11,78	12,17	8,22	7,93	12.898	7.859	72,85	67,51
Ogan Komering Ulu Timur	94,59	67,85	71,8	12,43	12,47	8,21	7,71	15.967	11.679	75,89	72,3
Ogan Ilir	98,93	64,43	68,33	12,37	12,58	8,39	7,87	11.456	11.743	72,56	72,01
Empat Lawang	93,69	63,84	67,72	11,85	12,55	8,17	7,51	14.611	9.685	72,97	68,45
Penukal Abab Lematang Ilir	93,71	67,03	71	11,45	12,63	7,6	6,71	12.674	8.360	71,64	67,47

Musi Rawas Utara	92,96	64,46	68,37	11,69	12,43	8,03	7,04	15.324	9.912	74,03	68,96
Kota Palembang	96,52	70,04	74,04	14,49	14,33	11,07	10,68	17.967	15.008	83,22	81,11
Kota Prabumulih	93,72	69,33	73,3	13,18	13,72	10,64	10,02	19.830	12.552	81,97	77,44
Kota Pagar Alam	95,01	65,76	69,74	13,27	13,98	9,57	9,37	12.809	8.966	76,23	72,73
Kota Lubuklinggau	95,47	68,33	72,27	13,34	14,3	10,31	9,68	19.016	13.431	81,36	78,35
SUMATERA SELATAN	93,25	68,74	72,68	12,53	12,93	8,67	8,33	15.885	9.888	76,49	71,75

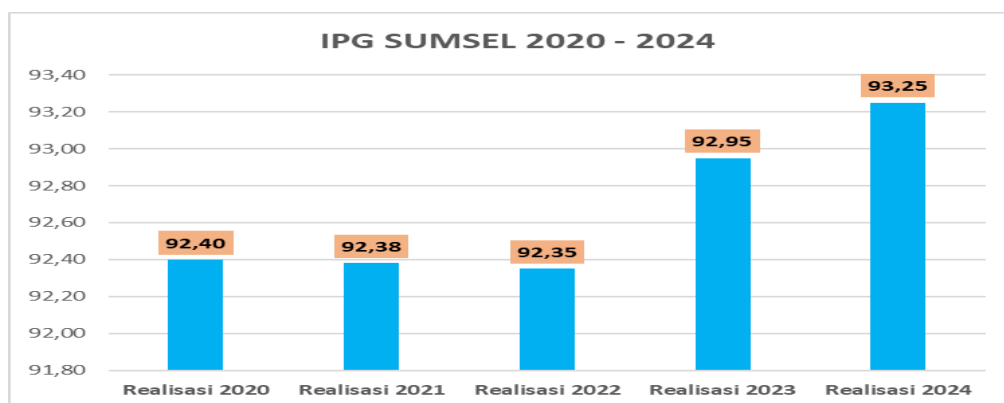
Sumber : BPS Indonesia

Dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, Indeks Pembangunan Gender pada Tahun 2023 ada 10 Kabupaten/Kota yang berada diatas capaian Provinsi dan 7 Kabupaten yang di bawah capaian Provinsi.



Grafik 1.26 IPG Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Pencapaian Realisasi IPG Tahun 2024 dibandingkan dengan Realisasi IPG 2023 terjadi kenaikan sebesar 0,30 atau naik 0,85 selama 5 tahun dari tahun 2020, walaupun sampai tahun 2022 nilainya cenderung menurun tetapi masih diatas capaian nasional. Secara umum pencapaian masing-masing komponen mengalami peningkatan. Tetapi pada beberapa komponen terjadi peningkatan disparitas/kesenjangan pencapaian komponen laki-laki dan perempuan. Perbandingan antara realisasi IPG dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Grafik 1.27 IPG Sumsel Realisasi 2020-2024

Capaian nilai IPG dipengaruhi oleh berbagai dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perbandingan nilai komponen penyusun IPG pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Perbandingan Komponen IPG Sumsel Tahun 2019 - 2023

Tahun Pengukuran	AHH		HLS		RLS		PPP		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	
2019	67,78	71,63	12,32	12,61	8,54	7,82	15,154	9,510	92,40
2020	68,00	71,86	12,40	12,62	8,57	7,90	14,748	9,289	92,38
2021	68,11	71,95	12,51	12,63	8,58	8,01	14,821	9,290	92,35
2022	68,38	72,29	12,52	12,79	8,59	8,19	15,371	9,625	92,95
2023	68,74	72,68	12,53	12,93	8,67	8,33	15,885	9,888	93,25

Sumber: BPS Indonesia

Dimensi pertama yaitu kesehatan atau umur panjang dan hidup sehat (*a long a and healthy life*) dihitung yang diwakili dengan komponen Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan, pada perempuan dari 71,63 tahun pada Tahun 2019 meningkat menjadi 71,86 tahun pada 2020, meningkat menjadi 71,95 pada Tahun 2021 dan menjadi 72,29 pada Tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 72,68. Begitu pula dengan angka harapan hidup laki-laki yaitu 67,78 tahun pada Tahun 2019 meningkat menjadi 68,00 tahun pada 2020, meningkat menjadi 68,11 pada Tahun 2021 meningkat lagi menjadi 68,38 pada Tahun 2022 dan menjadi 68,74 pada tahun 2023. Jika dilihat dari kesenjangan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan pada Tahun 2019 sebesar 3,85, sedang Tahun 2020 kesenjangan meningkat sebesar 3,86, Tahun 2021 kesenjangan turun menjadi 3,84, pada tahun 2022 kesenjangan naik menjadi 3,91 dan Tahun 2023 kesenjangan naik kembali menjadi 3,94.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak pelaksanaan pembangunan, khususnya kesehatan. Pada komponen Angka harapan hidup di Provinsi Sumsel angka harapan hidup perempuan melebihi laki-laki. Fenomena ini hampir merata di seluruh provinsi bahkan



nasional, yang disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor biologis dan gaya hidup. Laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan saat dilahirkan. Faktor biologis lain adalah hormon estrogen yang dimiliki perempuan menjadi pelindung alami dari perkembangan penyakit jantung dan perubahan kondisi tubuh perempuan sepanjang hidupnya. Sebaliknya hormon testosteron yang dimiliki pria mendorong aktivitas yang lebih beresiko. Pada aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas diluar dibanding perempuan, yang mendatangkan berbagai resiko seperti stres, depresi, lingkungan yang tidak sehat, merokok, obesitas dan penyakit menular serta resiko kecelakaan kerja.

Dimensi pendidikan atau pengetahuan (*knowledge*) diwakili oleh komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di Sumatera Selatan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara, walaupun masih ada disparitas nilainya tidak begitu besar.

Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan Tahun 2019 selama 12,61 tahun, Tahun 2020 selama 12,62 tahun, pada Tahun 2021 selama 12,63 tahun, meningkat pada tahun 2022 selama 12,79 tahun dan meningkat kembali tahun 2023 selama 12,93 tahun. Tidak berbeda dengan harapan lama sekolah laki-laki yang juga mengalami peningkatan sedikit dari 12,32 tahun pada Tahun 2019 menjadi 12,40 tahun pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 selama 12,51 meningkat di tahun 2022 selama 12,52 serta meningkat kembali Tahun 2023 menjadi 12,53 tahun. HLS mengasumsikan peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Pencapaian RLS baik perempuan maupun laki-laki terjadi peningkatan walau sangat kecil. Komponen rata-rata lama sekolah perempuan Tahun 2019 selama 7,82 tahun, pada Tahun 2020 selama 7,90 tahun, Tahun 2021 selama 8,01 tahun, pada Tahun 2022 selama 8,19 tahun dan pada Tahun 2023 selama 8,33 tahun atau setara dengan awal kelas 2 SMP. Sedang RLS laki-laki Tahun 2019 selama 8,54 tahun, Tahun 2020 selama 8,57 tahun, Tahun 2021 selama 8,58 tahun, Tahun 2022 selama 8,59 tahun dan tahun 2023 selama 8,67 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Pada dimensi ekonomi/standar hidup layak diwakili komponen pengeluaran perkapita disesuaikan. Capaian pengeluaran perkapita perempuan Tahun 2019 sebesar 9.510 ribu rupiah, Tahun 2020 turun menjadi sebesar 9.289 ribu rupiah, Tahun 2021 naik menjadi 9.290 ribu rupiah, Tahun 2022 naik menjadi 9.625 ribu rupiah dan Tahun 2023 naik menjadi 9,888 ribu rupiah. Sedang pengeluaran perkapita laki-laki dari sebesar 15.154 ribu rupiah pada tahun 2019 turun menjadi 14.748 ribu rupiah pada Tahun 2020, pada Tahun

2021 naik menjadi sebesar 14.821 rupiah, Tahun 2022 sebesar 15.371 ribu rupiah dan Tahun 2023 sebesar 15,885 ribu rupiah. Pengeluaran perkapita laki laki jauh diatas perempuan dengan kesenjangan tahun 2019 sebesar 5.644 ribu rupiah, Tahun 2020 kesenjangan sebesar 5.459 ribu rupiah, Tahun 2021 kesenjangan sebesar 5.531 ribu rupiah, Tahun 2022 kesenjangan sebesar 5.746 ribu rupiah dan tahun kesenjangan sebesar 5.997 ribu rupiah. Pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan pendapatan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya covid 19.

Pada Provinsi Sumatera Selatan pencapaian ketiga komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) ketimpangan yang paling besar terjadi pada dimensi ekonomi/standar hidup layak yaitu pengeluaran perkapita berdasarkan jenis kelamin. Pengeluaran perkapita perempuan jauh dibawah laki-laki. Untuk menghitung dimensi ini diperlukan data sekunder yaitu upah yang diterima, jumlah angkatan kerja serta jumlah penduduk.

Berdasarkan Data BPS, Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 68,77%, TPAK laki-laki 82,66% sangat jauh disbanding TPAK perempuan 54,54 %. Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 69,31 %, TPAK laki-laki 84.95 % dan TPAK perempuan 53,32 %, menurun dibanding Tahun 2021. Pada Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan meningkat sebesar 70,72%, TPAK laki-laki 85,39% dan TPAK perempuan 55,54%, naik dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.9 TPAK Sumsel Tahun 2021 - 2023

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Provinsi Sumatera Selatan		
	2021	2022	2023
Laki-Laki	82,66	84,95	85,39
Perempuan	54,54	53,32	55,54
Jumlah	68,77	69,31	70,72

Sumber : BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional)

Walaupun di Sumatera Selatan kesempatan perempuan untuk mendapat pekerjaan sudah memiliki peluang cukup besar, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ranah publik identik dengan laki- laki, sementara itu ranah domestik (rumah tangga) identik dengan perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep laki-laki mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya

kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya pekerja perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjaannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gap pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.



Target capaian Indeks Pembangunan Gender pada akhir periode RPD 2024-20026 diharapkan sebesar 95,93 dimana dibutuhkan peningkatan sebesar 2,34 dalam 2 tahun ke depan, sedangkan tren capaian IPG meningkat hanya 0,3 dari tahun sebelumnya sehingga

memerlukan upaya terintegrasi dari berbagai sektor dengan kolaborasi Pentahelix dari Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Masyarakat dan Media.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun 2019 s.d 2024 Ini mengalami penurunan 2019 s.d 2022 dan mengalami peningkatan tahun 2023 dan 2024 hal ini berarti masih ada kesenjangan agar tercapai target yang ditetapkan.



Pencapaian Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak bisa dilepaskan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua nilai indeks ini menggambarkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada suatu wilayah, sehingga peningkatan capaian indeks ini merupakan masalah lintas sektoral sehingga upaya yang dilakukan melibatkan semua elemen masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai *stakeholder* terkait dalam upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi utama yang dilaksanakan untuk mengawal agar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan sama besar baik laki-laki maupun perempuan dengan melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Pelaksanaan strategi PUG dilakukan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dengan berbagai metode, diantaranya Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Dengan adanya GAP dan GBS ini suatu organisasi dapat menganalisis sesuai data apakah apakah kondisi yang ada sudah responsif gender, jika masih ada kesenjangan yang besar maka kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat responsif gender sesuai kebutuhan.

Hambatan/Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan IPG

Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersusun dari tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan IPG melalui Pengarusutamaan Gender (PUG), mulai dari proses perencanaan sampai implementasi. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan *cross cutting issue* atau isu lintas sektoral artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergi dengan semua pihak.



Di Provinsi Sumatera Selatan komitmen Kepala daerah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan, dibentuknya Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan serta diikuti dengan pembentukan *Focal Point* di OPD Provinsi serta Pada Tahun 2020 kembali dikeluarkannya kebijakan Peraturan Gubernur 62 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah sebagai wujud komitmen Pembangunan Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun hambatan/ kendala yang dihadapi dalam meningkatkan IPG , khususnya melalui strategi PUG antara lain :

- Belum optimalnya komitmen dari para pemangku kebijakan dan ketersediaan kebijakan pelaksanaan PUG dalam seluruh aspek pembangunan, misalnya belum semua kabupaten/kota mengintegrasikan isu gender dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, belum adanya kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG.
- Belum optimalnya kelembagaan PUG di daerah, seperti Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Tim Teknis dan Focal Point di OPD.
- Masih terbatasnya Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana) yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah.
- Belum optimalnya ketersediaan data terpilah yang diperlukan dalam proses penyusunan program kegiatan pembangunan responsif gender.
- Belum optimalnya sinergi antar *stakeholders* yang berperan dalam peningkatan komponen IPG.
- Stereotip dan Budaya Patriarki dimana banyak masyarakat masih terperangkap dalam pola pikir patriarki yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan publik. Hal ini dapat menghambat pemberdayaan perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik di ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Stereotip gender ini sering mempengaruhi pilihan pendidikan dan karier perempuan, serta mengurangi peluang mereka untuk berkembang.
- Peran Ganda Perempuan, banyak perempuan terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau di keluarga berpendapatan rendah, masih menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pengurus rumah tangga dan pekerja. Beban ganda ini sering kali menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan yang dapat meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka.
- Masih adanya ketimpangan Ekonomi, perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pekerjaan yang setara dengan laki-laki, serta kesenjangan gaji yang besar. Ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.

- Masih tingginya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap perempuan dan anak, baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik, masih menjadi masalah besar. Meskipun ada upaya hukum untuk melindungi mereka, implementasi undang-undang seringkali kurang maksimal, dan stigma sosial sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan.

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan IPG

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan IPG melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan oleh Pokja Pengarusutamaan Gender yang dimotori oleh *Four Driver* yaitu Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan DPP-PA) antara lain :

- Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG.
- Melakukan pendampingan kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- Mendorong terbentuknya *Focal Point* di OPD sebagai corong pelaksanaan strategi PUG di instansi masing-masing.
- Melakukan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Membuat kesepakatan dengan seluruh Driver PUG Kabupaten/Kota serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang paham PUG dengan melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas.
- Mendorong OPD dan *stakeholders* untuk tersedianya Data Terpilah dan Penggunaan data berbasis gender dalam perencanaan Pembangunan.
- Melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan komponen IPG dan Implementasi PUG.
- Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, OPD Responsif Gender dan Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan.
- Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* antara lain :
 - Melakukan kerjasama dengan akademisi melalui Pusat Studi Gender dan Anak dengan dua Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Sriwijaya dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang.
 - Melakukan kerjasama dengan *Non Government Organisation* (NGO) seperti ICRAF (Kegiatan *Land 4 Lives*) dan SPIRE, terkait dengan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

- Bersinergi dengan berbagai lembaga layanan pemberdayaan perempuan, organisasi wanita, dunia usaha dan media di Provinsi Sumatera Selatan.
- Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 - Mendukung perempuan dalam kewirausahaan: Program pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pembinaan bagi perempuan untuk membuka dan mengelola usaha.
 - Akses yang setara ke pasar tenaga kerja: Kebijakan yang memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memasuki pasar kerja dan mendapatkan upah yang setara.
 - Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor formal: Mengurangi hambatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor formal dengan menyediakan fasilitas yang mendukung.
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik: Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, seperti penerapan kuota gender dalam lembaga legislatif.
- Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta memastikan adanya akses ke bantuan hukum dan psikososial.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Provinsi Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing melalui E- Kinerja.

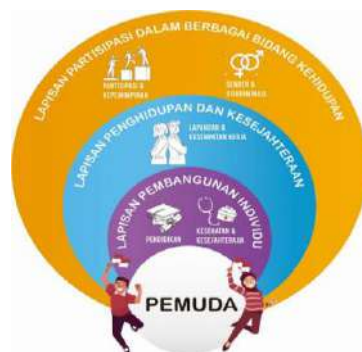
Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Pengarusutamaan Gender dalam setiap aspek pembangunan dapat membuat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan gender. Sehingga dalam pembangunan terwujud keadilan dan kesetaraan gender.

7.3 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya.

Secara umum tiga lapisan pembangunan pemuda yang dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar Framework Pembangunan Pemuda

IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Nilai dari IPP ini dirilis setiap tahun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Bappenas dan BPS.



Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 54% dari target sebesar 70%. Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 23,78% pemuda di wilayahnya (Statistik Pemuda Indonesia, 2024) dan mencatatkan peningkatan IPP sebesar 2,67 poin,



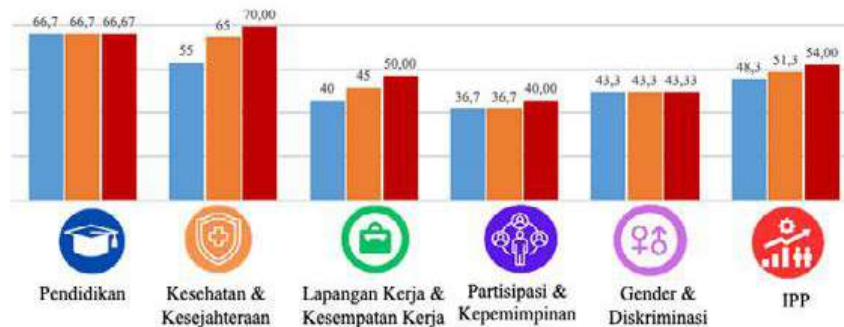
menjadi 54 dari 51,33 pada tahun 2023. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan, serta domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 3 poin. Domain partisipasi dan kepemimpinan juga meningkat menjadi 40 dari 36,67. Sedangkan domain pendidikan serta domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi di angka 66,67 dan 43,33. Jika dibandingkan dengan nilai nasional, hanya domain lapangan dan kesempatan kerja (50) yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional (45). Sedangkan domain pendidikan (66,67), partisipasi dan kepemimpinan (40), serta gender dan diskriminasi (43,33) lebih rendah dibandingkan nasional. Domain kesehatan dan kesejahteraan setara dengan rata-rata nasional sebesar 70.

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi dan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam domain pendidikan, ketiga indikator capaian domain pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah rata-rata nasional. Pemerintah perlu menyusun kebijakan agar APK perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan tinggi, karena pada tahun 2024 memiliki selisih 4 poin (27,26%) dibandingkan nasional. Begitu pula APK sekolah menengah yang relatif lebih rendah (86,09%) daripada nasional, dengan rata-rata lama sekolah 10,85. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan adalah penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penyediaan bantuan fasilitas. Untuk meningkatkan APK perguruan tinggi maka perlu penyediaan beasiswa status mahasiswa jenjang Diploma/ Akademi Komunitas dan pembiayaan bagi pendidikan penyediaan beasiswa prestasi jenjang Diploma.

Selain itu, pada domain kesehatan dan kesejahteraan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyiapkan kebijakan untuk mengurangi persentase pemuda yang merokok (27,02%), karena lebih tinggi dibandingkan nasional (24,75%). Kebijakannya adalah pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA dan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga. Kemudian, pemerintah perlu memberikan perhatian pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi karena jumlahnya masih sangat rendah (1,66%) dibandingkan nasional (5,44%).

Rekomendasinya adalah pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi, koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi dan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan provinsi.



Gambar Perbandingan IPP dan Nilai Indeks Sumatera Selatan 2022-2024

Capaian IPP Sumatera Selatan di tahun 2024 menjadi capaian terbaik selama 5 tahun terakhir dan di tahun 2022 menjadi capaian terendah selama 5 tahun terakhir hal ini dipengaruhi oleh perbaikan pada seluruh domain IPP. Pada tahun 2024 provinsi Sumatra Selatan memiliki nilai IPP 54,00 meningkat dari tahun sebelumnya tapi masih di bawah rata-rata nasional hal ini karena didorong oleh adanya Peningkatan pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja dan Partisipasi dan Kepemimpinan pemuda.



Grafik 1.29 Gambar Nilai IPP Sumatera Selatan dan Nasional 2020-2024

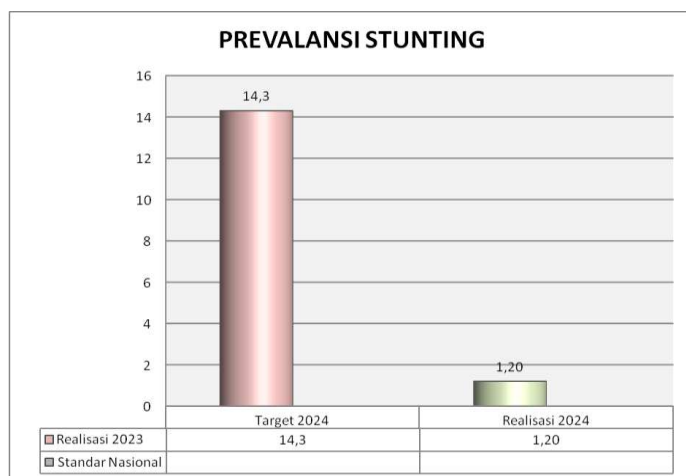
Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Provinsi Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing melalui E- Kinerja.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

7.4 Prevalansi Stunting

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2 tahun pertama kehidupan seorang anak (Black et al., 2008). Anak dengan stunting memiliki IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang normal (Grantham-McGregor et al., 2007). Stunting pada balita merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian, menurunkan kemampuan kognitif dan perkembangan motorik rendah serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang. Diketahui bahwa persentase stunting pada anak Balita di Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 20.3%. (**sumber : SSGI Thn. 2023**) . Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 22,5% maka capaian tahun 2023 telah melebihi dari target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 109,78%. Angka stunting nasional berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 30,8%, jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian stunting provinsi Sumatera Selatan sebesar 20.3% lebih baik dari capaian nasional.

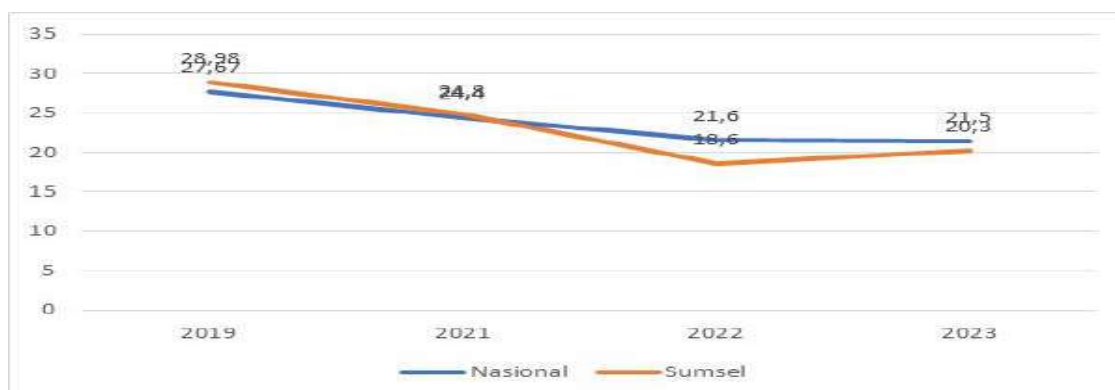


Grafik 1.30 Prevalensi Stunting Tahun 2024

Prevalansi Stunting Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 Berdasarkan data dari E-PPGM Provinsi Sumatera Selatan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting pada Balita tahun 2024 **telah melebihi dari target** yang telah ditetapkan. Prevalensi Stunting pada Balita Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 di targetkan 14 persen dan terealisasi sebesar 1,2

persen (**sumber data : E-PPGM Tahun 2024**). Merujuk dari data e-PPGM, Balita stunting pada tahun 2024 **sebanyak 6.834 balita atau sebanyak 1,2 persen** dari jumlah balita yang di ukur tinggi badannya. Balita gizi kurang pada tahun 2024 sebanyak 9.694 balita dan yang mendapat intervensi pemberian makanan tambahan sebanyak **9.290 Balita (95,83%)**. Balita gizi buruk sebanyak 233 balita, yang mendapat perawatan sebanyak **224 Balita atau 96,1%**.

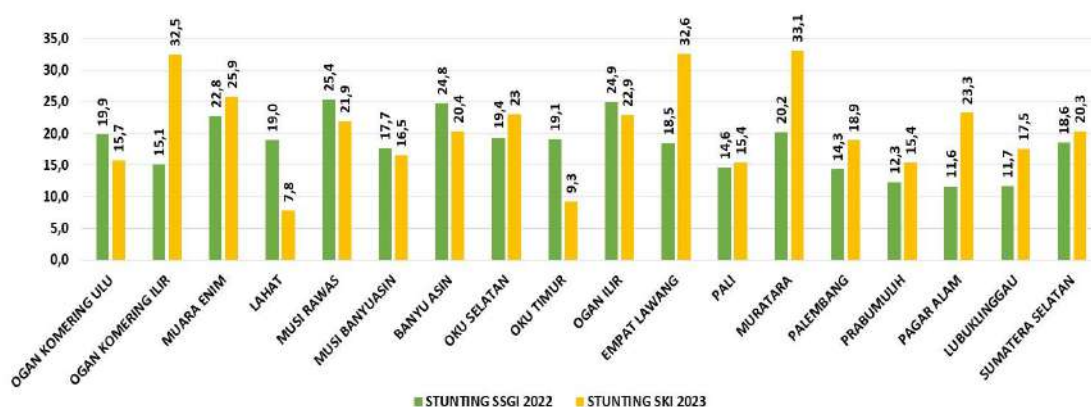
Berikut grafik capaian Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (SSGI).



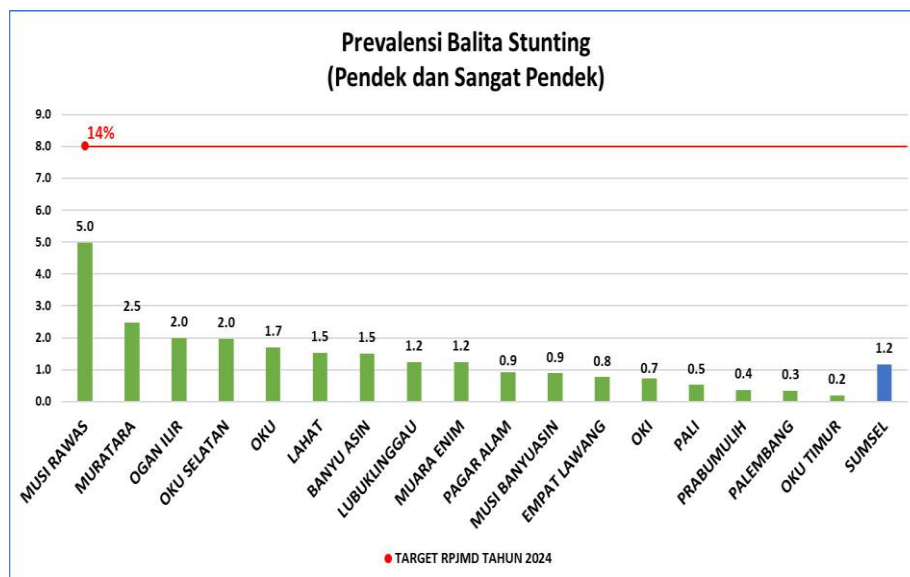
Sumber : SSGBI 2019, SSGI 2021-2022, SKI Tahun 2023

Grafik 1.31 Tren Prevalensi Stunting Sumsel dan Nasional 2019-2023

Tren Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan 2023



Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh. Rata-rata angka stunting Indonesia adalah 21,5 %, Rata-rata Stunting di provinsi Sumsel 20,3%. Terdapat 9 Kabupaten/kota yang prevalensi stunting nya di atas capaian provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Rawas, Banyu Asin, Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara dan Kota Pagar Alam. Prevalensi Balita Stunting yang dibawah 10%.



Grafik 1.32 Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten / Kota Tahun 2024

Sumber : e-PPGM Tahun 2024

Tiga kabupaten dengan angka Prevalensi Stunting tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Rawas yaitu sebesar 5%, kemudian Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 2,5% dan Kabupaten ogan Ilir sebesar 2%.

Faktor-faktor penghambat Prevalensi Stunting pada Balita di beberapa Kabupaten/Kota Sumatera Selatan antara lain :

1. Kurangnya akses ke makanan bergizi.
2. Kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil dan anak saat masa pertumbuhan.
3. Angka kunjungan balita ke Posyandu masih rendah.
4. Kunjungan ibu hamil untuk ANC ke Puskesmas kurang optimal; pemeriksaan, Tekanan Darah bumil, edukasi; resiko BBLR, PBLR dan Prematur.
5. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta jamban
6. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum, saat dan setelah kehamilan mempengaruhi pertumbuhan janin.
7. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan saat kehamilan.
8. Kehamilan yang tidak disadari atau terlambat disadari.

Berbagai Upaya yang telah dilakukan dalam Penanggulangan Stunting yaitu :

1. **Total Anggaran Stunting Tahun 2024 sebesar Rp195.822.238.513,-**, dengan anggaran Stunting yang langsung ke Bayi, Balita dan ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar Rp80.013.881.655,-.
2. Intervensi bagi bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berupa pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan. Jumlah Ibu

Hamil KEK sebanyak 8.542 bumil dan yang mendapatkan makanan tambahan sebanyak 8.010 bumil (93,8%).

3. Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil, dari jumlah 109.526 Ibu hamil, yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet sampai bulan ini sebanyak 103.367 orang (94,38%).
4. Pengadaan Tabel Tambah Darah bagi Remaja Putri, dari jumlah 430.427 remaja putri, yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah lengkap sebanyak 362.764 orang (73,5%).
5. Pengadaan Vitamin dan Pelatihan Manajemen Tata Laksana Gizi Buruk, dari jumlah kasus gizi buruk sebanyak 233 balita, sebanyak 224 balita (96,1%) mendapat pelayanan tata laksana gizi.
6. Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
7. Penyediaan Alat Antropometri Kit di Posyandu
Pengadaan alat antropometri kit sebanyak 460 unit melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan bagi Posyandu yang belum memiliki alat Antropometri Kit atau Posyandu yang alat Antropometri Kit belum standar.
8. Kemitraan bersama BKKBN Perwakilan Sumsel dengan pemanfaatan data e-PPGBM Dinas Kesehatan.

Upaya Yang Akan Dilakukan Dalam Penanggulangan Stunting yaitu :

1. Pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis.
2. Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil dan Remaja Putri.
3. Pelatihan Konseling Menyusui ASI eksklusif.
4. Pengadaan Vitamin dan Pelatihan Manajemen Tata Laksana Gizi Buruk.
5. Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penurunan Stunting, sebesar Rp6.625.541.000,-.

Program terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menurunkan stunting pada balita sebagai berikut :

1. Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS)

Melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/SE/DINKES/2024 tanggal 09 Januari 2024 Tentang Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Kemitraan bersama BKKBN Perwakilan Sumsel dengan pemanfaatan data e-PPGBM Dinas Kesehatan Saat ini sebanyak 3.258 anak stunting yang mendapat BAAS dan akan terus bertambah.

2. Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 095/SE/DINKES/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Kegiatan dilaksanakan di 17 kabupaten/kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengukuran bayi/Balita serta ibu hamil dilaksanakan selama bulan Juni 2024 dengan target 90% bayi/Balita dan ibu hamil di periksa kesehatannya di Posyandu, kemudian pada bulan Juli – September dilakukan intervensi bagi bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berupa pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan.



3. Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yang bertujuan untuk melaksanakan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing melalui E- Kinerja.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Prevalensi Stunting pada Balita di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui :

Sumber APBD

yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya yang Telah Dilakukan dalam Penanggulangan Stunting

Intervensi Spesifik

No.	Indikator yang diintervensi	Uraian Kegiatan
1.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi Target tahun 2024 : 12%	Workshop Konsumsi Gizi Makanan Tambahan Lokal.
2.	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan Target tahun 2024 : 87%	Monev Pelayanan Kesehatan Ibu dan BBL sesuai standar di Kabupaten/Kota. Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting.
3.	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Target tahun 2024 : 50%	Workshop Implementasi Sekolah/Madrasah Sehat Terkait Peningkatan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri melalui zoom meeting Pembinaan Bagi Kab/Kota Terkait Peningkatan Cakupan Rematri Minum TTD : kegiatan hanya dilaksanakan di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Selatan
4.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif Target tahun 2024 : 60%	Pelatihan Konseling Menyusui Monitoring dan Evaluasi Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi

5.	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Target tahun 2024 : 80%	Pelatihan Edukasi Gizi pada 1000 HPK dengan Metode Emo demo Bagi Petugas Kesehatan.
6.	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Target tahun 2024 : 92%	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) MTBS dan Tatalaksana Gizi Buruk.
7.	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya Target tahun 2024 : 85%	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDIDTK dan PMBA. Lomba Balita Indonesia. Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah sesuai Standar di Kabupaten./Kota.
8.	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi Target tahun 2024 : 80%	Pertemuan Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak Termasuk Masalah Gizi (<i>Weight Faltering, underweight</i> , gizi buruk dan Stunting)

Upaya yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Stunting

Intervensi Sensitif

No.	Indikator yang diintervensi	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional Target tahun 2024 : 98%	Kontribusi iuran jaminan kesehatan bagi kepesertaan PBI-JK.	Pembayaran kontribusi PBI-JK per Triwulan sesuai hasil rekonsiliasi dengan BPJS.
		Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3.	Pembayaran kontribusi PBPU dan BP Kelas 3 per Triwulan sesuai hasil rekonsiliasi dengan BPJS.
		Advokasi kepesertaan PBI-JK di Kabupaten/Kota.	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Mei 2024.
		Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS di Kabupaten/Kota.	Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juli 2024.
2.	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) Target tahun 2024 : 70%	Verifikasi Program STBM Provinsi.	Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juli 2024.

3.	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Target tahun 2024 : 70%	Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan PKAM melalui Kegiatan SKAM di Kabupaten/Kota.	Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juni 2024.
		Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Kegiatan telah dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2024.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut Prevalensi Stunting pada Balita di Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Kesehatan akan terus meningkatkan upaya memperbaiki status gizi (penurunan stunting pada balita), peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan dan perbaikan Kesehatan lingkungan, dengan melakukan peningkatan Upaya tersebut, diharapkan akan lebih menurunkan Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Selatan. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dimana merupakan tujuan dari RPD Provinsi Sumatera Selatan.

Meningkatkan Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

8

Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan menurunkan Risiko Bencana

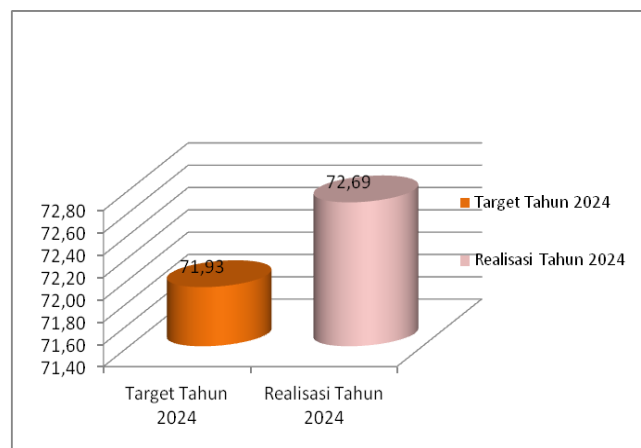
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93	72,69	101,06
8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04	20,20	251,24
8.3	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,53	131,24	103,87

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan menurunkan Risiko Bencana adalah sebagai berikut :

8.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 ditargetkan 71,93 dengan realisasi 72,69 sebesar (101,06%) sudah melebihi standar yang telah ditetapkan, nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu.



Perhitungan Indikator Nilai IKLH



Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2024 ditargetkan 71,93 dengan realisasi sebesar 72,69 (9101,06) sehingga untuk tahun 2024 nilai IKLH sudah melebihi target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan IKLH tahun 2023 yaitu 70,20, capaian IKLH di tahun 2024 yaitu 72,69 maka terjadi peningkatan capaian. Perhitungan

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 dan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada bulan Desember 2014 Indikator yang dimasukan ke dalam perhitungan terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Hasil perhitungan, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2024 yaitu **90,25** Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu **59,54**, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yaitu **79,71** dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu **44,52**. Sehingga didapat nilai IKLH sebesar **72,69**.

Rumus Perhitungan Nilai IKLH adalah:

$$\begin{aligned}
 &= (0,428 \times \text{IKU}) + (0,340 \times \text{IKA}) + (0,133 \times \text{IKTL}) + (0,099 \times \text{IKAL}) \\
 &= (0,428 \times 90,25) + (0,340 \times 59,54) + (0,133 \times 44,52) + (0,099 \times 79,71) \\
 &= 72,69
 \end{aligned}$$

Analisis dan Evaluasi

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2023 yaitu **70.20**, capaian IKLH di Tahun 2024 yaitu **72.69**, terjadi penurunan capaian. Esensi dari nilai IKLH di atas adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka **90,25**.

Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 90.25. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 87.76 maka terjadi peningkatan sebesar 2.49. Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan dalam 1 tahap, pemantauan dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan Oktober 2024 mewakili data pemantauan untuk musim kemarau dan hujan. Pemantauan udara ambien perkotaan di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dipantau melalui 94 titik pantau, setiap ibu kota kabupaten/kota memiliki 5 titik pantau untuk kota kecil, 7 titik pantau untuk kota sedang, dan 10 titik pantau untuk kota metropolitan. Daerah perkotaan sesuai dengan luasan wilayah dan titik-titik yang tenggarai rawan pencemaran udara. Pengambilan sampel udara ambien ini dibagi 2 cara, untuk parameter suhu udara, kelembaban, arah angin dan kecepatan angin, dilakukan secara in situ (langsung di lapangan). Untuk parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, HC, TSP, PM_{10/2,5}, dan Pb pengambilan sampelnya dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Kegiatan pemantuan kualitas udara ambien otomatis dilakukan menggunakan peralatan AQMS dan mencetak data konsentrasi harian maupun ISPU harian parameter gas maupun partikulat, sedangkan kegiatan perawatan AQMS yang meliputi pengecekan, melakukan perawatan, troubles shooting dan melaporkan kondisi peralatan yang ada di stasiun pemantauan kualitas udara ambien AQMS, outdoor display maupun indoor display yang dilaksanakan setiap dua hari sekali oleh petugas yang ditunjuk.

Ketersediaan data menjadi hal penting dalam hal perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara Ambien. Umumnya data didapat dan terjaring (data captured) di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah dan tidak memenuhi syarat untuk mewakili data rata-rata tahunan keseluruhan untuk Penentuan Standar Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup khususnya kualitas udara. Secara keseluruhan kualitas udara di 17 (lima belas) kota dalam Provinsi Sumatera Selatan 94 titik yang dipantau jika di bandingkan dengan baku mutu udara ambien atau nilai ambang batas rata-rata masih dibawah standar namun di

beberapa titik pantau melampaui ambang batas yang berlaku berdasarkan Pergub 17 Tahun 2005.

2. Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka **59,54**.

Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 59,54 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 58,16 maka terjadi peningkatan sebesar 1,38. Indeks Kualitas Air tahun 2024 adalah 59,54, bila dibandingkan tahun 2023 adalah 58,16 terjadi peningkatan capaian sebesar 1,38, akan tetapi terdapat tren penurunan pada target capaian sebesar 7,14. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter **TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO₃-N, Sulfida** dan **Cyanida**.

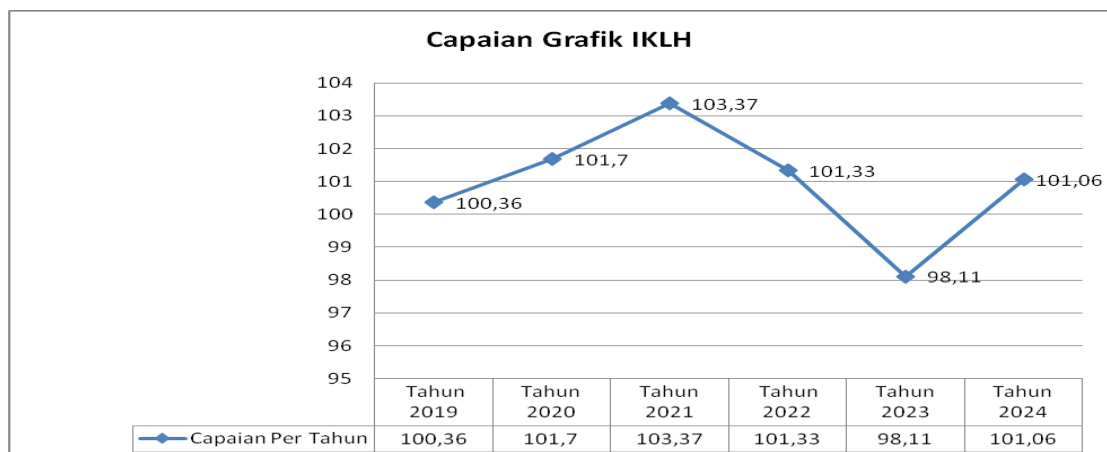
3. Indeks Kualitas Air Laut **79,71**.

Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan perhitungan memiliki angka 79,71, apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 2023 adalah sebesar 70,37 maka terjadi peningkatan sebesar 9,34. Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Pemantauan Kualitas air laut berdasarkan perhitungan memiliki angka **79,71**.

4. Indeks Kualitas Lahan 44,52

Indeks Kualitas Lahan secara perhitungan berdasarkan website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 menunjukkan angka 44,52. bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 44,38 maka terjadi peningkatan sebesar 0,14. Indeks Kualitas Lahan yang masuk kategori paling rendah itu dikatakannya dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Untuk memperbaiki tutupan lahan tidak bisa dengan waktu yang singkat mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan harus memakan waktu lama, serta menaikkan poin IKTL, dalam setahun kenaikannya kemungkinan hanya nol koma, Indikator penilaian IKLH untuk tutupan lahan itu dilakukan oleh pemerintah pusat.

Grafik 1.34 Perbandingan Nilai IKLH per Tahun 2019 s.d 2024



Capaian IKLH dari tahun 2019 s.d 2024 dilihat dari grafik diatas pada tahun 2019 s.d 2021 mengalami fluktuasi peningkatan dan pad tahun 2022 s.d 2024 terjadinya dampak penurunan yang signifikan serta meningkat kembali capaiannya pada tahun 2024. Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 nilai IKLH mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, untuk Tahun 2015 terdapat penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan nilai tutupan hutan pada Tahun 2015 akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang cukup panjang yang melanda beberapa kawasan hutan di Sumatera Selatan. Pada Tahun 2017 nilai IKLH terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2016, hal ini disebabkan adanya perubahan fungsi hutan/lahan dan kebakaran hutan seluas 9286 Ha dengan jumlah hotspot 1204 titik yang terbesar di 17 kabupaten/kota sedangkan tahun 2016 luas kebakaran hutan hanya 978 Ha dengan jumlah hotspot 973 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota sehingga target Renstra dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 belum tercapai. Sedangkan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu sebagai berikut :

- Pada tahun 2018 dan 2019 nilai IKLH mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan, akibat meningkatnya upaya perbaikan fungsi lahan/hutan, seperti kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan.
- Pada tahun 2020 nilai IKLH melebihi target 67.40 Hal ini disebabkan capaian IKA, IKU dan IKL yang meningkat dikarenakan adanya pandemic Covid 19 dimana aktivitas masyarakat berkurang, curah hujan yang cukup tinggi di tahun 2020 serta tidak terjadi kebakaran hutan.
- Pada tahun 2021 nilai IKLH tidak mencapai target, hal ini disebabkan penurunan Indeks Kualitas Air. Hal ini dapat dilihat dari 68 titik lokasi pantau di Tahun 2021 yang berstatus tercemar berat. Hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian

kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO3-N, Sulfida dan Cyanida. Walaupun IKLH tidak mencapai target namun pencapaian IKLH meningkat dari tahun 2020 sebesar 68,53. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 ada perubahan metode perhitungan dengan adanya tambahan indikator IKAL.

- d. Tahun 2022 nilai IKLH melebihi target, hal ini disebabkan perbaikan kualitas udara dan lahan, akibat meningkatnya upaya perbaikan fungsi lahan/hutan, seperti kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan.
- e. Tahun 2023 nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 70,20 dari tahun 2022 sebesar 72,12 atau 1,92 hal ini disebabkan indeks kualitas air menurun akibat meningkatnya pemanfaatan wilayah sungai untuk pembangkit listrik di wilayah Kabupaten OKU, Muara Enim dan Musi Banyuasin serta bertambahnya jumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan. Selain itu juga menurunnya nilai indeks kualitas udara dikarenakan kondisi global *el-nino* yang memicu kebakaran hutan dan lahan, serta volume kendaraan untuk transportasi dalam kota meningkat akibat banyaknya kunjungan masyarakat setelah adanya jalan tol.
- f. Tahun 2024 nilai IKLH mengalami peningkatan sebesar 72,69 dari tahun 2023. Hal ini disebabkan Implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Untuk IKL meningkat karena adanya penambahan luas RTH. Peningkatan IKAL dikarenakan adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir laut.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKLH	72,69	73.55	98,83

Perbandingan nilai IKLH Tahun 2024 dengan target jangka menengah sampai dengan Tahun 2024 dan Target Nasional Tahun 2024 :

Tahun 2024 nilai IKLH Provinsi Sumatera Selatan belum melampaui target Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan menurunnya kualitas udara akibat dampak *global el-nino* serta kebakaran hutan volume kendaraan yang menyebabkan polusi udara tercemar dan lahan. Capaian IKLH Provinsi



Sumatera Selatan hampir mencapai realisasi IKLH nasional. Hal ini didukung dengan Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Untuk IKL meningkat karena adanya penambahan luas RTH. Peningkatan IKAL dikarenakan adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir laut.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui :

Sumber APBD:

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan kualitas air dan udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut nilai indeks kualitas air dan udara di Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Provinsi Sumsel.

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan/Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKLH	72,69	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	Menunjang
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	100%	Menunjang
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Penurunan Emisi GRK	72,69 20,20	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan	72,69	Menunjang
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100%	Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	Menunjang
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	100%	Menunjang

8.2 Persentase Penurunan Emisi GRK



Grafik 1.35 Persentase Penurunan Emisi GRK Tahun 2024

Capaian atau realisasi Persentase Penurunan Emisi GRK pada Tahun 2023 adalah sebesar 20,20 dari target sebesar 7,14. Baik capaian untuk Tahun 2023 maupun Tahun 2024 keduanya

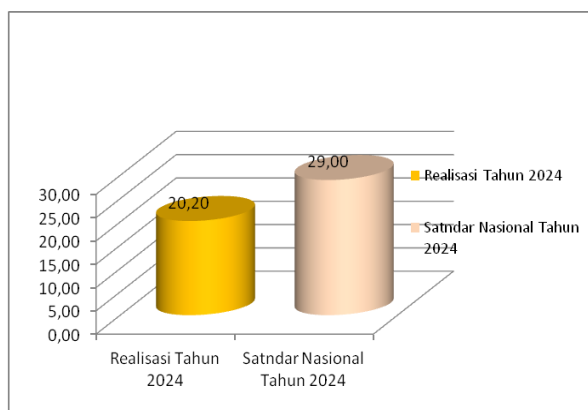
mencapai target. Untuk tahun 2024 target penurunan emisi Gas

Rumah Kaca adalah 8,04% dengan capaian sebesar 20,20%. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terdapat di lapisan troposfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah. Gas rumah kaca secara alami terdapat di atmosfer yang menjaga suhu bumi tetap hangat, jika tanpa gas rumah kaca maka suhu di bumi akan sangat dingin dan sulit untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.

Persentase penurunan emisi GRK Pada tahun 2022, realisasi penurunan GRK mencapai **118,2 juta ton CO₂**, jumlah tersebut melebihi target yang dicanangkan penurunan emisi pada tahun 2023 sebesar 116 juta ton CO₂. Realisasi penurunan emisi GRK terbesar sektor energi, dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan. **Emisi GRK global per kapita sedikit meningkat pada tahun 2022 (0,4%) sehingga peningkatan keseluruhannya antara tahun 1990 dan 2022 mencapai 8,3% (dari 6,24 t CO₂ eq/kapita menjadi 6,76 t CO₂ eq/kapita)** . Intensitas emisi global per PDB PPP pada tahun 2022 mencapai nilai minimum 52 tahun sebesar 0,386 tCO₂ eq/k USD, 2% lebih rendah daripada tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun 2024 peningkatan emisi GRK sebesar 20,20 sebesar (251,24%) telah melebihi standar target tahun 2024 sebesar 8,04.

Persentase penurunan emisi GRK pada tahun 2024 realisasinya sebesar 20,20 telah melebihi target tahun 2026 sebesar 9,26. Sumatera Selatan memiliki target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ambisius, selaras dengan target nasional untuk mengurangi emisi sebesar 31,89% (dengan upaya sendiri) dan 43,2% (dengan dukungan internasional).





Persentase penurunan emisi GRK pada tahun 2024 sebesar 20,20% masih belum melampaui standar nasional 29%. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% tanpa syarat dan 41% bersyarat pada tahun 2030, yang diwujudkan melalui Nationally Determined

Contribution (NDC) dan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC). Sumatera Selatan memiliki target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ambisius, selaras dengan target nasional untuk mengurangi emisi sebesar 31,89% (dengan upaya sendiri) dan 43,2% (dengan dukungan internasional). Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 31,89% tanpa syarat dan 43,2% dengan dukungan internasional hingga tahun 2030.

Rencana Aksi Sumsel:

Upaya yang dilakukan Sumatera Selatan memiliki rencana aksi untuk mendukung target nasional ini, termasuk identifikasi sumber dan potensi penurunan emisi GRK di tingkat provinsi.

- **Contoh Program:**

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk menurunkan emisi GRK, telah mencapai 100% secara fisik dan 97,98% realisasi keuangan pada tahun 2022.

- **Pencapaian Sektor Energi:**

Hingga tahun 2023, penurunan emisi GRK dari sektor energi telah mencapai 123,22 juta ton CO₂, melampaui target sebelumnya sebesar 116,45 juta ton CO₂.

- **Target 2030:**

Pada tahun 2030, target penurunan emisi GRK di Indonesia adalah 358 juta ton CO₂.

- **Net Zero Emission:**

Indonesia menargetkan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050.

Alternative solusi yang dilakukan Sumatera Selatan berupaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui berbagai cara, termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta deforestasi, dan penerbitan Pergub 38/2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan Emisi GRK Sumsel 2010-2030 dengan target penurunan sebesar 11,79%.

Solusi Efektif Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

- Menghemat Penggunaan Energi Listrik. Pastikan untuk menggunakan energi listrik seperlunya **saja**.
- Ubah Penggunaan Pupuk Kimia Menjadi Pupuk Organik.
- Mengolah Limbah dari Peternakan.
- Melakukan Sertifikasi ISO 14065 bagi Perusahaan.

Namun berikut merupakan beberapa kebijakan pemerintah Sumatera Selatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca:

1. Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT):
2. Penggunaan peralatan hemat energi:
3. Penggunaan bahan bakar berbasis non fosil.
4. Penerangan jalan umum (PJU).
5. Pengolahan sampah.
6. Penerapan teknologi ramah lingkungan.
7. **Menghemat energi:** Mematikan lampu dan elektronik saat tidak digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, dan memilih penyedia listrik dengan energi terbarukan.
8. **Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor:** Menggunakan transportasi umum, bersepeda, berjalan kaki, atau menggunakan kendaraan listrik.
9. **Mengurangi penggunaan plastik:** Meminimalkan penggunaan plastik, seperti sedotan dan botol kemasan.
10. **Menanam pohon:** Menanam pohon dapat membantu mengurangi emisi karbon dengan menyerap CO₂ dari atmosfer.
11. **Mengurangi sampah:** Mengurangi sampah organik, mendaur ulang, dan mengurangi pemborosan.
12. **Menggunakan energi terbarukan:** Beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, atau hidroelektrik.
13. **Mengikuti program imbangi carbon offset:** Program ini bertujuan untuk menyeimbangkan karbon yang dihasilkan dengan oksigen yang dihasilkan di udara.
14. **Mendukung kebijakan yang mendorong pengurangan emisi karbon:** Mendukung kebijakan yang mendorong pengurangan emisi karbon di tingkat nasional dan global.
15. **Mengompensasi emisi:** Membayar proyek-proyek yang mengurangi atau mengompensasi emisi karbon.

Kita dapat mengurangi emisi dengan **beralih ke teknologi alternatif yang tidak memerlukan bensin (seperti sepeda dan mobil listrik) atau yang tidak memerlukan banyak bensin (seperti mobil hibrida)** . Menggunakan transportasi umum, carpooling,



bersepeda, dan berjalan kaki akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan mengurangi gas rumah kaca di atmosfer.

Kegiatan manusia (anthropogenik) telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, bahkan telah menimbulkan gas-gas jenis baru dalam lapisan atmosfer. Jenis GRK yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global adalah CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, dan SF₆. Dari semua gas tersebut yang menjadi GRK utama adalah CO₂, CH₄ dan N₂O.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah meratifikasi konvensi perubahan iklim, dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) yang merupakan kerangka kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.

Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2020 dengan target mencapai 26 % pada tahun 2020. Ketika target penurunan tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang telah diundangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dijabarkan bahwa target penurunan sebesar 10,16 % dari BAU hingga tahun 2020.

Target penurunan emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan meliputi lima sektor prioritas; Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi yang meliputi transportasi dan Industri, serta Pengolahan Limbah. Di dalam pertemuan Conference of The Parties (COP) yang ke 21 di Paris Perancis, Negara yang hadir harus membuat suatu komitmen baru untuk implementasi penurunan emisi GRK yang diharapkan tidak membuat kenaikan suhu hingga 2°C. Dalam pertemuan tersebut dibuatlah Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dari Indonesia. Target yang baru penurunan emisi GRK di Indonesia diubah menjadi 29 % tanpa bantuan dana dari luar atau 41 % dengan bantuan donor.

Seiring dengan perkembangan masa, rencana aksi daerah yang dicanangkan pada tahun 2012, telah mendekati akhir pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim tahun 2012, akan difinalisasi pada tahun 2020, sehingga harus dibuat suatu rencana baru yang akan dilaksanakan saat berakhirnya tahun 2020 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kaji ulang RAD GRK melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 dengan target penurunan sebesar 11,79 % dari BAU hingga tahun 2030.

Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang



ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tercapainya target nasional menurunkan emisi GRK. Inventarisasi GRK menjadi hal yang penting dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi GRK menjadi krusial karena menggambarkan seluruh emisi yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK namun belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang tidak dikendalikan tumbuh melampaui upaya penurunan emisi GRK. Informasi tersebut hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak.

Upaya inventarisasi menjadi koreksi untuk pengendalian emisi GRK secara keseluruhan. Melalui inventarisasi emisi GRK ini neraca emisi GRK selama satu tahun dapat dikuantifikasikan untuk menjadi pertimbangan bagi arah pengendalian yang lebih efektif. Agar inventarisasi emisi GRK dapat menjadi alat pantau yang efektif maka penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Melalui peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Capaian analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan persentase penurunan Emisi GRK yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

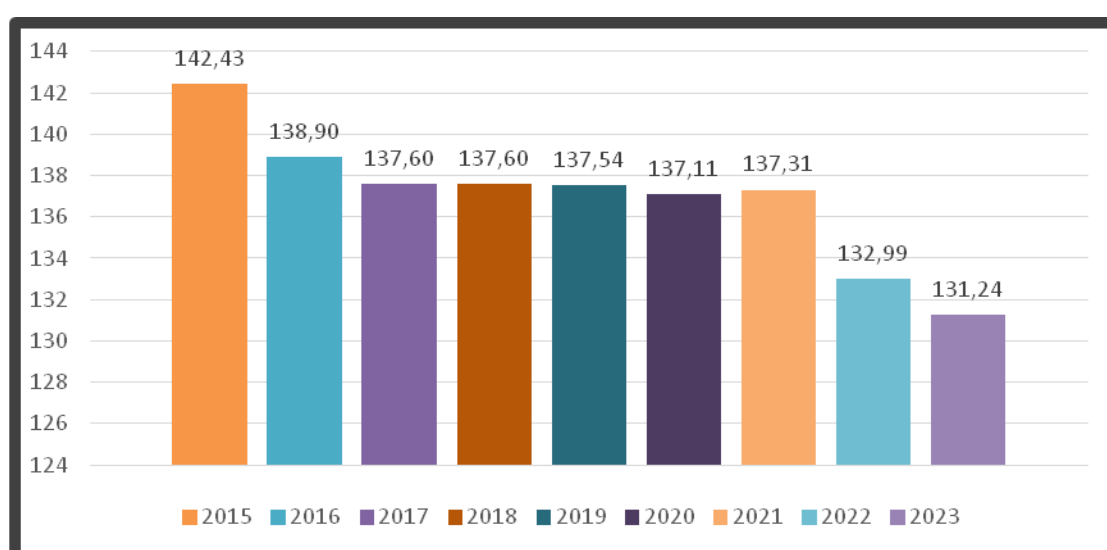
8.3 Indeks Risiko Bencana Sumsel

Indeks Risiko Bencana Sumsel ada beberapa potensi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi prioritas dalam pengurangan risiko bencana di 17 Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Banjir.
2. Banjir Bandang.
3. Cuaca Ekstrim.
4. Gelombang ekstrim dan Abrasi.
5. Gempa Bumi.
6. Kebakaran Hutan dan Lahan.
7. Kekeringan.
8. Letusan Gunung Api.
9. Tanah Longsor.
10. Kegagalan Teknologi.
11. Epidemii dan Wabah Penyakit.
12. Likuefaksi.
13. Pandemi COVID-19

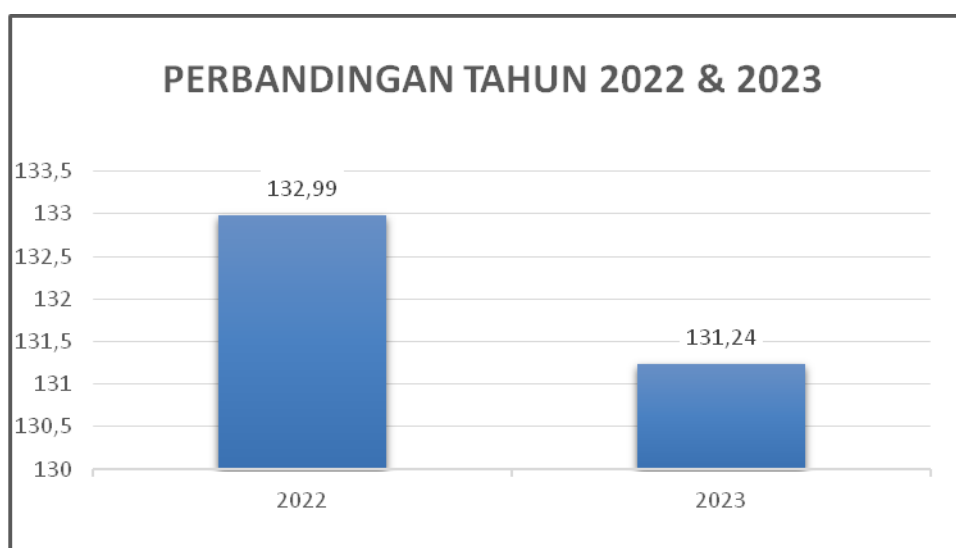
Bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumsel diantaranya karhutla, bansor, angin puting beliung, dan covid-19 tahun 2020 kemarin. Potensi bencana tersebut diatas perlu dilakukan pengurangan risiko agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Berikut ini dapat ditampilkan grafik penurunan IRBI di Sumsel tahun 2015-2023:

Grafik 1.36 Nilai IRBI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2023



Sumber: InaRISK

Dari grafik diatas Provinsi Sumsel telah berhasil melakukan penurunan risiko bencana. Berdasarkan grafik diatas nilai Indeks Risiko Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015-2023 adanya penurunan nilai IRBI, bukti adanya penurunan kerentanan dan penguatan kapasitas dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan. Angka penurunan IRBI memakai data tahun 2023 karena nilai IRBI tahun 2024 belum dikeluarkan oleh BNPB. Program kegiatan di BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah mengakomodasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dari tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Pada tahun 2026 BPBD akan meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik 1.37 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 & 2023

Pada tahun 2023 Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Sumatera Selatan masuk dalam kategori sedang dengan skor 131,24 yang sudah lebih baik dari target tahun 2022 dengan skor 132,99 dalam kategori sedang, terdapat penurunan sebesar 1,75. Sedangkan **penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional sebesar 3,77** dengan rincian tahun 2022 dengan skor 136,11 dan tahun 2023 dengan skor 132,35 diharapkan Sumatera Selatan bisa mendapat menurunkan indeks risiko untuk menjadi kategori rendah. Perbandingan ini masih memakai data IRBI tahun 2023, karena nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia belum dikeluarkan oleh BNPB RI.



Indek Resiko Bencana Sumse pada tahun 2024 terealisasi sebesar 131,24 dibandingkan dengan tahun 2026 masih kurang berapa point untuk mencapai 135,50, diharapkan kedepannya Provinsi Sumatera Selatan dapat mengatasi resiko bencana sedini



mungkin melalui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kinerja dan alternative solusinya melalui kebijakan dan regulasi yang telah dibuat sebagai komitmen untuk menanggulangi bencana. Provinsi Sumatera Selatan wilayahnya yang luas dan kondisi geografis yang beragam kerap menghadapi berbagai potensi bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Menyadari pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak terkait telah membangun sistem penanganan darurat bencana yang terintegrasi dan efektif. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana saat bencana terjadi seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan sistem peringatan dini dan memastikan informasi sampai ke masyarakat. Tim tanggap darurat termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, relawan, dan organisasi kemanusiaan segera bergerak ke lokasi bencana. Mereka membawa peralatan darurat, logistik, dan tenaga medis untuk memberikan bantuan secepat mungkin.

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Saat bencana terjadi, seperti gempa bumi, banjir bandang, atau tanah longsor, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi area terdampak dan mengirimkan tim pencarian. Tim ini terdiri dari personel terlatih seperti BPBD, TNI, Polri, SAR Nasional, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Mereka membawa peralatan khusus dan peralatan medis darurat, untuk menjangkau korban yang terjebak di lokasi yang sulit. BPBD Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana berjalan dengan baik dan lancar

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Indeks Risiko Bencana Sumatera Selatan yaitu : Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi, pelayanan pencegahan dan penanggulangan terhadap

bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

9

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)	74,58 (BB)	110,49

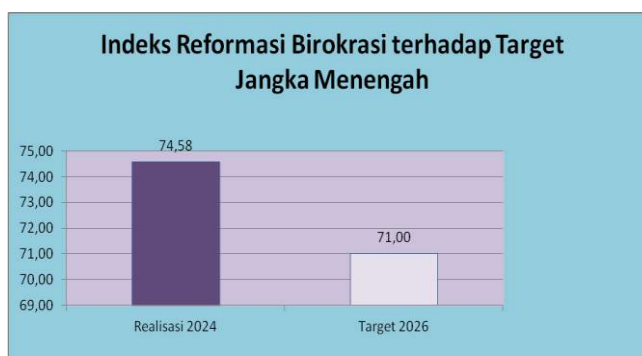
Capaian indikator kinerja dari sasaran Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut :

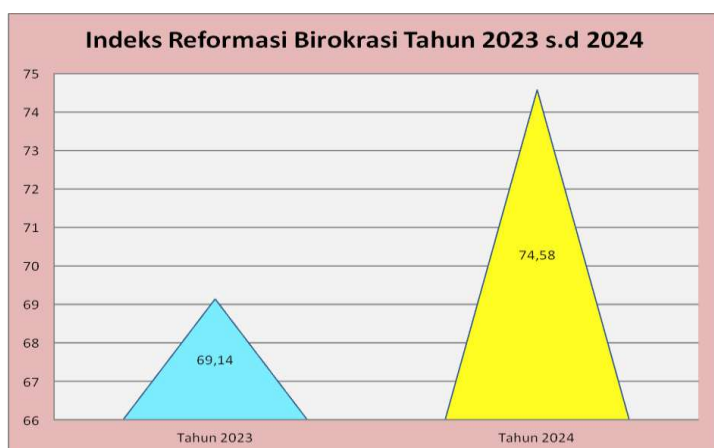
9.1 Indeks Reformasi Birokrasi



Berdasarkan Grafik diatas Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan nilai sementara (Proses sanggah ke Meso) di angka 74,58 dengan kategori BB dengan Predikat Sangat Baik dengan Capaian target 110,49%.

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 74,58 dengan kategori BB Predikat Sangat Baik telah melampaui target nilai yang telah ditetapkan pada tahun 2026 sebesar 71.





Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mempunyai nilai indeks RB sementara 74,58 dengan kategori BB dan Predikat Sangat Baik, untuk meningkatkan penyelenggaraan RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan studi banding nasional dengan

Pemerintah DKI Jakarta dengan nilai RB 84 dengan kategori A- dan Predikat Memuaskan dengan Catatan sebagai target Nasional dalam mencapai target pelaksanaan RB Provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik.

Perbandingan nilai Indeks RB Tahun 2023 yaitu 69,14 dengan Indeks RB Tahun 2024 adalah terdapat peningkatan nilai sebanyak 107,86% yang disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel selalu aktif melakukan monitoring dan evaluasi yang kemudian di implementasikan kedalam penyelenggaraan reformasi birokrasi terutama pada indikator-indikator strategis Reformasi Birokrasi seperti melakukan asistensi dengan Kementerian PAN & RB, Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Asistensi Internal dan lain sebagainya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengidentifikasi adanya efisiensi penggunaan kertas dan efektivitas waktu yang signifikan setelah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi Srikandi untuk administrasi Tata Naskah Dinas yang mulai berlaku pada bulan Oktober 2024.

Hambatan yang masih dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman ASN dalam mengimplementasi pelaksanaan RB.
2. Belum optimalnya sinergi perencanaan penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan target capaian pelaksanaan RB.
3. Belum optimalnya komitmen ASN dan pimpinan dalam mensinergikan pelaksanaan RB.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan monitoring yang dinamis dengan Rakor, Bimbingan, Sosialisasi dll.

2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan RB dengan mengadakan konsultasi dan asistensi langsung dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.
3. Membentuk Tim Pelaksana RB Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik.

Program/Kegiatan penunjang peningkatan indeks RB adalah : kegiatan Asistensi monitoring dan evaluasi Implementasi pelaksanaan RB dengan Kementerian PAN & RB , Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait, asistensi internal dengan Perangkat Daerah terkait dan lain sebagainya.

10

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
10.1	Nilai SAKIP	Nilai	A (85-86)	78,25	93,15

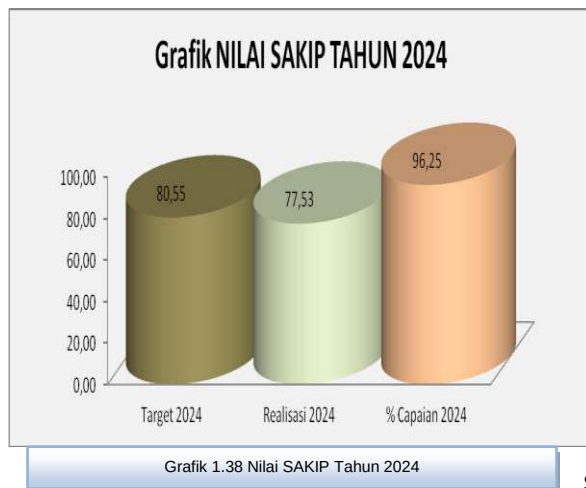
Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) adalah sebagai berikut:

10.1 Nilai SAKIP

SAKIP Provinsi Sumatera Selatan berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun fungsi sarana SAKIP yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.
3. Sarana pengelolaan dana dan sumber dana lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan secara terukur dan berkelanjutan.
4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.
6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.



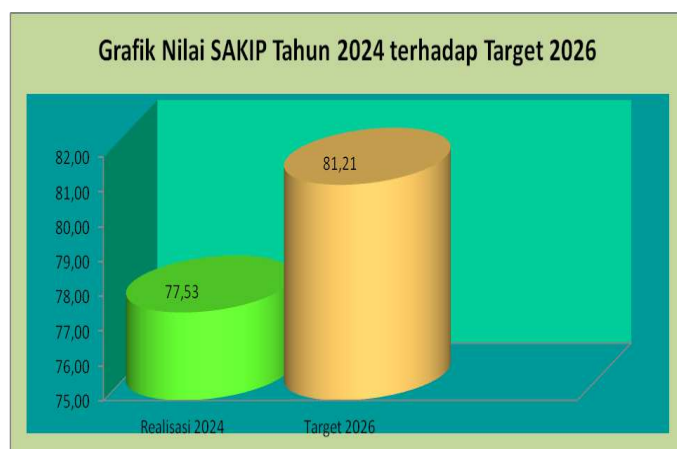
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 77,53 atau predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagian unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan

berbasis teknologi informasi dan hasil yang baik.



Capaian Nilai SAKIP dari tahun 2019 s.d 2024 mengalami peningkatan pada tahun 2021 bisa dilihat dari grafik diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dan penurunan ditahun 2022 hal ini disebabkan hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta penilainnya. Evaluasi tahun ini lebih

menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 78,28 atau sebesar 5,72 poin dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, serta akuntabilitas kinerja penanggulangan kemiskinan sudah ada perbaikan yang signifikan ditahun 2023. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, meskipun belum seluruhnya dapat diselesaikan sampai dengan saat ini. Pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan 0,72 poin dari tahun 2023 masih banyak yang perlu diperhatikan dalam perencanaan,



laporan dan revidi evaluasi.

Grafik disamping menunjukkan realisasi nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 77,53 belum mencapai target tahun 2026 sebesar 81,21 (A) diharapkan pada tahun tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mampu meningkatkan Nilai SAKIP yang berkualitas.

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi AKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Perencanaan Kinerja : RPD Tahun 2024-2026 belum dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya, Penyusunan RPD tahun 2024-2026 belum seluruhnya dilakukan berdasarkan hasil mekanisme perjenjangan kinerja, masih terdapat rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi outcome atau bersifat kegiatan/output, beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup, penjenjangan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan logis dalam mencapai kinerja, penetapan program belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas, kinerja individu belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi.
2. Pengukuran Kinerja : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan unit kerjanya belum melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dari rencana aksi kinerja, belum terdapat pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh



PD, belum ada upaya dalam perbaikan pengukuran kinerja melalui sistem informasi kinerja dalam mengawal pencapaian kinerja, tidak adanya informasi memadai terkait koordinasi dalam mencapai kinerja pembangunan antar PD, khususnya *crosscutting* dalam mengawal pembangunan daerah sehingga tidak terlihat kepedulian perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah masih berorientasi pada penyerapan anggaran.

3. Pelaporan Kinerja : belum seluruh laporan kinerja tahun 2023 tingkat PD dipublikasikan secara umum melalui laman resmi pemerintah daerah, sebagian laporan kinerja perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, Laporan hasil evaluasi belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap OPD, Belum seluruh PD menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada level pusat seperti indikator capaian makro pada Pemerintah Provinsi, belum ada implementasi kebijakan *reward* dan *punishment* secara menyeluruh atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di setiap PD.
5. Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan : upaya pengelolaan kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mendapatkan gambaran umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui presentasi dan diskusi serta menganalisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*) yang dilakukan dengan membandingkan data anggaran kemiskinan pada SIPD dengan data penurunan jumlah masyarakat miskin pada data regsosek BPS.

Nilai Sakip pada tahun 2024 mendapat nilai BB (77,53) bila dibandingkan capaian target yang ingin dicapai masih belum memenuhi pencapaian nilai sebesar 80,55 dengan Kategori A, harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mencapai nilai yang ditargetkan dengan dukungan semua jajaran dari perangkat daerah bekerja sama dan mempunyai komitmen tinggi untuk mencapai 1 tujuan menjadi Provinsi yang berkompeten dan bersaing dengan provinsi lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beberapa hal sebagai berikut :

- 
1. Menindaklanjuti kembali rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.
 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penting (CSF) penyebab kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dengan menyusun pohon kinerja (*logical framework*) penanganan kemiskinan, serta memetakan strategi (taktikal) dan aktivitas (operasional) secara logis.
 3. Mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sesuai pohon kinerja, mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Selatan yang memadai serta melakukan pemuktahiran data masyarakat miskin dengan nama dan alamat tepat.
 4. Melibatkan peran seluruh *stakeholder* untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar PD juga menjadi salah satu langkah pendukungnya.
 5. Memanfaatkan hasil revidi dan perbaikan dari perjenjangan/cascading kinerja mulai dari level jabatan tertinggi hingga level operasional yang telah memperhatikan prinsip *logical framework* dan CSF sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
 6. Memastikan definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja telah digunakan menjadi pedoman dalam mengukur ketercapaian kinerja oleh seluruh Perangkat Daerah.
 7. Menegaskan kesesuaian antara target kinerja yang ditetapkan dengan indikator kinerja, serta telah ditetapkan secara realistis dan berdasarkan informasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
 8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah dan perangkat daerah melalui elaborasi dan analisis mendalam terhadap faktor pendukung dan penghambat dari capaian kinerja yang selanjutnya dibandingkan hingga tingkat nasional.
 9. Memastikan seluruh Perangkat Daerah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilengkapi dengan data dukung agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Analisis Penyebab belum tercapainya nilai SAKIP tahun 2024 yaitu :

Kendala lain yang dihadapi Perangkat Daerah dalam penyusunan LKjIP yaitu kurangnya personil atau pegawai teknis yang membidangi pelaporan dan evaluasi kinerja instansi sehingga sering memperhambat proses pengumpulan data kebagian organisasi. Beban pekerjaan yang dianggap sulit tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki pada masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang LKjIP terutama oleh pelaksana teknis selaku penyusun LKjIP juga sangat berpengaruh pada penyusunan dan pengumpulan data karena sering berganti pelaksana



teknis yang mengerjakan laporan dimaksud. Oleh sebab itu diharapkan adanya pemahaman, data pendukung dari masing-masing Perangkat Daerah serta memiliki kompetensi dibidangnya maka penyusunan LKjIP Provinsi Sumatera Selatan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas dapat tercapai.

Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75 pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. Pada tahun 2024 evaluasi untuk SAKIP dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP serta 494 kabupaten/kota. Keberhasilan pencapaian kinerja SAKIP 2024 didukung dengan adanya kerjasama Perangkat Daerah dalam pengumpulan data, bimbingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah. Adanya dukungan program/kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas yaitu Program Peningkatan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan kegiatan melakukan bimbingan teknis kesemua Perangkat Daerah.

Jika dibandingkan dengan nilai Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan nilai AA Provinsi Sumatera Selatan masih jauh dari kategori AA, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 77,53 belum mencapai target tahun 2024 yaitu nilai A (85), diharapkan kedepan bisa mencapai nilai tersebut. Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2026 yaitu :

1. Melakukan Bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Pembinaan kepada Kabupaten/Kota.
3. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
4. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berusaha dalam proses mengevaluasi seberapa baik sumber daya dalam membuat Nilai SAKIP meningkat untuk kedepannya dengan seoptimal mungkin meminimalisir sumber daya yang ada melalui teknologi yang digunakan seperti zoom kepada Perangkat Daerah, melalui mobile phone dalam mengirimkan perbaikan data yang akan diperbaiki dapat memberikan nilai tambah sehingga lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan laporan yang bersinergi, berkualitas dan menghemat waktu, biaya serta SDM yang seminim mungkin.

Capaian analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan penyusunan SAKIP yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan evaluasi dan monitoring SAKIP untuk memaksimalkan target kinerja nilai SAKIP dengan diselenggarakan kegiatan asistensi penyusunan SAKIP serta bimbingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

11

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A(88,31)	A(89,99)	101,90

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

5.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat



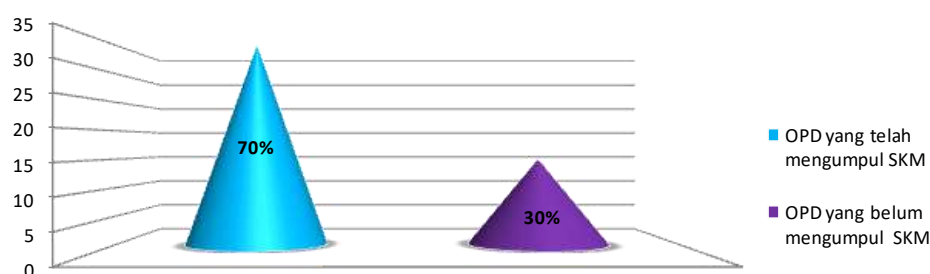
Grafik 1.39 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah menargetkan nilai indeks kinerja SKPD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata “Sangat Baik” (81,26 - 100), untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dengan mendapatkan nilai rata-rata “Sangat Baik” (89,99). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata “Sangat Baik” yaitu 88,31 dimana nilai rata-rata yang diperoleh 89,99.

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SURvei Kepuasan Masyarakat secara “manual dan online”, tata cara waktub pelaksanaan survey menjadi 2 (dua) Per Triwulan dan Per Semester sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017. Hasil survey Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Laporan SKM sebagai berikut :

Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Laporan SKM	Perangkat Daerah yang belum menyampaikan Laporan SKM	Target	Capaian (%)
35 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	50 OPD	70%



Grafik 1.40 Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan SKM

Hasil data Tabel dan Grafik diatas dapat di identifikasikan bahwa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Laporan SKM adalah : 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah dan yang Belum menyampaikan adalah : 15 (lima belas) Perangkat Daerah, nilai persentase dari Tabel dan grafik tersebut adalah 70% Perangkat Daerah yang telah menyampaikan dan 30% yan belum menyampaikan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah mayoritas masih secara manual dan minoritas online, Pemerintah Provinsi Sumsel ke depan akan menghimbau kepada Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan survei secara online agar kedepan dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi sesuai dengan fokus Reformasi Birokrasi di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan.

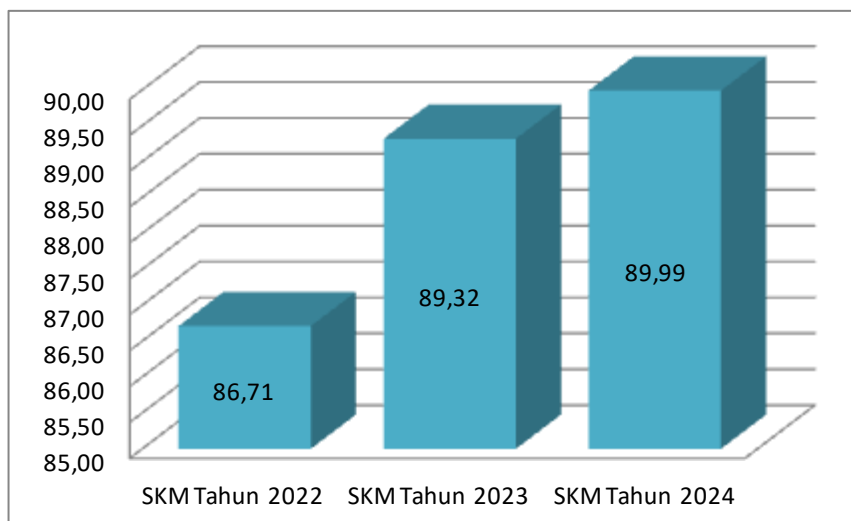
Rekapitulasi Laporan SKM Perangkat Daerah

Tabel 3.10 Hasil Rekap Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Jumlah Responden	Nilai IKM	Capaian Tindak Lanjut (%)
1.	Dinas Kesehatan	2.675	87.05	100%
2.	Dinas Pendidikan	75	89.58	50%
3.	Dinas Kehutanan	1.692	86.88	100%
4.	Dinas Sosial	150	87.02	100%
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	150	88.24	100%
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50	86.75	50%
7.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	114	89.08	100%
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	152	89.37	100%
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	25	94.97	100%
10.	Dinas Perindustrian	57	94.66	100%
11.	Dinas Perdagangan	290	93.88	100%
12.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	36	87.19	100%
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150	91.93	100%
14.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	150	95.49	100%
15.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	150	88.78	100%
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	90.83	50%
17.	Dinas Perpustakaan	150	90.57	100%
18.	Dinas Kearsipan	151	91.14	100%
19.	Dinas Tenaga Kerja	200	82.20	100%
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	150	88.96	100%
21.	Inspektorat	150	88.88	100%
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	150	94.11	100%
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52	95.99	100%
24.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	150	94.14	100%
25.	Badan Pendapatan Daerah	6.300	89.47	100%
26.	Badan Kepegawaian Daerah	150	90.52	100%
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150	90.82	100%
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25	86.50	50%
29.	Rumah Sakit Ernaldi Bahar	300	87.56	100%
30.	Biro Perekonomian	27	90.23	75%
31.	Biro Administrasi Pembangunan	125	89.44	100%
32.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	150	88.39	100%
33.	Biro Organisasi	25	92.02	100%
34.	Biro Umum dan Perlengkapan	30	89.91	100%

35.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	25	87.31	100%
		14.402	89.99	93.57%

Hasil data Tabel diatas dapat di identifikasikan bahwa Jumlah Responden dari semua Perangkat Daerah yang adalah : 7.608 Orang, dengan nilai rata-rata IKM nya adalah : 90.09 dan hasil persentase tindakanjut secara keseluruhan adalah : 92.18%.



Grafik 1.41 Analisa Nilai IKM Tahun 2022, 2023 dan 2024

Analisa Grafik Nilai IKM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perbandingan nilai IKM antara Tahun 2023 (89.32) dan 2024 (89,99) adalah terdapat sedikit peningkatan nilai IKM yaitu 0,67%, dimana

salah satu faktor pendorongnya adalah lebih aktifnya pembinaan Pemerintah Provinsi secara langsung terhadap SDM Perangkat Daerah dan monitoring terhadap pelaksanaan tindakanjut dari nilai unsur terendah yang di berikan oleh responden.

Perbandingan nilai IKM Tahun 2022 (86,71) dengan Tahun 2023 (89.99) adalah terdapat peningkatan nilai IKM sebanyak 2,61% dimana faktor pendorongnya adalah peningkatan di berbagai kegiatan di Perangkat Daerah ketika penyebaran Covid telah di tangani oleh Pemerintah, serta didukung oleh peningkatan anggaran di beberapa Perangkat Daerah.

Permasalahan dalam mengumpulkan data Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat karena dari 50 Perangkat Daerah yang mengumpulkan Laporan SKM baru 35 Perangkat Daerah.
2. Belum Optimalnya aksi Tindakanjut yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik dari nilai survei yang terendah.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelaksanaan SKM dengan Pembinaan dan monitoring yang lebih intensif pada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik.
2. Optimalisasi pelaksanaan realisasi tindaklanjut terhadap unsur-unsur terendah dari hasil survei dengan mengadakan konsultasi/koordinasi yang mengevaluasi tindaklanjut baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik maka dilakukan survei kepuasan masyarakat melalui partisipasi pengguna layanan masyarakat untuk menilai langsung pelayanan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp. 445.161.517.983,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 434.284.774.200,- (97,55%)**. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan sebesar 99,44%. Sedangkan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 73,38%.

Tabel 3.11 Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI *	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	2.731.526.190,-	2.702.777.063	98,95
2.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	42.498.916.816,-	41.379.420.602,-	97,37
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	1.186.884.364,-	1.084.402.602,-	91,37
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	157.600.000,-	131.513.444,-	83,45
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	37.063.750.394,-	36.857.054.743,-	99,44
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	777.751.500,-	639.487.430,-	82,22
7.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	344.082.761.878,-	335.439.289.501,-	97,49
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	16.110.466.841,-	15.566.341.755,-	96,62
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	110.000.000,-	101.669.313,-	92,43
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	321.860.000,-	236.178.141,-	73,38
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	120.000.000,-	110.639.876,-	92,20
TOTAL		445.161.517.983,-	434.284.774.200,-	97,55

D. ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat sepuluh sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

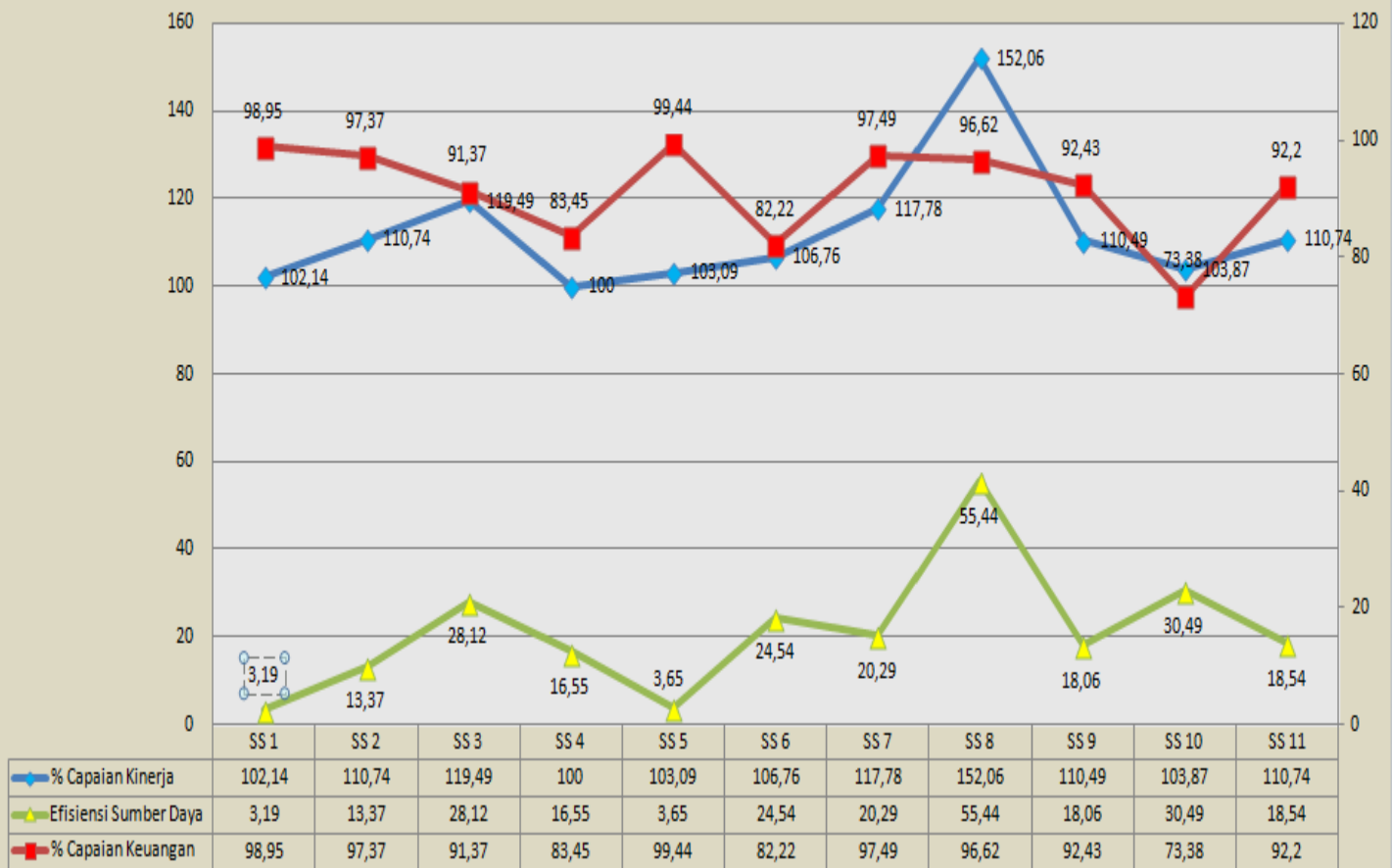
Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA- RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	102,14	98,95	3,19
2.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	110,74	97,37	13,37
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	119,49	91,37	28,12
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	100	83,45	16,55
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	103,09	99,44	3,65
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	106,76	82,22	24,54
7.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	117,78	97,49	20,29
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	152,06	96,62	55,44
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	110,49	92,43	18,06
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	103,87	73,38	30,49
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	110,74	92,20	18,54

Efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Grafik 1.42 Efisiensi Sumber Daya pada Provinsi Sumatera Selatan dengan 11 (sebelas) sasaran strategis

Grafik Efisiensi Sumber Daya



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Materi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 11 (sebelas) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang dihasilkan dari pengukuran dan penilaian kinerja berkualitas telah menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat tercapai. Kinerja yang meningkat dari waktu ke waktu merupakan buah dari upaya perbaikan kinerja yang dilakukan secara konsisten, antara lain melalui penetapan kinerja yang rasional dan terukur dengan perencanaan kinerja yang mendasarkan pada problematika daerah secara berkualitas dan penilaian kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dari Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan rencana kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPD dan RKPD 2024, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan sebagai bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi untuk pelaporan kinerja triwulan yang bisa diakses adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas sebagai satu paket kebijakan daerah.



Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Perangkat Daerah (PD) semua indikator kegiatan disesuaikan dengan *Cascading* Perangkat Daerah (PD) masing – masing;
3. Kepala Perangkat Daerah bisa memantau kegiatan dengan mempergunakan aplikasi *E-Monev* dan *E-Performance*;
4. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama dalam perumusan capaian;
5. Kinerja Perangkat Daerah (PD) disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPJMD dengan demikian pimpinan Perangkat Daerah (PD) harus berkomitmen dengan penyusunan RENJA capaian dengan *Cascading*.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengupayakan inovasi-inovasi pelayanan publik.
7. Laporan kinerja sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan laporan kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk memperteguh Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar diaplikasikan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2024, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, 26 Maret 2025
Gubernur Sumatera Selatan,



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKJIP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74
		1.2	Pendapatan per Kapita /PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	71,67
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,00
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,097
2.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,11
3.	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	10,95
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0,324
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14
7.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,63
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,94
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70
		7.4	Prevalensi Stunting	%	14,3
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04
		8.3	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,53
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,55
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKJIP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
PENGUKURAN KINERJA (PK)

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	- Laju Pertumbuhan Ekonomi - Pendapatan per Kapita /PDRB - Indeks Pembangunan - Indeks Entropi Theil	1.1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,07	87,41	BPS (BAPPEDA)
				1.1.2 Pendapatan per Kapita /PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	71,67	75,13	104,83	BPS (BAPPEDA)
				1.1.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,00	6,31	105,17	BPS (BAPPEDA)
				1.1.4 Indeks Entropi Theil	Indeks	2,097	2,331	111,16	BPS (BAPPEDA)
				RATA-RATA				102,14	
			1.2 Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan	1.2.1 Nilai Tukar Petani	%	109,11	120,83	110,74	Dinas Pertanian dan TPH
				RATA-RATA				110,74	
			1.3 Meningkatkan Ekosistem Inovasi	1.3.1 Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72	3,25	119,49	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				RATA-RATA				119,49	
			1.4 Terkendali Laju Inflasi Daerah	1.4.1 Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1	1,20	100,00	BPS (BAPPEDA), Biro Perekonomian
RATA-RATA					100,00				
2.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	- Tingkat Kemiskinan - Gini Ratio	2.1 Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	2.1.1 Tingkat Kemiskinan	%	10,95	10,51	104,02	Dinas Sosial
				2.1.2 Gini Ratio	Indeks	0,324	0,331	102,16	Dinas Sosial
				RATA-RATA				103,09	
			2.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran	2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,86	106,76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				RATA-RATA				106,76	
3.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	- Indkes Pembangunan Manusia - Indeks Pembangunan Gender - Indeks Pembangunan Pemuda - Prevalensi Stunting	3.1 Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,63	73,84	103,09	BPS (BAPPEDA)
				3.1.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,94	93,25	99,27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3.1.3 Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70	54	77,14	Dinas Pemuda dan Olahraga
				3.1.4 Prevalensi Stunting	%	14,3	1,20	191,61	Dinas Kesehatan
				RATA-RATA				117,78	
			4.	Meningkatan Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Persentase Penurunan Emisi - Indeks Risiko Bencana Sumsel	4.1 Meningkatkan Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	4.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93
4.1.2 Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04					20,20	251,24	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
4.1.3 Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,53					131,24	103,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RATA-RATA							152,06		
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	5.1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	5.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)	74,58	110,49	Biro Organisasi
			RATA-RATA				110,49		

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
			5.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	5.2.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,55	77,53	96,25	BAPPEDA, Biro Organisasi dan Inspektorat
				RATA-RATA						103,87	
			5.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5.3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (88,31)	A(89,99)	101,90	Biro Organisasi
				RATA-RATA						101,90	

Lampiran 2

1. Penghargaan yang diterima dari BPJS Kesehatan dalam hal Kontribusi yang sudah dilaksanakan selama ini bagi negeri demi terselenggaranya Program Jaminan Kesehatan bagi Rakyat Indonesia.
2. Penghargaan Pembinaan Proklamasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 11 Agustus 2024.
3. Penghargaan Adi Niti dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kategori Laboratorium Pemerintah dengan Ruang Lingkupnya Lengkap dan Taat dalam Perpanjangan Registrasi tanggal 10 September 2024.
4. Penghargaan kepada Provinsi Sumatera Selatan masuk kategori zona hijau kategori B (opini kualitas tinggi).
5. Penghargaan kepada Pemprov. Sumsel atas pencapaian memenuhi Kelengkapan Atribut pada Sembilan Variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Pro aktif).
6. Pemberian Gelar Kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung.
7. Penghargaan atas pencapaian Pemprov Sumsel dalam memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Pro aktif).
8. Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Menteri Hukum dan HAM (Kumham) Republik Indonesia (RI).
9. Penghargaan TOP BUMD Award 2024 atas peran dan kontribusi Kepala Daerah terhadap kinerja BUMD khususnya PT Tirta Sriwijaya Maju (PERSERODA), yang berhasil meraih predikat sebagai BUMD Teratas 2024 dengan level Bintang 4.
10. Penghargaan Birokrat Peduli Pers.
11. Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan atas kepemimpinannya yang berdedikasi tinggi terhadap pemuda dan masyarakat sosial.
12. Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan.
13. Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel sebagai Sahabat dan Mitra PWI.
14. Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel sebagai tokoh sahabat Guru atas prestasi dan keberhasilannya membangun dunia Pendidikan di Provinsi Sumsel.
15. Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel Bpk. Elen Setiadi, SH. M.S.E yang telah Berpartisipasi Dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian Yaitu Berkontribusi Terhadap Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Polda Sumsel Dalam Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat.

16. Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Penganugerahan CNN Indonesia Awards 2024 Kategori Outstanding Nasional Movement For Tourism And Development Of Creative Economy.
17. Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel Bpk. Elen Setiadi, SH. M.S.E kategori Outstanding Digital Innovation For Governance Sustainability.
18. Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia- Indonesia Minum Kopi Di Pinggir Sungai Serentak Peserta Terbanyak.
19. Penghargaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kategori Provinsi.
20. Penghargaan Bappanas Award Kategori Pelaksana Gerakan Pangan Murah Provinsi Tahun 2023.
21. Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas Dukungan pada Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-31 Tingkat Provinsi Tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau.
22. Penghargaan Pemimpin Daerah Award kategori "Percepatan Pembangunan Sub Kategori Percepatan Pembangunan Melalui Infrastruktur".
23. Penghargaan Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Tingkat Provinsi.
24. Penghargaan atas dedikasi dan komitmen tinggi Pemprov Sumsel dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis Universal Health Coverage (UHC).
25. Penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan "Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".
26. Penghargaan Anugerah Wahana Tata Nugraha Wiratama untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena telah berhasil menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik.
27. Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan tahun 2024.
28. Penghargaan Rookie Of The Year 2024.
29. Penghargaan Seven Media Award 2024 dengan Kategori Pemimpin Inspiratif Terbaik Indonesia "Kolaborasi, Sinergi, Keteladanan dan Integritas.
30. Penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2024 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik Ketiga Nasional.
31. Penghargaan pada Bhumandala Award Tahun 2024 yaitu Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori Provinsi Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial (IG).
32. Penghargaan pada Bhumandala Award Tahun 2024 yaitu Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) untuk Kategori Provinsi Bhumandala Nama Rupabumi.
33. Penghargaan pada Bhumandala Award Tahun 2024 yaitu Pemprov Sumsel meraih Penghargaan Geoportal Terbaik.

34. Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Penganugerahan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2024.
35. Penghargaan kepada Pj. Gubernur Sumsel Bpk. Elen Setiadi, SH. M.S.E menerima Piagam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai Provinsi Terinovatif.
36. Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas dedikasi Pemprov Sumsel yang telah Membina dan Membangun Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
37. Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Penganugerahan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 97,33.
38. Penghargaan Perunggu Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) kategori Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2024.
39. Penghargaan atas kontribusi dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.